

Islam dan Ikhtiar Keindonesiaan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Islam dan Ikhtiar Keindonesiaan



Muhammad Zulfikar Yusuf

Islam dan Ikhtiar Keindonesiaan

© **Muhammad Zulfikar Yusuf, 2022**

Penyunting: M. Taufiq Firdaus
Penata Letak: Farhan A. Dharma
Perancang Sampul: Fitri

xv + 178 hlm
14 x 20 cm
ISBN: 978-623-98082-7-3

Cetakan I, 2022

Diterbitkan oleh:

CV. Timur Barat

Jl. Janti No. 8 Caturtunggal Depok Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telp: 0882-3378-0380 / 0812-2894-4434
Email: penerbit.timurbarat@gmail.com

Daftar Isi

Pengantar Penulis — vii

Prolog — xi

BAGIAN I

Esai Agama — Membumikan Gerakan Islam Transformatif

- » Tauhid dan Islam *Rahmatan lil 'Alamin* — 1
- » Implementasi Salat: Upaya Mengintegrasikan Ritual dan Sosial — 7
- » Makna Puasa Bagi Seorang Muslim — 13
- » Membumikan Nilai-nilai Haji — 19
- » Memfungsikan Al-Qur'an — 25
- » Ushul Fikih sebagai Landasan Berpikir — 31
- » Konsep dan Tradisi Keilmuan Islam — 37
- » Perjalanan Agung Nabi Muhammad saw. — 43
- » *Ghazwul Fikr*: Sipil Islam vs Islam — 49
- » Reinterpretasi Makna Jihad — 55

BAGIAN II

Esai Sosial — Mencerahkan Peradaban

- » Perbedaan: Sebuah Keniscayaan — 61
- » Islam dan Budaya Mudik — 67
- » Lingkungan dan Masa Depan Umat Manusia — 73
- » Gerakan Jogja Bangkit: Wujud Solidaritas Kemanusiaan — 77
- » Membela Palestina Adalah Sebuah Kewajiban — 83
- » Muhammadiyah dalam Mencerahkan Kehidupan Bangsa — 87
- » Milad Muhammadiyah di Tengah Pandemi: Sedikit Bicara Banyak Bekerja — 93

BAGIAN III

Esai Politik — Membangun Nalar Politik

- » Pancasila untuk Semua — 99
- » Antikritik: Jalan Menuju Keruntuhan — 105
- » Disorientasi Politik Indonesia: Runtuhnya Moral Elite Politik — 109
- » Politik Tanpa Adab — 115
- » Inkonsistensi Kebijakan — 121
- » Krisis Teladan di Tengah Covid-19 — 125
- » Refleksi Maulid Nabi Muhammad saw: Perbaikan untuk Negara — 129

BAGIAN IV

Esai Ekonomi — Keadilan untuk Umat

- » Ekonomi Islam sebagai Jalan Alternatif — 135
- » Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Dunia — 141
- » Zakat dan Pemberdayaan Umat — 147
- » Keseimbangan Harga dalam Perspektif Islam — 153
- » Membangun Kemandirian Melalui Teologi Al-Qasas — 159
- » Ekologi dalam Perspektif Ekonomi — 165

Daftar Pustaka — 169

Epilog — 173

Tentang Penulis — 177

Pengantar Penulis

Syukur alhamdulillah kepada Allah Swt. yang selalu memberikan nikmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, yang jika kita menghitung nikmat yang Dia karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad saw., yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Sepanjang perjalanan peradaban, berbagai persoalan muncul dan hadir membersamai setiap langkah kehidupan umat manusia. Persoalan yang begitu kompleks menjadi bukti betapa beratnya tanggung jawab yang dibebankan pada umat manusia. Problematika zaman, pula dengan segala tabiat yang mengikuti, menjadi cermin atas setiap laku yang diperbuat.

Kita hidup di zaman yang serba paradoks. Pada satu sisi mengklaim diri sebagai makhluk dengan peradaban paling maju. Namun pada sisi yang lain menjadi aktor utama dari setiap kerusakan yang terjadi di muka bumi. Itulah mengapa kemudian manusia mampu menduduki posisi sebagai sebaik-baik makhluk, pula bisa menjadi seburuk-buruk makhluk.

Segala permasalahan yang hadir di tengah kita merupakan rahmat sekaligus ujian bagi kehidupan. Permasalahan itu tidak akan bisa terselesaikan hanya dengan petunjuk akal. Maka agama hadir menjadi pembimbing dari setiap perjalanan umat manusia, dengan akal yang bertaut dengannya. Bukan hanya sebagai doktrin semata, tetapi bersifat fungsional yang mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik.

Kehadiran buku sederhana ini di hadapan para pembaca, merupakan ikhtiar penulis dalam memposisikan diri sebagai bagian dari elemen bangsa dan umat manusia, yang mengharapakan kehidupan berjalan di atas nilai-nilai kemanusiaan universal. Tentu buku ini tidak membahas seluruh macam persoalan kehidupan. Tetapi paling tidak, penulis merasa memiliki tanggung jawab untuk hadir dari setiap dinamika kehidupan yang terjadi.

Secara garis besar, buku ini terbagi dalam empat bagian, yang terdiri dari esai agama, sosial, politik dan ekonomi. Pada esai agama, penulis mengurai tentang membumikan gerakan Islam transformatif. Pada esai sosial, penulis membahas tentang orientasi umat manusia pada pencerahan peradaban. Pada esai politik, penulis banyak mengulas persoalan perpolitikan di Indonesia, pula ikhtiar untuk membangun nalar politik yang berkemajuan. Dan pada esai ekonomi, penulis berusaha untuk menempatkan keadilan dalam setiap perjalanan ekonomi umat.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada kedua orang tua yang tak ternilai kebaikannya, pula kepada keluarga, dan sahabat yang telah banyak membantu dalam setiap proses perjalanan buku ini, serta penerbit yang telah membantu percetakan buku ini. Terkhusus, kepada Prof. Hilman Latief, di tengah kesibukannya, be-

liau masih bersedia untuk memberikan kata pengantar dalam buku ini. Pula kepada Mas Abdul Musawwir, yang telah bersedia untuk menuliskan epilog pada buku ini, di tengah kesibukannya sebagai aktivis IMM.

Demikian persembahan buku yang sederhana ini, penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan dorongan dalam proses penerbitan buku ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan secercah manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Terima kasih dan selamat membaca.[]

Prolog

oleh:

Prof. Hilman Latief, Ph.D

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Kemenag RI

Saya merasa sangat senang membaca naskah buku ini dan mengucapkan selamat kepada penulisnya, saudara Muhammad Zulfikar Yusuf, seorang aktivis dan pemikir muda yang memiliki semangat untuk mengungkap gagasan melalui tulisan. Tentu, mengemukakan gagasan atau pemikiran keislaman secara sistematis dalam bentuk tulisan masih terus dibutuhkan di kalangan generasi muda saat ini. Terutama ketika banyak kalangan muda yang sudah terlena dengan indahnya gadget yang serasa telah memberikan banyak informasi dan layanan kebutuhan informasi. Secara digital, dunia maya telah menjadi rujukan dari banyak masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai aliran dan jenis pemikiran keislaman. Tak jarang pula, seseorang menjadi terlihat lebih paham tentang Islam dan berbicara di mana-mana setelah ‘kursus singkat’ melalui internet. Meskipun, membaca berbagai sumber keislaman dalam internet saat ini diperlukan, kita perlu pula mendorong dan apresiasi anak muda yang mau menulis secara telaten dalam mengemukakan gagasan-gagasannya. Artinya, selain kedisiplinan membaca, diperlukan pula krea-

tivitas untuk menulis.

Tradisi pemikiran Islam bukanlah tradisi yang instan. Gagasan-gagasan yang berupaya menerjemahkan dan mengkontekstualisasi prinsip-prinsip keislaman agar terus dapat menjadi penggerak dalam masyarakat terus dilakukan secara dinamis oleh berbagai tokoh dari generasi yang berbeda. Sebagai sebuah ajaran yang secara normatif tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi, tugas berat dari kaum Muslim adalah bagaimana memahami dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut agar memberikan makna baik secara spiritual, sosial, budaya dan ekonomi dan berdampak nyata pada kehidupan.

Kita melihat dalam sejarah bagaimana konsep ijtihad dikembangkan sebagai satu bentuk ikhtiar dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan baru di masyarakat dengan perspektif ajaran Islam. Para Imam di kalangan mazhab fikih, para ulama di berbagai organisasi keislaman, dan para intelektual Muslim di berbagai tempat di dunia Islam terus mencoba mempertahankan keluwesan tradisi Islam agar tetap hidup secara dinamis melalui praktik ijtihad. Melihat Islam secara dinamis tentu tidak mudah. Perlu ilmu alat yang kuat, perlu kekuatan paradigma filosofis yang kokoh, dan tentunya perlu kemampuan refleksi yang tajam. Kita tahu, bahwa Al-Qur'an sebagai ayat-ayat qauliyah dan alam semesta raya sebagai ayat-ayat qauniyah hanya bisa dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Dengan kata lain, ayat-ayat qauliyah dan qauniyah hanya dapat dipahami dan diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan reflektif. Pasalnya ajaran-ajaran Islam yang mulia dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan begitu juga dengan kondisi alam yang kompleks, memerlukan proses pemahaman yang

tidak instan.

Sering saya sampaikan dalam berbagai ceramah bahwa berislam itu tidak mudah atau tidak semudah yang dibayangkan orang. Berislam secara benar sesuai dengan prinsip dan tujuannya tidaklah gampang. Berislam membutuhkan kedisiplinan ragawi, fikri, dan ruhani. Para ulama sudah merumuskan apa yang disebut dengan “tujuan dari syariat Islam” (*maqashid al-syari’ah*) untuk menegaskan bahwa di balik praktik-praktik ibadah, di balik pesan-pesan keagamaan dan rukun-rukun Islam, serta di balik keseluruhan perintah dan larangan dari ajaran-ajaran Islam, terdapat tujuan filosofis yang visioner dan pesan spiritual yang dalam yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Keberislaman yang bermakna membutuhkan pemahaman yang mendalam dan tentu saja refleksi yang kokoh agar masyarakat memiliki semangat untuk membawa dari tujuan syariat seperti memelihara agama, jiwa, akal pikiran, harta, dan keturunan.

Perintah berzakat dalam Islam bukanlah hanya perintah yang memiliki makna spiritual saja dalam membersihkan dan mengembangkan harta. Lebih dari itu, perintah berzakat erat kaitannya dengan perintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Karena itu, melaksanakan perintah zakat, harus diikuti dengan kesiapan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan zakat, transparansi keuangan, akuntabilitas manajemen zakat, kapasitas sumberdaya pengelola zakat (akuntan, pelaksana pendistribusian, pengelola data, pengawasan dan sebagainya). Selaras dengan itu, melaksanakan perintah haji juga harus diikuti dengan perintah untuk mempersiapkan manajemen keuangan, manajemen kesehatan, manajemen transportasi, dan mengharuskan lahirnya ahli-ahli tentang pemondokan, gizi, pengelolaan

dana, pengelola data base dan sebagainya.

Buku yang berjudul “Islam dan Ikhtiar Keindonesiaan” adalah karya kreatif dari Saudara Muhamamd Zulfikar Yusuf dan merupakan hasil refleksi dari penulis terhadap berbagai masalah keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Ia memberikan perhatian pada pentingnya untuk memberikan makna-makna yang lebih lugas dan dinamis terhadap ajaran Islam dan bagaimana pula cara menghidupkan tradisi baru keislaman dalam konteks keindonesiaan. Dilihat dari judul buku yang diajukannya, penulis nampaknya ingin melestarikan kesadaran yang sama dengan para pendahulunya. Saya membaca nafas yang sama dengan buku-buku yang ditulis oleh para intelektual Muslim Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Syafii Maarif, dan Abdurrahman Wahid yang senantiasa ingin membawa keislaman dan keindonesiaan dalam keselarasan. Lebih jauh lagi, saya juga melihat semangat dalam diri penulis untuk ikut mendorong dilakukan ijtihad-ijtihad di kalangan kaum Muslimin.

Tentu saja kedalaman refleksinya masih berbeda antara penulis dengan para intelektual Muslim yang lebih senior. Saya melihat bahwa penulis masih mencari ‘genre’ dari tulisannya maupun dari visi perubahan yang diimpikannya. Saya belum melihat “kacamata” ataupun paradigma konseptual yang spesifik digunakan untuk membaca sebuah fenomena keagamaan yang digunakan penulis. Tetapi keberaniannya menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan adalah pembelajaran besar bagi penulis yang saya yakin, akan tumbuh lebih matang dan tajam di masa akan datang. Setidaknya dari esai-esai yang ditulisnya, penulis sudah mau merambah berbagai aspek penting dalam Islam, mulai kajian tentang gagasan Islam transformatif, Islam dan masalah-masalah ke-

budayaan, Islam dan persoalan keadilan ekonomi, dan Islam dalam konteks masalah politik kebangsaan.

Menurut saya, esai-esai itu menjadi modal dan bekal yang sangat baik bagi penulis untuk menjadi seorang Muslim dengan kesadaran intelektual yang kuat di masa akan datang. Selamat membaca![]

BAGIAN I

— Esai Agama —

**“Membumikan Gerakan
Islam Transformatif”**



Tauhid dan Islam

Rahmatan lil 'Alamin

Bagi seorang muslim, salah satu intisari ajaran agama Islam adalah tauhid. Tauhid memiliki implikasi penting dalam setiap dinamika kehidupan seorang muslim, termasuk dalam sistem dan struktur amal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Sebab dengan tauhid inilah, Allah menunjukkan jalan kebenaran ditengah derasnya arus *thagut* yang menyimpang.

Makna Tauhid

Secara garis besar, tauhid dapat diartikan sebagai aktualisasi nilai-nilai ajaran agama Islam yang berdasar pada Allah yang Mahaesa dalam setiap dinamika kehidupan. Karena itu, tauhid tidak hanya bersifat parsial, tetapi menjelaskan secara komprehensif bahwa tauhid mengakui kesatuan penciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntunan hidup (*unity of guidance*), dan kesatuan

tujuan hidup (*unity of purpose of life*), yang kesemuanya bermuara pada kesatuan ketuhanan (*unity of godhead*) (Rais, 1987).

Dalam khazanah dan sejarah panjang perjalanan Islam, elemen penting yang menjadi dasar bagi umat Islam sebagai tumpuan dalam memahami tauhid adalah trilogi agama Islam, yaitu: iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang berinteraksi dengan Jibril a.s. Begitu pun dengan banyak ulama yang menafsirkan dengan akidah, syariah, dan akhlak.

Pandangan ini yang kemudian menjadi dasar dalam sistematika ajaran agama Islam dan menjadi pedoman dalam setiap dinamika kehidupan kaum muslim. Namun demikian, oleh sebagian umat Islam makna tauhid masih banyak diartikan hanya sampai pada persoalan akidah yang bersifat pasif.

Padahal tauhid memiliki arti yang lebih luas, sebagaimana akar katanya *wahhada-yuwahhidu-tauhidan* yang berarti menjadikan satu dan merupakan bentuk *masdar* (kata dasar yang tidak terikat oleh ruang dan waktu) yang bersifat aktif. Oleh karena itu, tauhid harus dimaknai sebagai suatu pemahaman yang bersifat fungsional dan tidak terjerembap pada makna yang sempit. Pemahaman tauhid inilah yang kemudian mengarahkan pada aktualisasi kerja-kerja kemanusiaan.

Manifestasi Tauhid

Tauhid kemudian bermuara pada tugas kekhilafahan melalui misi penciptaan manusia, yang telah disinggung oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai pemimpin dan pengganti di muka bumi (*khaliifah fiil ardh*). Dengan tauhid inilah, Allah mengamanahkan pada manusia

sebagai seorang yang memakmurkan bumi dan seisinya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui tugas kekhalifahan yang dijalankan, khilafah yang berlandaskan pada tauhid tentu akan menciptakan *dinul hadharah* (agama yang berkemajuan). Maka makna khilafah tidak hanya berkutat pada persoalan komunal, tetapi lebih luas berkaitan dengan konteks universal yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana pada ayat yang telah disebutkan sebelumnya, kutipan ayat menekankan pada, “*Innii jaa’ilun fil ardhi khaliifah.*” Allah tidak berbicara mengenai penciptaan manusia berdasarkan pada keimanan, tetapi pada kemanusiaan secara keseluruhan. Karena itulah, tugas menjaga dan memakmurkan bumi dengan segala isinya merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia, dan bukan pada orang beriman saja.

Dengan perantara tugas kekhalifahan ini, Allah membimbing umat manusia melalui Al-Qur’an dengan menyeru untuk menegakkan *al-islah* (perbaikan), yang berlandaskan pada prinsip dasar muamalah yaitu keadilan (*al-‘adalah*), persamaan (*al-musawah*), musyawarah (*asy-syura*), serta prinsip-prinsip pokok lainnya.

Pengejewantahan prinsip dan nilai dasar tersebut, merupakan kerja-kerja kemanusiaan yang menjaga dan membangun peradaban dengan mendatangkan *maslahah* (kebaikan) dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Konstruksi demikian yang akan mengarah pada kesejahteraan kehidupan umat manusia dan berwujud pada peradaban yang tinggi (*high civilization*).

Dalam dari itu, tauhid tentu tidak berangkat dari ruang hampa yang statis, tetapi di dalamnya terkandung energi positif yang memberikan keseimbangan bagi kehidupan umat manusia, baik bagi kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Dengan tauhid ini, umat manusia memiliki arah dan kompas bagi keberlangsungan hidup. Melalui ajaran *ilahiyyah* pada satu sisi sebagai dimensi teologis dan ajaran *insaniyyah* pada sisi yang lain sebagai dimensi antropologis.

Islam *Rahmatan lil 'Alamin*

Salah satu ajaran penting yang terkandung di dalam ajaran tauhid adalah menempatkan segala sesuatu pada posisi yang seharusnya. Menempatkan Allah sebagai Tuhan yang Mahaesa dan menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang setara. Maka melalui tauhid, manusia harus melepaskan diri dari segala penghambaan manusia kepada manusia dan manusia kepada selain-Nya. Ajaran penting ini yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad saw. pada masa jahiliah, untuk membumikan gagasan tentang kesetaraan manusia.

Oleh karena itu, salah satu rukun tauhid adalah *an-nafyu* yang berarti peniadaan. Meniadakan penghambaan dengan segala bentuk selain kepada-Nya. Makna tersebut yang kemudian bermuara pada kesetaraan, bahwa tiada yang boleh dituhankan selain Allah Swt. Perintah ini secara tegas Allah abadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.

Walaupun kemudian dalam konteks kehidupan bermasyarakat, masing-masing individu memiliki kepercayaan tersendiri dengan keberagamaannya. Agama merupakan sebuah keniscayaan, namun yang perlu dipahami dan dijadikan prinsip adalah tidak boleh ada penyamaan kebenaran agama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun. Tetapi tentu, dengan perbedaan tersebut, umat Islam memi-

liki tanggung jawab untuk mengajak pada kebaikan dan kebenaran yang hakiki.

Implikasinya bahwa melalui tauhid, Islam membawa pesan-pesan kemanusiaan universal dan bermuara pada sikap yang berkeadilan. Itulah sebabnya, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad saw., selain membawa ajaran Tuhan yang Mahaesa, di sisi lain Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak.

Kedua dimensi ini kemudian saling bertaut dan berkaitan, bahwa iman dan amal saleh, bagaikan dua mata koin. Menyeimbangkan dimensi teologis dan antropologis, seperti sayap pada burung yang saling membutuhkan. Tanpa salah satunya, tentu akan menghasilkan perjalanan yang tidak seimbang, dan pesan itulah yang ingin dibawa oleh tauhid.



Implementasi Salat: Upaya Mengintegrasikan Ritual dan Sosial

Sebagai seorang muslim yang mengimani ajaran Islam, persoalan salat seharusnya telah selesai pada ranah internal individu muslim. Tetapi faktanya, salat masih saja sering diabaikan dan ditinggalkan sebagai sebuah kewajiban. Padahal salat merupakan tiang agama dan amalan pertama yang dipertanyakan kelak di hari akhir nanti.

Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Pun sebaliknya, jika salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalannya. Oleh sebab itu, untuk merasakan manfaat salat secara mendalam, paling tidak, hal pertama yang harus diperbaiki tentu pada tanggung jawab sebagai seorang muslim terhadap ibadah salat.

Salat sebagai Ritual Ibadah

Sebagai orang muslim, betapa pun tingginya jabatan seseorang, atau melimpahnya kekayaan materi yang dimiliki,

hingga menumpuknya amalan dan kerja-kerja sosial yang telah dilakukan, tentu tidak akan berarti tanpa diiringi dengan ibadah salat. Jangankan dengan orang-orang yang meninggalkan salat, Al-Qur'an bahkan memperingati orang-orang yang lalai terhadap salatnya, dengan mengecap mereka sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Apalagi sampai dengan meninggalkan, tentu lebih berat dari itu. Buya Yahya bahkan mengatakan:

“Salat itu mudah dan hanya hamba pilihan Allah yang bisa melakukan salat. Kalau bukan hamba pilihan Allah akan sulit melaksanakan salat. Banyak orang yang bisa jogging, lari pagi berkilo-kilo meter, naik sepeda dengan perjalanan yang panjang, dan mungkin bisa mengangkat beban yang berat. Tetapi belum tentu bisa menunaikan salat, padahal dia tidak mengangkat apa pun di tangannya dan tidak pula menyunggi apa pun di kepalanya. Tapi mengapa orang tidak bisa salat? Karena tidak dipilih oleh Allah.”

Bagi seorang muslim, salat merupakan ibadah yang sangat fundamental. Dengan salat inilah terjalin hubungan interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Salat akan membentuk pribadi seorang muslim menjadi lebih baik. Setidaknya sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam QS. Al-Ankabut ayat 45 berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

*“Sesungguhnya salat itu mencegah dari
(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.”*

Dalil ini menunjukkan bahwa, salat juga memiliki peran penting dalam dimensi sosial seorang muslim. Sebab salat tidak hanya digambarkan sebagai ibadah vertikal semata an-

tara seorang hamba dengan Allah Swt., tetapi juga memiliki dimensi sosial sebagai pagar dan tameng untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Karena itu, salat seharusnya tidak dipandang dalam satu perspektif saja, ibadah ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial seorang muslim. Banyak sekali hikmah yang terkandung dari setiap gerakan salat. Salat yang dimulai dengan gerakan takbir menandakan bahwa segala kuasa dan kebesaran adalah milik Allah semata.

Bahwa segala bentuk kekuasaan dan penghambaan yang menjurus pada kesyirikan dan menduakan hak Allah, tentu harus ditiadakan termasuk penghambaan terhadap dunia yang semu. Pula salat, mengingatkan kita melalui gerakan yang diakhiri dengan salam, merupakan manifestasi dari kehidupan yang menjunjung tinggi kasih sayang, berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dari berbagai perspektif, salat bukan hanya menjadi kewajiban bagi seorang muslim, di dalamnya juga terdapat manfaat lahir dan batin yang dirasakan oleh tubuh. Misalnya, dari sisi kesehatan memandang bahwa salat dapat mencegah berbagai penyakit, termasuk di dalamnya mencegah penyakit varises, gerakan salat juga membantu menguatkan tulang, serta berpengaruh terhadap psikologi yang menenangkan jiwa.

Dr. Alexis Carrel, seorang dokter bedah yang juga sekaligus pemenang Nobel, menyebutkan bahwa manfaat dari gerakan salat dapat memberi sekumpulan energi, yang kemudian dari energi ini dapat digunakan sebagai pengobatan pada penderita tuberkulosis, infeksi tulang, luka ulserasi, kanker dan lain sebagainya (Akbar, 2020). Hasil penelitan ini tentu bukan hal yang mengejutkan, mengingat salat mer-

makna yang mendalam. Dengan salat, umat Islam terlatih untuk berdisiplin, sebagaimana telah ditetapkan waktunya (QS An-Nisa: 103).

Salat juga melatih untuk fokus (khusyuk), yang merupakan bagian dari kesempurnaan salat (QS. Al-Baqarah: 238). Dan dengan salat pula, umat Islam menciptakan ukhuwah dan kebersamaan, sebagaimana keutamaan salat berjemaah.

Maka salat seharusnya tidak hanya hadir dalam dimensi spiritual belaka, tetapi mampu membumi dalam setiap laku aktivitas keseharian. Walau kemudian, bagi sebagian orang, gerakan salat hanyalah sebuah rutinitas. Namun sebenarnya salat mengandung efek yang luar biasa bagi kehidupan sosial seorang muslim.

Salat merupakan sarana yang paling efektif dalam memahami hakikat kehidupan. Bahwa tiada kekuatan selain milik Allah dan tiada penghambaan terhadap segala bentuk macam berhalo dunia. Islam memandang bahwa persoalan salat dan ibadah lainnya, tidak hanya terpaku pada gerakan-gerakan ritual semata.

Namun lebih dari itu, seluruh ibadah yang diserukan kepada umat Islam menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri yang kemudian mengantarkan pada kesalehan sosial. Dengan ibadah itulah yang akan membentuk *khairu-ummah* (sebaik-baik umat), sebab dampak dari transformasi nilai yang dihasilkan dari ibadah yang telah dilakukan.

Dalam realitas sosial, kadang kala persoalan ibadah khususnya salat, dipertentangkan dengan persoalan akhlak. Seolah-olah kedua hal ini tidak memiliki korelasi. Padahal keduanya saling terkait dan memiliki pengaruh masing-masing. Begitu pun jikalau masih terdapat kekurangan pada sa-

lah satu dari kedua aspek tersebut, kita tentu berharap sesuatu yang baik akan berpengaruh terhadap yang belum baik. Jika shalatnya baik, sedang akhlaknya belum sempurna, kita berharap dengan shalat itu akan memperbaiki perilaku.

Demikian juga akhlaknya baik, sedang shalatnya belum sempurna, kita berharap dengan akhlaknya itu yang akan memperbaiki shalatnya. Karena itu, posisi yang paling ideal untuk menghadapi persoalan ini adalah dengan tidak memperbandingkannya, tetapi berharap sekaligus berusaha memperbaiki semoga dengan segala kebaikan yang bertaut dengannya dapat menghadirkan kesempurnaan shalat sekaligus akhlak.



Makna Puasa bagi Seorang Muslim

Bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki keistimewaan paling agung di antara 11 bulan lainnya. Sebagaimana di banyak dalil disebutkan, keutamaan-keutamaan yang dimiliki bulan puasa. Selain memiliki dimensi spiritual yang mendalam, puasa Ramadan juga memiliki dimensi sosial.

Namun seringkali umat Islam menafsirkan persoalan puasa hanya pada bentuk kepatuhan manusia pada Tuhannya dan meninggalkan hikmah serta aspek sosial yang terkandung di dalamnya. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda:

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ath-Thabrani)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa umat Islam, kerap kali memahami bentuk ibadah dalam Islam hanya sam-

pai pada persoalan doktrin dan tidak memiliki dampak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang kemudian berpuasa dan malah meninggalkan salat, betapa banyak orang yang berpuasa, namun masih menggunjing dan menfitnah, dan betapa banyak pula orang yang berpuasa dan masih mencuri uang negara.

Semuanya adalah paradoks dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak mampu diintegrasikan dan diaktualisasikan dalam bentuk laku keseharian. Karena itu, penting untuk memahami makna puasa secara komprehensif baik sebagai bentuk ibadah spiritual juga sebagai bentuk kesalehan sosial.

Signifikansi Puasa

Puasa berasal dari *shaama-yashuumu-ash-shiyaam* yang berarti *al-imsaak* (menahan). Secara istilah, arti ini merujuk pada makna menahan makan dan minum dari terbit hingga terbenamnya matahari. Di dalam salah satu hadis qudsi, Allah mengatakan:

*“Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa.
Amalan puasa adalah untuk-Ku.”* (Muttafaqun‘alaih)

Hadis di atas jelas menggambarkan bahwa betapa besar hikmah di balik amalan puasa. Paling tidak, hal yang paling mendasar dari hikmah hadis di atas, adalah bahwa puasa memiliki sisi kerahasiaan yang paling tinggi di antara ibadah lainnya. Amalan puasa ini, mengajarkan *ibrah* (pelajaran) kepada manusia bahwa orientasi penghambaan manusia, hanyalah kepada Allah semata dan terbebas dari segala kepentingan pribadi. Itulah sebabnya, mengapa kemudian Allah menyandarkan amalan puasa hanya kepada-Nya semata, sebab menahan diri dari *riya'* yang mampu terlihat secara fisik.

Sekitar tahun 1995 oleh ilmuwan di Inggris, diadakan sebuah penelitian psikologi untuk mengetahui faktor perilaku anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan observasi, dengan objek penelitian anak usia dini berumur sekitar 4 tahun berjumlah 10 orang.

Penelitian ini bermula dalam sebuah ruangan, anak dengan berjumlah 10 orang tersebut dihadirkan 10 buah roti yang dihadapkan di meja makan mereka. Peneliti tersebut lalu berkata, "Saya memiliki 10 roti untuk kalian, saya tinggal sebentar, bagi yang tidak makan roti ini akan saya tambah dengan 1 buah roti," ucap peneliti tersebut. Tentu, dengan karakteristik yang masih polos, ada yang menahan untuk makan dan ada pula yang menghiraukan. Hasilnya, sekitar 15 menit setelah peneliti meninggalkan ruangan, 3 di antaranya tidak memakan roti tersebut, dan 7 sisanya memakan roti tersebut.

Setelah 14 tahun kemudian, ketika anak tersebut sudah menginjak usia remaja-dewasa, dalam perjalanan psikologi anak, karakteristik 3 anak yang menahan untuk memakan roti, cenderung mampu mengendalikan emosi, menghindari konflik, dan mendapatkan hasil akademik yang cukup baik. Sedangkan 7 anak yang makan roti tersebut, karakteristiknya cenderung kurang mampu mengendalikan emosi, cara-cara penyelesaian masalah tidak menggunakan pendekatan komunikasi, dan hasil akademiknya rata-rata di bawah 3 anak yang menahan untuk memakan roti tersebut.

Walaupun penelitian tersebut tidak mengkaji tentang puasa, namun jelas hasil penelitian tersebut memiliki substansi yang erat kaitannya dengan puasa. Bagaimana kemudian orang yang mampu menahan terhadap "sesuatu", niscaya akan berdampak pada psikologi dan karakteristik orang

tersebut. Itulah kemudian mengapa bulan puasa disebut bulan *tarbiyah* (pendidikan), sebab di dalamnya banyak mengajarkan manajemen individu yang berdampak pada pola kehidupan sosial.

Puasa dan Dimensi Sosial

Selain sebagai ibadah vertikal, ibadah puasa juga memiliki dimensi sosial yang sangat luas. Dalam ibadah puasa, kita diajarkan untuk peka terhadap keadaan sekitar. Bagaimana kemudian selama perjalanan puasa berlangsung, umat Islam secara keseluruhan harus mampu merasakan kehidupan sehari-hari orang miskin dan *mustadh'afin* (orang lemah).

Pendidikan karakter puasa mengajarkan bahwa amalan puasa mampu merefleksikan kehidupan sosial yang dirasakan orang-orang yang kurang mampu dan tidak berpunya di luar sana. Oleh karenanya, selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt., nilai-nilai yang terkandung di dalam amalan puasa juga harus mampu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa puasa mengajarkan untuk selalu berbagi dan melihat ke bawah sebagai upaya untuk mendidik seorang muslim agar peka terhadap persoalan sosial, adalah sebagaimana sabda Rasulullah:

“Seorang yang beriman tidak akan kekenyangan sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar.” (HR. Bukhari)

Pada realitanya, masih banyak umat muslim yang tidak paham hakikat puasa sebenarnya. Bulan puasa yang sebenarnya memiliki dimensi spiritual yang mendalam dan dimensi sosial yang luas, nyatanya semakin memperlebar ketimpangan sosial di masyarakat.

Fenomena tingkat konsumsi masyarakat meningkat drastis selama bulan puasa, namun tidak untuk sebagian masyarakat kecil yang termarginalkan. Kenyataan ini semakin memperlihatkan bahwa puasa, belum mampu masuk dalam sendi-sendi kehidupan yang menjadi nilai. Puasa justru mempertajam tingkat konsumerisme dan egoisme yang menjadi orientasi individu ketimbang melihat keadaan sekitar.

Karena itulah puasa secara bahasa diartikan menahan. Menahan segala bentuk perilaku dan tindakan yang tidak berorientasi kepada Allah dan kepada kemanusiaan. Menahan segala bentuk perilaku mubazir dan foya-foya. Dan menahan segala bentuk laku yang mempertajam tingkat ketimpangan dan kesenjangan sosial. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang melaksanakan dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai puasa dengan sebenar-benarnya. Aamiin.



Membumikan Nilai-nilai Haji

Salah satu yang menjadi fondasi bangunan Islam adalah ibadah haji. Allah mewajibkan bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melaksanakan ibadah ini sekali seumur hidup. Dari seluruh penjuru dunia, umat Islam berkumpul untuk memenuhi panggilan Allah di Tanah Suci.

Ibadah haji bukan hanya semata persoalan ritual antara hamba dengan Rabb-Nya. Lebih dari itu, ibadah haji memiliki arti penting bagi kehidupan individu yang membentuk pribadi dan mengantarkan pada kesalehan sosial. Tetapi dalam kondisi seperti ini, keselamatan merupakan hal yang paling utama dan mendasar untuk didahulukan, sebagai bagian dari *maqashid syariah* (tujuan syariat) yaitu *hifzhun nafs* (menjaga jiwa).

Pelaksanaan haji bisa ditunda, namun di sisi lain, memberangkatkan jemaah haji dapat mengancam keselamatan nyawa jemaah di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum usai. Apalagi mayoritas jemaah haji Indonesia adalah mereka yang lanjut usia dan tentu akan lebih rentan terpapar virus ini.

Momentum Haji dan Relevansinya

Ibadah haji bukan hanya soal gelar, di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang patut diwujudkan dalam kehidupan sosial. Solidaritas kemanusiaan yang agung disimbolkan dari setiap rukun haji. Wajibnya haji menjadi dasar, bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi doktrin agama tetapi merupakan manifestasi ajaran agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Para ulama mengatakan bahwa esensi dari setiap ajaran agama hanya ada dua, yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan, termasuk nilai yang terkandung di dalam ibadah haji.

Melalui ihram, umat Islam harus meninggalkan segala bentuk kesewenang-wenangan, penindasan, kezaliman yang mengantarkan pada kerusakan. Pakaian ihram melambangkan pelepasan segala bentuk atribut keduniaan yang bertujuan untuk mengembalikan fitrah manusia yang suci. Simbol ini mengisyaratkan bahwa harta dan segala yang melekat pada diri hanya bersifat sementara dan kelak semuanya akan dikembalikan kepada Sang Pemilik sejati yang sekaligus menjadi bukti bahwa segala hal yang disombongkan akan hilang dan tak bernilai.

Di dalam melempar jamrah (batu kerikil), mengandung pendidikan karakter yang sangat besar. Lempar jamrah menggambarkan bahwa segala bentuk kemungkar, kefasikan dan kezaliman adalah musuh dan karenanya harus menjadi

lawan bersama. Baik dalam skala besar yang disimbolkan oleh jamrah *aqabah*, bahwa kepribadian seseorang memiliki andil besar dalam setiap tingkah laku. Sedangkan skala sedang yang disimbolkan oleh jamrah *wustha*, bahwa lingkungan memengaruhi kepribadian, hingga skala kecil jamrah *ula*, bahwa kultur masyarakat sekecil apa pun itu akan berpengaruh terhadap individu.

Dalam dari itu, pesan yang ingin disampaikan daripada lempar jamrah adalah melawan segala bentuk kemungkaran, penindasan, dan ketidakadilan yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Kesemuanya adalah simbol perlawanan terhadap kemungkaran dan perilaku menyimpang.

Sementara melalui tawaf, umat Islam diajarkan arti segala bentuk kemungkaran, kezaliman, haruslah diarahkan menuju perbaikan dan kasih sayang sebagai bentuk ketundukan pada ajaran Ilahi yang Mahaesa. Ka'bah adalah simbol suci bagi umat Islam, yang dengan segala lumuran dosa umat manusia di muka bumi, Allah Swt. yang menjadi lautan ampunan bagi setiap kesalahan.

Begitu pun dengan sai, menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak ada hasil yang dilalui tanpa usaha. Semua proses menuju perbaikan dan pendewasaan diri, harus diwujudkan dengan usaha dan ikhtiar. Puncaknya, *wuquf bil 'arafah* (berhenti di Padang Arafah), mengajarkan kepada umat Islam untuk memahami kembali, dan berhenti sejenak sembari mentadaburi arti daripada kehidupan.

Di tempat ini juga, menjadi perjalanan spritual bagi seorang muslim untuk melakukan persiapan mental, merenungi dan memaknai kembali ibadah haji yang kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan laku keseharian. Di sisi lain, wukuf

di Arafah adalah peristiwa agung yang ditunjukkan kepada umat Islam bahwa seluruh manusia di muka bumi adalah sama.

Harta, jabatan, latar belakang, status sosial, dan seluruh bentuk keduniaan yang semu dan melekat pada diri manusia akan sirna. Tidak ada lagi manusia yang superior, eksklusif, dan berada pada kelas atas. Fenomena seperti ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa seluruh umat manusia adalah sama di mata Allah.

Haji dan Realitas Sosial

Maka seluruh makna yang terkandung dalam ibadah haji yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan nyata ialah haji yang mabrur, yang mampu merubah pribadinya menjadi lebih baik. Haji mabrur bukanlah haji yang diterima (*maqbul*), sebagaimana yang banyak didefinisikan oleh orang-orang. Mabrur berasal dari kata *birrun* yang berarti kebaikan, suatu kebaikan yang muncul setelah hilangnya yang kotor.

Selain itu, dalam sejarah perjalanan Rasulullah, ibadah haji bukan hanya ibadah ritual biasa. Perjalanan ini adalah sebuah kesaksian, bahwa Rasulullah telah mewariskan nilai-nilai agung; melalui haji *wada'*. Segala bentuk penyelewengan, dan berbagai belenggu kezaliman, serta eksploitasi alam dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada hari itu, praktik-praktik jahiliah yang tidak memanusiakan manusia telah hilang. Kesemuanya adalah sampah-sampah masyarakat yang harus dibuang jauh-jauh.

Penegasan ini membuktikan kepada seluruh umat manusia, yang mengklaim kemajuan pemikiran dan peradaban, sementara di sisi lain menggali kembali sampah-sampah sisa jahiliah dengan segala perilaku eksploitasi dan penindasan

atas nama pembangunan, maka sesungguhnya mereka kembali menuju kemunduran peradaban, yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan kesemua itulah yang ingin Islam hilangkan, sebagai bentuk agama *rahmatan lil 'alamin*.

Akhirnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai dan pelaksanaan haji yang masih tertunda, se layakanya bagi kita untuk memaknai kembali dimensi sosial yang terkandung dalam ibadah haji. Ibadah ini bukan hanya persoalan ritual, di balik itu semua terdapat nilai-nilai agung yang menjadi prinsip dasar kemanusiaan bagi seluruh umat manusia, bahwa kita semua adalah sama dan setara.

Terlebih lagi dalam masa krisis, yang hampir setiap orang berada dalam kesulitan, penting bagi setiap muslim memiliki rasa kepedulian dan kepekaan (*sense of crisis*). Dan substansi yang dihadirkan ibadah haji adalah menolak segala bentuk perilaku mungkar, zalim, menyimpang, angkuh, pongah dan merasa paling superior.



Memfungsikan Al-Qur'an

Ketika Al-Qur'an pertama kali turun, kitab suci ini tidak turun pada bangsa dan peradaban maju, tetapi turun pada bangsa dengan kondisi yang paling terbelakang, penuh dengan kebodohan dan penindasan. Al-Qur'an tidak turun pada bangsa Romawi dan Persia yang saat itu, menjadi negara adidaya dan menguasai dunia.

Bangsa Romawi yang serba materialistis, dengan segala kemajuan peradabannya dalam bidang militer dan politik mampu menguasai Barat, pula dengan bangsa Persia dengan spiritualitas yang serba khayalan, yang menguasai Timur dengan kehebatannya pada bidang ilmu pengetahuan dan filsafatnya. Kedua bangsa ini memimpin wilayahnya masing-masing dengan kemajuan peradaban yang mereka miliki (Al-Buthy, 2007).

Namun tidak dengan bangsa Arab. Bangsa Arab tidak memiliki kekuatan militer layaknya Romawi dan tidak juga memiliki kemajuan ilmu pengetahuan layaknya Persia. Kendatipun demikian, masyarakat Arab dengan segala keterbelakangannya masih menampakkan fitrah kemanusiaan yang cenderung kepada kebaikan.

Meskipun bangsa Arab saat itu, tidak memiliki dasar pengetahuan yang membimbing mereka menuju jalan kebaikan, ditambah lagi dengan fanatik buta terhadap kabilah dan suku masing-masing. Itulah mengapa mereka disebut dengan masyarakat jahiliah.

Kedudukan Al-Qur'an

Pasca-diutusnya Nabi Muhammad saw. dengan turunya Al-Qur'an, bangsa Arab menjadi bangsa yang maju dalam setiap dimensi kehidupannya. Terciptanya ukhuwah, hilangnya fanatisme buta, berlakunya keadilan dan kesetaraan, serta meningkatnya kesejahteraan, menjadi bukti bahwa Al-Qur'an merupakan solusi dan petunjuk dari setiap permasalahan.

Semua persoalan itu dapat terselesaikan dengan bersumber dari Al-Qur'an yang diperjelas dengan sunnah Rasulullah saw. Sejarah peradaban Islam telah membuktikan bahwa Al-Qur'an memiliki nilai yang sangat istimewa dan tak tertandingi dari kitab dan karya tulis mana pun. Lantunan setiap ayat memancarkan keindahan tersendiri.

Dengan keindahannya tersebut, banyak orang yang hatinya keras kemudian menjadi lembut. Sampai-sampai, dengan keindahan setiap untaian ayat tersebut, menyebabkan orang kafir dan musyrik meragukannya hingga menentang ajaran Al-Qur'an. Karena itu di beberapa ayat, Allah Swt. membalas

orang-orang yang meragukan Al-Qur'an sebagai kitab suci, dengan menantang untuk membuat surat semisal.

Selain memiliki keistimewaan dengan lantunan dan syair-syair indahnyanya, Al-Qur'an juga memiliki keistimewaan tersendiri di antara setiap peristiwa yang terjadi. Segala apa pun yang bertaut dengan Al-Qur'an, maka ia akan menjadikan segala sesuatu itu menjadi istimewa. Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatulqadar, maka ia menjadi sebaik-baik malam (QS. Al-Qadr: 3).

Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, maka ia menjadi sebaik-baik bulan (QS. Al-Baqarah: 185). Al-Qur'an diturunkan melalui Malaikat Jibril, maka ia menjadi sebaik-baik malaikat dan pemimpin para malaikat (*sayyidul malai-kah*) (QS. Asy-Syu'ara: 193). Pula demikian dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. maka beliau menjadi sebaik-baik nabi dan makhluk (QS. Ali Imran: 81).

Dengan segala keistimewaan yang bertaut dengannya, maka mustahil jika Allah tidak memberikan pesan dan hikmah yang agung di balik diturunkannya Al-Qur'an. Kedalaman makna yang diproduksi, ketenangan jiwa yang dihasilkan, hingga keteliteian dan keseimbangan membawa sinyal bagi kehidupan, bahwa terdapat sesuatu yang spesial dari setiap deretan huruf, yang tersusun indah di dalamnya.

Utilitas Al-Qur'an

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril a.s. tidak hanya membawa bacaan semata, tetapi bersamaan pula dengan sistem dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat fungsional dan bisa dipraktikkan dalam setiap dinamika ruang dan waktu.

Inilah esensi sejati dari Al-Qur'an, ketika seseorang

mampu mengfungsikan Al-Qur'an dalam kehidupannya. Ia tidak hanya sekadar menjadi bacaan tetapi juga menjadi petunjuk dalam mengarungi kehidupan. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah menunjukkan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk, yang salah satunya pada QS. Al-Baqarah ayat 185 berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).”

Maka ketika Al-Qur'an menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, Al-Qur'an tidak hanya menjadi konsep normatif semata, tetapi juga menjadi *problem solver* (penyelesai masalah) dari setiap dinamika persoalan. Sebab Al-Qur'an tidak hanya menyentuh dimensi teologi, tetapi mengurai seluruh dimensi kehidupan, mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya hingga persoalan yang bersifat personal dan komunal, seluruh prinsip dasar persoalan tersebut dijelaskan oleh Al-Qur'an.

Al-Qur'an tidak hanya diturunkan pada satu kalangan maupun umat tertentu, tetapi diturunkan pada seluruh umat manusia pasca diutusnya Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an memiliki sifat *shalihun likulli makan wa zaman* (relevan di setiap tempat dan waktu). Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak saja mampu menjadi penyelesai masalah pada satu persoalan, tetapi mampu memasuki seluruh dimensi kehidupan.

Spirit dan seluruh pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hidup dan berjiwa multidimensi untuk setiap keadaan. Berkembangnya kehidupan seturut dengan ragam

macam persoalan yang bertaut dengannya, akan selalu memerlukan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, pula dengan sunnah Nabi Muhammad saw.

Sebagai seorang muslim yang mengharapkan kehidupan terbaik di dunia dan akhirat, hendaknya untuk selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai prinsip dasar dari setiap aktivitas kehidupan. Dengan Al-Qur'an itu, Allah yang akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai Al-Qur'an hanya sekadar menjadi sebuah bacaan, bahkan sebatas pajangan di rak buku belaka.

Al-Qur'an harus difungsikan sebagai pedoman dan kompas bagi perjalanan seorang muslim. Itulah pesan mendalam yang ingin disampaikan Al-Qur'an, menjadi *furqan* (pembeda; antara yang haq dan bathil), *hudan* (petunjuk), dan *bayan* (penjelas) dari setiap perkara yang muncul di muka bumi ini.



Ushul Fikih sebagai Landasan Berpikir

Salah satu kelemahan umat Islam saat ini adalah kecenderungan yang sangat tinggi dalam mempelajari ilmu fikih, namun lupa akan ushul fikih. Umat muslim cenderung lebih suka mengkaji dan lebih jauh membahas dengan produk-produk fikih yang sudah disuguhkan di hadapan mereka. Jarang sekali kita melihat di tengah masyarakat kajian-kajian yang membahas secara mendalam tentang ushul fikih.

Padahal sejatinya ushul fikih adalah akar dari fikih. Ia terbentuk dari metode *istinbath* (menetapkan) dengan cara menarik hukum melalui ijtihad. Ushul fikih merupakan kerangka berpikir yang selalu digunakan dalam memproduksi ijtihad fikih (Shidiq, 2014). Maka aneh rasanya bila kita mampu memproduksi hukum namun gagap dalam menggunakan alat analisis dalam memproduksi hukum.

Bagi sebagian orang, ushul fikih bukanlah menjadi pri-

oritas, karena sering kali telah merasa cukup dengan apa yang tersaji dalam karya-karya fikih. Namun, mempelajari ushul fikih akan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, jika telah dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam kitab-kitab fikih.

Terlebih pada masa sekarang ini, persoalan yang muncul sering kali merupakan persoalan baru yang dihadapi oleh umat manusia. Kompleksitas zaman menuntut untuk menghasilkan pemahaman yang tetap berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam. Karenanya, ushul fikih sangat dibutuhkan dalam konteks pembaruan hukum Islam. Tanpanya, ia akan menjadi bumerang yang melahirkan cara berpikir yang rancu dan tidak dilandasi dengan kaidah hukum yang benar.

Antara Wahyu dan Akal

Ushul fikih sebagai sebuah alat analisis dalam memproduksi hukum, selain berpedoman pada teks wahyu, juga didasarkan pada dalil akli dalam rangka memunculkan permasalahan di dalamnya, yang biasa dikenal dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat).

Proses pembentukannya, memadukan antara unsur teks dan konteks, wahyu dan logika. Dalam menggunakan unsur logika, ia bukan hanya sekadar berpikir sebagaimana berpikir pada umumnya, tetapi di dalamnya harus melalui proses yang tersistematis, sehingga melahirkan sebuah pijakan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pola interkoneksi antara wahyu dan logika, ushul fikih akan memberikan keseimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Di sisi lain, juga memiliki fungsi dalam mengawasi segala aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Pada akhirnya semua akan bermuara pada satu tujuan utama, yaitu memelihara agama Islam dari penyimpangan, ketimpangan, kerancuan berpikir, ketika dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan aturan hukum secara mengikat. Dengan ini, ilmu usul fikih merupakan bagian penting sebagai sebuah epistemologi hukum dalam perjalanan peradaban Islam.

Keseimbangan Logika

Pemahaman pemikiran dalam memproduksi suatu hukum seringkali mempertanyakan kejelasan dasar argumen yang bertuju pada kebenaran. Walau demikian, persoalan ikhtilaf (perbedaan pendapat) tidak dapat dihindarkan. Kekritisan akan selalu dituntut oleh teks, sedang kehati-hatian dituntut oleh logika, sebagaimana logika berpikir manusia itu relatif.

Berpikir yang mendalam dan bertanggung jawab atas argumen yang dikemukakan sesuai alur teks yang kontekstual, menjamin terbebas dari sanksi negatif, sekalipun tidak ada jaminan terlepas dari kekeliruan. Sebab setiap ijtihad yang berdasar baginya dua pahala dan yang keliru baginya satu pahala.

Namun persoalan umat Islam hari ini adalah kecenderungan menafsirkan teks yang timpang, yang terjebak pada pemahaman tekstual yang seringkali memahami *nash* agama hanya terfokus pada *zhahir* dan literal. Umat Islam cenderung kurang memperhatikan substansi dan hakikat.

Di sisi lain, terdapat model yang meninggalkan teks dan mengandalkan logika. Pemahaman yang biasa dianut oleh kaum sekuler dan liberal, yang cenderung memahami dan mengimplementasikan ajaran agama dengan semauanya.

Argumennya tidak lagi objektif, tetapi dilatarbelakangi oleh kepentingan.

Maka dalam mengambil suatu hukum, hendaknya berdasarkan pada kaidah “*laa ifrath wa laa tafrih*” (tidak meninggalkan secara keseluruhan dan tidak melampaui batas) (Abdurrahman, 2008). Tidak meninggalkan wahyu sebagai sumber ajaran, dan menggunakan akal tetapi tidak melampaui batas. Di antara keduanya adalah moderat.

Otoritas agama yang dibingkai melalui wahyu, idealnya dipasangkan dengan penafsiran nalar objektif dalam menyikapi perkembangan zaman yang semakin kompleks. Sikap seperti ini penting untuk selalu dijunjung sebagai bahan aktualisasi diri dalam menghadapi persoalan hukum yang terus muncul. Oleh karena itu, integrasi antara teks wahyu dengan nalar logika menjadi sangat menarik dimaknai secara teologis, untuk memunculkan produk-produk hukum baru yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maqashid Syariah

Pada akhirnya, proses pertautan antara teks wahyu sebagai sumber ajaran agama Islam dan nalar ijtihad sebagai instrumen penyimpulan hukum, tidak akan bisa menafikan *maqashid syariah* (tujuan syariat). Korelasi antara wahyu, logika, dan tujuan syariat dalam proses *istinbath ahkam* (menarik hukum), penting untuk selalu ditautkan agar produk hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari tujuan utamanya; mendatangkan kemaslahatan dan menangkal kerusakan (Yasid, 2019).

Maqashid syariah akan terus menjadi landasan dan dalil, pada setiap dalil naqli dan akli yang bekerja mengaktivasi dan mengefektifkan setiap ketentuan hukum. Penghayatan

dan internalisasi *maqashid syariah* pada setiap pembentukan hukum, harus terus selalu dilakukan. Sebab, kondisi yang terus mengitari aktivitas penarikan hukum yang terus mengalami pergeseran konteks dalam setiap ruang dan waktu.

Hukum bukan lahir untuk dirinya sendiri, melainkan bekerja untuk kemaslahatan umat. Hukum akan terus berperan dalam membangun dan mengelola kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Ia akan terus berorientasi pada kemaslahatan sebagai bagian dari *maqashid syariah*.

Maka idealnya, umat Islam mampu melihat persoalan-persoalan masyarakat dalam ragam perspektif dengan memperhatikan pendekatan bayani, burhani, dan irfani sehingga tampil sebagai *ummatan washatan* (umat tengahan), yang menghasilkan solusi yang bersifat moderat dan secara substantif, mendorong munculnya kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.



Konsep dan Tradisi Keilmuan Islam

Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan peradaban Islam dapat digapai dengan berpijak pada perhatiannya yang serius terhadap ilmu pengetahuan. Peradaban Islam ini merupakan hasil dari tradisi keilmuan Islam yang universal. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keilmuan yang bersifat *tauhid*, umat Islam harus bersikap terbuka terhadap khazanah keilmuan peradaban lain, termasuk pada perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi. Inilah yang kemudian menjadi prestasi ilmuwan-ilmuwan terdahulu, mengintegrasikan antara agama dengan ilmu pengetahuan.

Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan

Islam memandang perlunya mengintegrasikan ilmu. Perkembangan sains pada masa kejayaan Islam telah mem-buktikannya. Hal ini dapat diraih dengan konsepsi sains yang tidak sekuler dan berbasis pada tauhid (Husaini et al., 2013).

Andalusia yang saat itu menjadi pusat kota perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Termasuk berdirinya universitas-universitas ternama di Eropa yang telah banyak menerjemahkan buku dari perpustakaan di Andalusia.

Dalam bidang matematika, Khawarizmi menemukan aljabar dan angka nol yang disebut *shifr*, darinya berkembang ilmu pengetahuan yang menjadi dasar pengembangan ilmu komputer. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina atau kalangan barat menyebutnya Avicenna, menghasilkan sebuah karya kitab monumental yang berjudul “Al Qonun fi At Thibb”, yang di dalamnya membahas persoalan-persoalan medis.

Dalam bidang ilmu optik, Ibnu Haitham yang dikenal sebagai Bapak Optik Modern, berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia secara detail dengan karyanya yang terkenal kitab “Al Manazhir” dan hingga saat ini penemuannya menjadi dasar dalam pengembangan kamera (Madjid, 2019). Dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka adalah contoh beberapa contoh dari ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Begitu pun dengan Islam yang dibangun di atas ilmu dan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan terbukti dari berbagai dalil yang menjelaskan keutamaan mempelajarinya. Sebagaimana Allah Swt. mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam a.s. (QS. Al-Baqarah: 31). Begitu pun dengan ayat Al-Qur’an yang pertama kali turun berkaitan dengan perintah “membaca” kepada Nabi

Muhammad saw. (QS. Al-Alaq: 1).

Sebagai seorang muslim, tentu kita harus memiliki idealisme untuk berperan aktif dalam membangun peradaban melalui wacana keilmuan Islam, yang dilandasi dengan tauhid yang kuat dan akhlak yang mulia. Maka impelmentasi yang diharapkan dari proses pembentukan tersebut lahirnya umat yang mampu menegakkan Islam dalam aktivitas kehidupannya, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kalian (wahai orang-orang mukmin) satu kelompok yang mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syarak dan dinilai baik oleh akal sehat, dan mencegah perbuatan mungkar yang dilarang oleh syarak dan dinilai buruk oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan akhirat”.

Konsep Ilmu dalam Islam

Tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah konsep wacana keilmuan yang menjamur di tengah masyarakat adalah konsep ilmu dalam perspektif sekuler, yang tidak mengarah pada penguatan tauhid dan perbaikan akhlak. Tentu saja hal ini menjadi bertentangan dengan konsep ilmu dalam Islam yang menjadi pilar kebaikan. Padahal Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka

ia akan dipahamkan dalam ilmu agama”. (HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan kepada kita, bahwa sumber kebaikan berasal daripada ilmu yang mampu membangun suatu peradaban Islam yang maju dan menjadi *rahmatan lil ‘alamin*. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Bani Abbasiyah yang berpusat di Kota Baghdad, Bani Fatimiyah di Kairo, dan Bani Umayyah di Cordova adalah bukti-bukti di masa lampau, bahwa peradaban Islam akan mencapai kejayaannya dengan aktivitas-aktivitas ilmu pengetahuan (Karim, 2017).

Itulah yang kemudian digambarkan oleh Imam Syafi’i ketika menggambarkan kehidupan dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan jalan ilmu, *“Barang siapa yang menginginkan dunia maka wajib atasnya memperoleh ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka wajib atasnya memperoleh ilmu”*.

Di dalam Al-Qur’an, Allah banyak berfirman tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan aktivitas dan keutamaan senantiasa meningkatkan kapasitas keilmuan. Termasuk dalam doa yang biasa dibaca sebelum memulai aktivitas belajar, yang Allahabadikan dalam Al-Qur’an surat Taha ayat 114:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Dan katakanlah, wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu”.

Dan dengan ilmu pula, Allah akan mengangkat derajat seseorang melalui ilmu.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman

di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat". (QS. Al-Mujadilah: 11)

Karena itu terdapat perbedaan antara orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, sebagaimana yang Allah gambarkan dala Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Katakanlah, tidaklah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu."

Di sisi lain Allah juga mengecam orang-orang yang tidak menggunakan potensi dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang dengannya segala kebaikan akan mereka dapatkan melalui ilmu.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai". (QS. Al-A'raf: 179)

Karena begitu pentingnya kedudukan ilmu di sisi Allah, aktivitas mencari ilmu haruslah terus berjalan. Dia tidak boleh berhenti termasuk dalam keadaan perang sekalipun. Sebab dengannya, ilmu akan terus tersebar dan dengannya pula

seseorang akan paham dasar dan landasan dalam beriman dan beramal.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

(QS. At-Taubah: 122)

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Muslim)

Itulah sebab pentingnya ilmu, dengan kedudukan ilmu suatu peradaban akan mencapai kejayaannya. Tetapi sebaliknya, ketiadaan ilmu mendekatkan pada suatu kehancuran. Rusaknya ilmu dan ulama juga menjadi penyebab rusaknya suatu masyarakat. Kerusakan ini terjadi ketika ilmu disalahgunakan sebagaimana mestinya. Pula ilmu merupakan cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang berbuat kerusakan.



Perjalanan Agung Nabi Muhammad saw.

Umat Islam di seluruh dunia selalu memperingati Isra Mikraj. *Isra'* (isra) merupakan perjalanan Rasulullah saw. dari Masjidilharam di Mekkah ke Masjidilaqsa di Palestina. Adapun *mi'raj* (mikraj) merupakan kenaikan Rasulullah saw. menembus lapisan langit tertinggi sampai pada Sidratul Muntaha. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 1:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.”

Peristiwa ini terjadi pada masa *'amul huzni* (tahun kesedihan), tahun di mana ketika Khadijah istri Rasulullah dan paman beliau Abu Thalib wafat. Kedua orang inilah yang menjadi kekuatan dalam membela dakwah Rasulullah. Walau kemudian Abu Thalib tidak memeluk Islam hingga akhir hayatnya, tetapi dia adalah orang yang paling terdepan menjadi tameng dalam melindungi Rasulullah terutama ketika kaum kafir dan musyrik menyakiti dan menyiksa beliau.

Sejak ditinggal kedua orang tersebut, orang kafir semakin leluasa berbuat sewenang-wenang mengintimidasi Rasulullah (Al-Buthy, 2007). Setelah merasakan berbagai siksaan yang dilancarkan kaum Quraisy, Rasulullah saw. memutuskan untuk berangkat ke Thaif untuk mencari perlindungan dari Bani Tsaqif dan berharap mereka menerima ajaran Islam.

Namun ajakan beliau ditolak mentah-mentah, bahkan mereka mengerahkan para penjahat dan budak untuk mencera dan melempari batu sehingga mengakibatkan tubuhnya berdarah. Sampai-sampai Jibril dan malaikat penjaga gunung datang untuk menawarkan agar ditimpakan gunung pada mereka. Tapi Rasulullah tidak menginginkannya, bahkan beliau berdoa agar Allah melahirkan keturunan yang bertakwa dari tulang rusuk mereka.

Risalah Isra Mikraj

Peristiwa Isra Mikraj adalah cara Allah untuk memperlihatkan kekuasaan-Nya, sekaligus pelipur lara kepada Nabi Muhammad yang sedang berduka. Perjalanan ini disebutkan secara lengkap dan terperinci oleh Bukhari dan Muslim di dalam "Shahih"-nya. Pada perjalanan ini, Rasulullah saw. menunggang *Buraq* yakni suatu jenis binatang seperti kuda dan memiliki sayap dan mampu berjalan dengan langkah sejauh mata memandang.

Perjalanan pertama, Rasulullah memasuki Masjidilaksa lalu memimpin salat dua rakaat di dalamnya, bersama dengan para nabi yang jumlahnya sekitar 120.000. Setelah itu Jibril datang seraya menawarkan segelas khamr dan susu, Nabi Muhammad saw. kemudian memilih susu. Lalu Jibril mengatakan: Engkau telah memilih fitrah. Setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kedua, naik ke atas langit dan bertemu dengan para nabi.

Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua dengan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, sampai dengan langit ketujuh bertemu dengan bapak para Nabi, Ibrahim *'alaihimussalam*.

Sesampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah pertama kali mendapat perintah salat 50 waktu. Mendengar hal ini, Nabi Musa menyarankan Rasulullah agar meminta keringanan untuk mengurangnya. Allah pun mengabulkan permintaan beliau untuk mengurangnya menjadi 45 waktu. Namun Nabi Musa masih keberatan dan menyarankan Rasulullah agar kembali meminta keringanan. Begitu seterusnya sampai Rasulullah malu terlalu banyak meminta, hingga akhirnya Allah memerintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari.

Keesokan harinya, Rasulullah menyampaikan apa yang disaksikannya kepada penduduk Mekkah. Akan tetapi, oleh kaum kafir dan kaum musyrik ditertawakan dan didustakan oleh mereka. Hingga akhirnya hanya seorang Abu Bakar yang mengimani peristiwa tersebut. Itulah sebabnya mengapa ia dijuluki *ash-shiddiq* (yang membenarkan) (Al-Buthy, 2007).

Itulah peristiwa perjalanan agung Muhammad Rasulullah, yang pada saat itu tidak mampu dinalar logika, tetapi hari ini mampu terbukti yang didukung dengan segala kemajuan sains dan teknologi.

Falsafah Isra Mikraj

Paling tidak, ada beberapa pandangan hidup yang bisa dipetik dan dijadikan *'ibrah* (pelajaran) dalam menjalani aktivitas hidup. Pertama, Isra Mikraj adalah perjalanan mukjizat. Fenomena yang sering muncul hari ini adalah bahwa perjalanan kehidupan Rasulullah merupakan perjalanan kehidupan biasa. Gambaran seperti ini memperlihatkan bahwa sirah Rasulullah jauh dari kata mukjizat dan bukti yang biasa digunakan oleh Allah untuk mendukung para nabi dan rasul-Nya.

Pemikiran seperti ini dibentuk oleh kelompok orientalis dengan membawa paradigma, bahwa Rasulullah hanyalah seorang manusia biasa layaknya kita. Dalam keadaan seperti ini, musuh-musuh Islam dan orientalis membangun perspektif bahwa kemajuan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, disebabkan karena faktor kepemimpinan sebagaimana manusia biasanya dan bukan sebagai seorang nabi dan rasul.

Kedua, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Rasul sebelum melakukan perjalanan Isra Mikraj, telah merasakan berbagai penyiksaan dari kaum Quraisy, disamping fase kesulitan ketika kehilangan kedua orang yang dicintainya (Khadijah dan Abu Thalib). Di sisi lain penyiksaan yang dilakukan Bani Tsaqif ketika hijrah dan mencari pertolongan ke Thaif.

Perasaan tidak berdaya sebagai seorang hamba dan manusia yang memerlukan pembelaan. Hal ini terungkap dalam doa beliau ketika beristirahat di sebuah kebun kurma setelah

ditolak oleh masyarakat Thaif. Kemudian setelah itu, datanglah undangan kepada Rasulullah sebagai penghormatan dari Allah untuk kekasih-Nya, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di samping sebagai bukti bahwa perjalanan dakwah merupakan *sunnatullah* yang akan selalu ada ujian dan cobaan di setiap masa dan waktu (QS. Al-Insyirah: 5).

Ketiga, kedudukan Al-Aqsha. Berlangsungnya perjalanan isra ke Baitulmaqdis dan mikraj ke langit ketujuh, menunjukkan bahwa betapa besar kedudukan Al-Aqsha di sisi Allah. Di sisi lain, sebagai bukti bahwa ajaran Nabi Isa dan Muhammad saw., adalah ajaran yang satu yang diturunkan Allah kepada para Nabi *'alaihimussalam*. Bahwa hakikat agama samawi hanya ada satu, yaitu Islam.

Keempat, pilihan antara susu dan khamr. Pilihan Nabi saw. jatuh pada minuman susu ketika Jibril menawarkan antara minuman susu atau khamr. Hikmah yang kemudian dapat kita petik adalah menegaskan secara simbolik bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah, termasuk persoalan akidah dan seluruh hukumnya telah sesuai dengan fitrah manusia.

Fenomena yang menggambarkan bahwa sesungguhnya naluri manusia akan condong kepada kebaikan, kasih sayang, dan *rahmatan lil 'alamin*. Faktor ini yang kemudian menjadi kunci, mengapa Islam berkembang begitu pesat. Karena sejatinya, betapa pun tingginya budaya dan peradaban umat manusia, dia akan terus tetap cenderung melepaskan seluruh bentuk beban dan ikatan yang jauh dari tabiatnya. Maka inilah bukti mengapa Islam mampu memenuhi semua tuntutan fitrah manusia.

Kelima, salat sebagai kunci agama. Satu-satunya wahyu yang secara langsung disampaikan oleh Allah adalah perin-

tah tentang salat. Hal ini menandakan bahwa perintah melaksanakan salat adalah kewajiban yang sangat diperhitungkan. Bagaimana tidak, di banyak dalil salat merupakan amal yang paling penting dan sangat diperhatikan. Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi.”

(HR. Tirmidzi)

Dan masih banyak lagi dalil yang menjelaskan terkait urgensi salat. Jika saja Rasulullah tidak diutus untuk umat manusia, niscaya beliau tidak akan kembali dari mikrajnya. Itulah fungsi salat, bukan hanya sebagai sebuah ritual agama, lebih dari itu dia mampu menjadi bangunan peradaban bagi sebuah masyarakat.



Ghazwul Fikr: **Sipilis Agama vs Islam**

Dalam sejarahnya, persoalan sipilis (sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme), merupakan hasil dari konflik kepentingan antara agama (Katolik) dan para sarjana sekitar abad 16-17 M yang biasa disebut sebagai abad pencerahan (*age of enlightenment*). Jauh sebelum itu, gereja memimpin peradaban eropa sekitar abad 5-15 M. Abad ini oleh para cendekiawan disebut sebagai abad gelap (*dark ages*).

Pada abad ini, bersama dengan penguasa, pemuka agama Katolik memimpin masyarakat sebagaimana besarnya peran mereka dalam mengambil keputusan suatu negara. Kebijakan mereka bukan lagi untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan kelompok dan golongannya sendiri. Pemuka agama dan penguasa berselingkuh dengan mengeksploitasi sumber daya secara brutal.

Gereja membentuk doktrin melalui posisinya dengan melegalkan berbagai macam kezaliman. Para pemuka agama berhak menentukan mana yang *haq* (benar) dan mana yang *bathil* (mungkar), sebagaimana ajaran Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat. Masyarakat harus patuh terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja dan tidak diberikan ruang interupsi atas fatwa yang dikeluarkan.

Memasuki abad pencerahan, masyarakat Eropa terkhusus para pemikir dan cendekiawan, mulai sadar bahwa terjadinya abad gelap adalah hasil dari intervensi agama dari berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan. Puncaknya terjadi *renaissance* (kelahiran kembali), di mana rakyat melawan terhadap segala macam kebijakan agama yang dikeluarkan melalui gereja. Mereka menilai agamalah yang menjadi penyebab mundurnya peradaban dengan cara melegitimasi eksploitasi terhadap rakyatnya sendiri. Akhirnya, lahirlah negara sekuler, yang menuntut agama harus dipisahkan dari urusan negara.

Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme

Secara garis besar, sekulerisme dapat diartikan sebagai sebuah ideologi yang menggambarkan bahwa negara harus dipisahkan dari urusan agama. Kenyataan ini tentu berbeda dengan apa yang dibangun oleh Islam, bahwa segala urusan baik persoalan akidah, ibadah, dan muamalah telah memiliki prinsip dan landasan tersendiri. Bahwa urusan kehidupan tidak dapat dilepaskan dari syariat Islam.

Begitu pun dengan pluralisme, didefinisikan sebagai sebuah paham yang menyatakan bahwa kebenaran itu majemuk dan tidak dapat diklaim oleh pihak tertentu, dalam hal ini semua agama sama. Dalam kehidupan sosial, kemajemukan merupakan hal yang niscaya. Setiap masyarakat tentu memi-

liki ciri khas tersendiri dan hal tersebut merupakan bagian dari *sunnatullah* (ketetapan Allah). Sebagaimana Islam mengedepankan muamalah yang penuh dengan sikap adil dan *ta'awun* (penuh semangat tolong-menolong).

Tetapi kemudian pluralisme tidak lagi dipahami sebagai kemajemukan yang saling bertoleransi antaragama. Melainkan definisinya telah bergeser menjadi semua agama sama. Keyakinan semacam ini tentu jelas bertentangan dengan akidah Islam. Bahwa Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, hanya agama Islam yang diridai-Nya. Maka yang perlu digarisbawahi adalah persoalan yang bersifat akidah dan muamalah tidak dapat digeneralkan.

Di sisi lain, terdapat paham liberal yang kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang jauh melenceng dari Islam. Liberalisme agama adalah hasil dari pemahaman yang bebas dalam memahami nas-nas agama. Agama tidak lain hanya sebagai sebuah hidangan prasmanan; ambil sesuka hati dan meninggalkan yang tidak cocok. Padahal secara definisi, antara Islam dan liberal jelas bertolak belakang. Islam sendiri dapat diartikan sebagai pasrah dan tunduk pada syariat, yang berarti memiliki batasan. Sebaliknya, liberal berarti bebas, dan tidak boleh dikungkung oleh suatu doktrin apa pun. Maka jelas, Islam sebagai agama utuh dan universal, mengatur segala macam sendi kehidupan.

Namun, terdapat golongan yang menganggap bahwa Islam menghambat kemajuan. Pandangan ini berasal dari kaum orientalis, namun tidak sedikit juga intelektual muslim meyakini. Tentu hal seperti ini adalah hasil kesimpulan yang mengada-ngada. Seolah Islam merupakan agama yang hanya mengatur persoalan ibadah ritual dan bukan sebagai suatu sistem pandangan hidup (*way of life*) yang mengatur

seluruh sendi kehidupan.

Islam sebagai Pandangan Hidup

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, yang diamanahkan untuk mengatur, mengelola bumi dan seisinya untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umat. Untuk mencapai tujuan ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya, dengan membimbing dalam setiap aspek kehidupan yang meliputi akidah, akhlak, syariat.

Dua komponen pertama, bersifat konstan dan tidak mengalami perubahan. Tetapi syariat akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw., memiliki ciri khas tersendiri. Syariat ini bukan hanya bersifat menyeluruh/komprehensif dalam setiap aspek kehidupan yang diaturnya, tetapi juga bersifat universal yang relevan dalam setiap dinamika ruang, zaman, dan waktu. Karakteristik ini diperlukan sebab tidak ada lagi syariat yang akan datang setelahnya dan menjadi penyempurna dalam setiap syariat sebelumnya.

Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik persoalan ibadah maupun muamalah. Begitu pun dengan universal memiliki makna bahwa Islam akan terus relevan dalam setiap waktu dan tempat. Karakteristik ini akan terus melekat karena Islam mengenal istilah permanen dan fleksibel (*tsawabit wa mutaghayyirat, principles and variables*).

Maka tidak etis rasanya, jika persoalan kehidupan dengan segala macam aspeknya dipisahkan dari nilai-nilai agama. Islam telah terbukti berhasil pada masa kejayaannya dahulu dengan menerapkan segala prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam. Berbeda dengan peradaban Eropa, sipilis lahir

atas kritik terhadap gereja yang mengeksploitasi rakyatnya secara brutal. Maka, persoalan sipilis tidak bisa dibawa dalam Islam, sebab agama ini telah sempurna dan memiliki landasan dan prinsip yang akan selalu relevan dengan zaman.

Karena itu, Islam harus hadir pada setiap dinamika persoalan, baik pada soal wacana maupun gerakan. Di tengah perang pemikiran dan kepentingan yang mengarah pada dekonstruksi moral, umat Islam membutuhkan alternatif yang memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang melanda dengan memberikan pilihan mendasar sekaligus mence-
raahkan peradaban tanpa mereduksi makna Islam yang luas lagi menyejukkan.



Reinterpretasi Makna Jihad

Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia kembali digegerkan dengan aksi terorisme di beberapa tempat. Bom bunuh diri yang dilakukan oleh sepasang suami istri di Gereja Katedral Makassar, hingga aksi penyerangan Mabes Polri oleh seorang wanita menggunakan pistol. Aksi ini merupakan makna teror yang sesungguhnya, sebagaimana yang didefinisikan oleh KBBI, usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan.

Jika dilihat dalam kacamata luas, paling tidak terdapat dua hal yang menjadi sumber terorisme, yaitu persoalan ekonomi dan politik. Ketika seseorang tidak mampu, dia akan mencari jalan untuk menghidupi kecukupannya dengan melakukan aksi teror, baik dengan melakukan pembegalan, pencurian, dan lain sebagainya. Karena itu, sabda Rasulullah menjadi pengingat bahwa,

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.” (HR. Baihaqi)

Walaupun beberapa ulama berpendapat bahwa hadis tersebut berkekuatan daif (lemah), tapi paling tidak bisa dijadikan motivasi bersama bahwa keadaan yang serba kekurangan, dapat menggoda untuk melakukan kemaksiatan guna mencukupi kebutuhan, sehingga memancing untuk melakukan aksi terorisme.

Kedua adalah faktor politik, di mana aksi teror dilakukan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, sebagaimana Fir’aun menggunakan kekuasaannya untuk meneror Bani Israil. Peristiwa ini Allahabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49:

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذَّبُحُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.”

Karena itu, faktor yang menjadi tenteramnya kehidupan adalah kecukupan ekonomi dan stabilitas politik sebagai sumber utama. Allah berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Dialah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (QS. Quraissy: 4)

Memahami Makna Jihad

Bagi sebagian orang yang berpaham ekstrim, mereka menganggap bahwa aksi tersebut merupakan bentuk interpretasi dari makna jihad. Bahwa dengan aksi teror seperti bom bunuh diri, merupakan pembelaan atas nama agama dan mendapat ganjaran surga jika mati di medan jihad. Paham seperti ini yang kemudian mereduksi makna dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. Pemaknaan jihad yang hanya terbatas pada persoalan peperangan, akhirnya menimbulkan justifikasi bahwa Islam mendoktrin ajaran kekerasan. Dan pada akhirnya menjadi senjata bagi kaum orientalis yang untuk menciptakan islamofobia.

Karena itu, perlu sekiranya untuk melakukan pemaknaan kembali terhadap makna jihad yang sesungguhnya. Walaupun kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa jihad memiliki korelasi dengan peperangan, sebagaimana Rasulullah sabdakan bahwa:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, sedangkan puncak daripada Islam adalah jihad (dalam konteks kebutuhan)”

Namun di era kontemporer, makna jihad perlu ditinjau kembali sebagai sebuah ajaran Islam yang dinamis dan *rahmatan lil ‘alamin*, terlebih dalam konteks keindonesiaan. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman dan pluralitas harus dilihat sebagai sebuah keniscayaan. Karenanya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ada banyak dasar, pemahaman, hingga perspektif dalam memaknai jihad secara lebih komprehensif dan bijaksana.

Secara bahasa, jihad berasal dari kata *jaahada-yujaa-hidu* yang dapat diartikan bersungguh-sungguh. Kamus Al-Munawwir mendefinisikan terminologi jihad sebagai upaya untuk mencurahkan segala kemampuan. Upaya sungguh-sungguh ini kemudian diikat dengan kata *fii sabilillah* (di jalan Allah), di mana jihad memiliki orientasi hanya kepada Allah Swt. dan terbebas dari kepentingan manusia, sehingga makna jihad harus berdasar pada pemahaman yang luas, komprehensif dan tidak disempitkan pada makna perang saja. Allah berfirman dalam QS. Al-Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

Jumhur ulama membagi jihad dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah jihad melawan nafsu, merupakan tingkatan jihad paling dasar bagi seorang mukmin. Mujahid adalah orang-orang yang besungguh-sungguh di dalam menaati Allah dengan hawa nafsunya. Perlu dipahami dan digarisbawahi dalam mengamalkan konsep jihad, umat Islam tidak akan bisa melakukan jihad peperangan sebelum ia selesai melakukan jihad dalam melawan nafsunya. Sebagaimana Rasulullah berdakwah di Mekkah 13 tahun lamanya untuk memperkuat akidah dan keimanan sebagai bentuk jihad terhadap segala sesuatu yang membelenggu diri umat muslim saat itu.

Tingkatan kedua adalah jihad lisan. “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi

dan Ibnu Majah). Terakhir tingkatan ketiga, adalah jihad perang. Adapun tingkatan terakhir tidak akan bisa digapai ketika jihad melawan nafsu belum selesai. Sedangkan tingkatan terakhir tidak bisa digeneralikan kepada semua orang kafir. Orang kafir pun dibagi menjadi tiga kelompok, kafir zimi yang harus dihormati, kafir muahid sebagaimana di Indonesia berdasarkan kesepakatan Pancasila, yang diistilahkan oleh Muhammadiyah sebagai *Darul 'Ahdi wa As-syahadah* (negara yang dijanjikan dan dipersaksikan), dan kafir harbi.

Simpulnya, penting untuk selalu memahami teks-teks Al-Qur'an secara mendalam dan komprehensif. Dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis melalui wahyu, idealnya dipasangkan dengan penafsiran nalar objektif dalam menyikapi perkembangan zaman yang semakin kompleks. Sikap seperti ini penting untuk selalu dijunjung dalam menghadapi persoalan yang terus muncul dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, integrasi antara teks wahyu dengan nalar logika, menjadi sangat penting dimaknai secara teologis dan sosiologis untuk memunculkan wacana pemikiran dan gerakan yang *rahmatan lil 'alamin*.

BAGIAN II

— Esai Sosial—

“Mencerahkan Peradaban”



Perbedaan: Sebuah Keniscayaan

Fikih ikhtilaf atau yang biasa kita kenal dengan fikih perbedaan pendapat, merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang mengkaji perbedaan pandangan penafsiran terhadap suatu persoalan hukum. Perbedaan pendapat ini sangat mungkin terjadi disebabkan fitrah manusia yang memiliki akal, wawasan serta pemahaman yang beragam dan bervariasi.

Berbagai landasan dalil-dalil dan pertimbangan syariat yang bersifat *mukhtalaf* (diperselisihkan/belum disepakati) maka akan memperkaya wawasan, khazanah, pengetahuan serta mengembangkan dan memperluas pemahaman fikih. Pemahaman mujtahid dalam berijtihad mulai dari tekstual, kontekstual, sampai dengan aliran pertengahan yang menilai secara objektif pendapat yang terbaik akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang terbuka dan menghargai sesama (Al-Qaradhawi, 1991).

Multiperspektif dan Kebenaran Majemuk

Merupakan hal biasa jika terdapat banyak kelompok dan pemikiran yang masing-masing memiliki manhaj tersendiri dalam berjuang dan menegakkan ajaran agama Islam, selama perbedaan itu bersifat variatif dan bukan kontradiktif. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang ini adalah ada orang-orang yang perhatiannya bukan lagi pada persatuan, tetapi senantiasa menyebarkan benih-benih perselisihan dan perpecahan. Dan tentu hal seperti inilah yang harus kita jauhi bersama.

Maka kemudian ikhtilaf melahirkan dua perspesi, ikhtilaf yang membangun dan ikhtilaf yang memecah belah. Ikhtilaf yang membangun lahir dari pemikiran yang melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang (multiperspektif). Permasalahan ini kemudian ada yang bersifat alamiah, dan ada yang bersifat amaliah. Sebagai contoh yang biasa terjadi dalam penentuan puasa Ramadan apakah dengan rukyah ataukah dengan hisab, atau penggunaan qunut dalam salat, atau mungkin perbedaan sikap politik dalam bagaimana melihat masalah dan mudarat. Dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul karena perbedaan penafsiran satu dengan yang lain.

Sebaliknya, ikhtilaf yang memecah belah lahir dari faktor perilaku dan akhlak yang tidak menghargai perbedaan. Di antara sebab-sebabnya adalah yang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, buruk sangka terhadap orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, fanatik buta terhadap pendapatnya dalam masalah-masalah ijtihadiyah (yang belum ditemukan jalan keluarnya dalam nas-nas). Ke semua ini adalah perkara yang membangga-banggakan diri dan merendahkan orang lain, yang tentu bisa melahirkan sifat

sombong dan tutup telinga terhadap setiap perbedaan yang muncul.

Tetapi kemudian, yang perlu digarisbawahi bahwa perbedaan ini berkuat pada persoalan fikih semata dan bukan perbedaan menyangkut akidah yang bersifat prinsip. Hikmah yang kemudian hadir pada perbedaan ini adalah keluasan dalam menggali hukum. Di sisi lain, memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat. Kita tidak terbatas oleh satu pendapat hukum syariat.

Pada masalah tertentu, ada hukum yang mempersempit karena mengikuti konteks zaman, tetapi di mazhab lain memberikan kemudahan dan keluasan, baik yang bersinggungan dengan masalah ibadah ataupun muamalah. Karenanya, menjadi sangat penting untuk memahami dan menghargai perbedaan pendapat selama masih memiliki landasan dan dalil serta tidak keluar dari nilai dan norma-norma yang berlaku.

Perbedaan di Tengah Realitas Sosial

Dalam praktiknya, ada yang kemudian menjadi pegangan bagi seorang muslim dalam bergerak pada permasalahan ikhtilaf. Ada dalil yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Salat, terdapat dalil nas yang kemudian dipraktikkan oleh beliau. Tetapi adapula dalil yang dilakukan Rasulullah hanya sementara. Qunut misalnya, yang dipraktikkan oleh beliau hanya beberapa kali. Di sisi lain ada juga dalil tetapi tidak dipraktikkan oleh Rasulullah. Zakat yang merujuk pada nas adalah dengan kurma dan gandum. Maka kemudian dikiaskan dengan makanan pokok, dan kita diperbolehkan berzakat dengan beras atau uang.

Beberapa contoh tersebut merupakan keluasan dari ajaran agama Islam yang memudahkan. Sebab salah satu prin-

sip Islam dalam beramal adalah mempermudah. Termasuk hikmah di balik adanya rukhsah (dispensasi) dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam mengindikasikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kemudahan dan tidak mempersulit, termasuk dalam konteks bermuamalah.

Pemahaman ini tentu berimplikasi pada aktivitas sosial di tengah masyarakat. Termasuk, di antara faktor yang memperlambat ukhuwah islamiah adalah dengan memotong jarak. Jarak yang dipotong adalah buah dari menghargai perbedaan. Bentuk nyatanya adalah dengan tidak memaksakan sikap dalam masalah ijthadiyah dengan menghargai perbedaan. Para ulama menegaskan tidak boleh seorang mujtahid menolak pendapat mujtahid yang lain. Begitu pun dengan kita sesama mukalid (pengikut) terhadap mukalid yang lain, apalagi kepada mujtahid (Shidiq, 2014).

Saling bertoleransi dalam permasalahan yang masih diperselisihkan adalah sebuah rahmat. Perbedaan pendapat dalam masalah ijthadiyah haruslah dihargai. Masalah-masalah umum dan tidak menerima perbedaan adalah dia yang bersifat *qath'i* (tetap) yang pasti dan tegas. Misalnya, persoalan akidah yang tidak boleh diganggu gugat. Sejatinya Allah mampu untuk menutup pintu ijtihad. Tetapi kemudian Allah memberikan keluasaan dan rukhsah kepada hamba-Nya dengan tidak menyebut nas Al-Qur'an ataupun sunah secara menyeluruh dan tegas.

Maka, mari kita bersatu dalam masalah yang telah disepakati dan saling menghargai dalam masalah ijthadiyah yang masih kita perselisihkan. Terlalu rugi rasanya, jika energi kita dituangkan dalam masalah perdebatan yang bersifat furuk (cabang). Orang-orang yang membenci Islam di luar sana akan senang jika melihat kita telah berhasil diadu

domba. Masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Kekerasan, pelanggaran HAM, kezaliman, dekadensi moral, kemiskinan, ketimpangan sosial ekonomi, dan masih banyak permasalahan lain yang kita harus bersatu di dalamnya dan membutuhkan kekuatan yang besar.

Muslim satu dengan yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Jika tiangnya keropos, maka hancurlah bangunannya. Perselisihan dalam masalah ijtihadiyah dan furukiyah bukan penghalang kita untuk terus melebarkan sayap dakwah. Masih ada musuh dan kekuatan besar yang harus kita lawan bersama-sama. Dan untuk melawan itu, umat harus bersatu dalam satu naungan yang sama, di bawah naungan kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.



Islam dan Budaya Mudik

Lebaran Idulfitri yang biasa kita laksanakan pada setiap tahun biasanya identik dengan mudik. Mudik sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, yang jika kita tidak mudik, akan ada yang terasa kurang dalam lebaran tahun tersebut. Fenomena ini tentu menggambarkan bahwa mudik yang biasa kita lakukan setiap tahun sudah menjadi budaya sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Perhubungan, rata-rata jumlah pemudik dalam 5 tahun terakhir mencapai angka 20 juta jiwa. Tentu jumlah ini bukan angka yang kecil untuk ukuran volume lalu lintas. Belum lagi persoalan kemacetan, kecelakaan, buka-tutup ruas jalan, yang tentu semuanya membutuhkan persiapan yang matang. Melihat volume pemudik yang besar tersebut, motif utama yang paling mendasari seseorang untuk melakukan perjalanan mudik adalah untuk kembali mengunjungi keluarga dan karib

kerabatnya, di samping *refreshing*, ziarah, dan urusan pribadi masing-masing.

Jika kita mencoba menafsirkan kata mudik, akan banyak perspektif dalam memaknai kata mudik itu sendiri. Misalnya saja dalam bahasa Jawa, yaitu *mulih dhisik* yang berarti pulang dulu. Atau dalam bahasa Betawi berawal dari penyederhanaan kata *udik* yang berarti kampung. Sedangkan, dalam KBBI sendiri mudik berarti berlayar atau pergi. Secara garis besar, mudik bisa diartikan sebagai perjalanan seseorang untuk pulang ke kampung halaman.

Secara kultural, mudik biasanya menjadi sebuah “keharusan” bagi seseorang yang melakukan perantauan. Tradisi ini telah mengakar kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Baik itu dari tenaga kerja dengan segala latar belakang pekerjaannya maupun orang yang menjalani studi pendidikan di tanah perantauan.

Antara Agama dan Budaya

Agama Islam membawa ajaran yang secara garis besar berdasarkan klasifikasi ulama terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Akidah mencakup persoalan keimanan yang tidak bisa diganggu gugat. Akhlak berkaitan dengan perilaku baik buruk. Ibadah yang biasa kita kenal yang ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang mengatur tata cara ibadah murni, tidak ada penambahan dan pengurangan di dalamnya. Sedangkan muamalah atau yang biasa kita kenal dengan ibadah *ghairumahdhah* adalah ibadah yang tidak murni yang mengatur tata cara hubungan dengan manusia dan alam.

Namun yang sering menimbulkan masalah di tengah umat Islam adalah yang berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah. Mengenai ibadah ini, paling tidak yang men-

jadi dasar rujukan dalam memahami persoalan adalah pada kaidah ushul fikih bahwa:

الأصل في العبادات التحريم

*“Hukum asal ibadah adalah haram
(sampai ada dalil yang menghalalkannya).”*

Dalam hal ini dasar utamanya mengikuti perintah dan contoh dari Nabi saw. Di dalamnya tidak ada ruang untuk berkreasi. Perbedaan masih dimungkinkan menyangkut hal-hal yang tidak pokok karena terdapat dalil-dalil yang multitafsir, di samping kuat lemahnya sebuah hadis. Sepanjang ada landasan dalil naqli, perbedaan harus ditolerir. Adapun dalam muamalah kaidah yang berlaku adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة

*“Hukum asal muamalah adalah boleh
(sampai ada dalil yang mengharamkannya).”*

Jika dalam hal ibadah semua dilarang kecuali terdapat dalil yang menghalalkannya, maka dalam hal muamalah semua diperbolehkan sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Termasuk dalam produk budaya, adat, tradisi dan sebagainya yang menyangkut masalah muamalah.

Islam Memandang Budaya Mudik

Sejauh ini penulis belum menemukan satupun dalil yang berbicara soal mudik. Artinya, mudik dikategorikan termasuk dalam hal muamalah. Di dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim)

Secara garis besar, hadis tersebut dapat dipahami bahwa aspek muamalah dikembalikan kepada kita melalui ijtihad menggunakan akal yang sudah dianugerahkan Allah dengan tetap berlandaskan pada prinsip maqoshid syariah. Oleh karena mudik merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia, sedang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, maka mudik dianjurkan untuk dilaksanakan. Ada banyak sekali kebaikan yang terkandung di dalamnya, yang biasanya bertaut dengan budaya mudik masyarakat Indonesia, seperti:

1. *Birrul Walidain*

Salah satu momen yang paling indah saat mudik adalah bertemu dengan orang tua. Pesan tersirat yang kemudian bisa kita petik adalah bahwa kita akan selalu butuh dan rindu dari bimbingan, kasih sayang, juga doa dari orang tua. Itulah sebabnya Allah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (QS. Al-Isra: 23)

2. Menyambung Tali Silaturahmi

Di saat bersamaan, momen mudik dan Idulfitri adalah momen berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Dan tentu hal ini juga semakin mempererat tali silaturahmi di antara sesama, juga menyambung yang mungkin sempat renggang. Dan mungkin fadilah yang paling utama adalah memperpanjang keberkahan umur kita serta memperluas rezeki kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi saw:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

*“Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung tali silaturahmi”.
(Muttafaqunalah)*

3. Saling Berbagi

Momen mudik juga biasanya identik dengan saling berbagi. Secara tidak langsung psikologi seseorang akan merasakan arti dari saling mencintai ketika berbagi dan saling memberi hadiah. Hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah saw:

تهدوا تحابوا

“Saling memberi hadiah-lah kalian, maka kalian akan saling mencintai”. (HR. Thabrani)

Kesemua itu merupakan syiar-syiar yang terkandung dalam tradisi mudik yang perlu selalu ditanamkan. Walaupun kemudian ada yang berpendapat menyambung tali silaturahmi, saling memberi hadiah, dan kebaikan lainnya, tidak selalu saat mudik. Setidak-tidaknya dalam tradisi mudik kita masih dan akan terus memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap perilaku kita.

Tentu selama mudik harus menghindari tradisi yang secara jelas dilarang oleh agama. Semisal penukaran uang pecahan di jalan dengan tambahan, yang termasuk dari transaksi riba. Atau ujub dan riya ketika pulang ke kampung halaman dengan membesar-besarkan kesuksesan di tanah rantauan. Hendaknya kita selalu meluruskan niat dan membersihkan hati selama perjalanan mudik.

Wacana Pelarangan Mudik

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian PANRB, larangan mudik bagi ASN, TNI, POLRI, dan pegawai BUMN tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 36 Ta-

hun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. Adapun untuk masyarakat biasa, pemerintah menganjurkan untuk tidak melakukan mudik. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah membatasi penumpang sejumlah maksimal 50% sesuai kapasitas kendaraan.

Maka, bagaimana jika tradisi mudik yang di dalamnya terdapat kebaikan bertabrakan dengan kebijakan pemerintah yang mewacanakan larangan mudik? Dalam ilmu ushul fikih, terdapat metode istinbat hukum melalui maqashid syariah. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat serta menghindari mudarat.

Sedangkan kemaslahatan tersebut berorientasi kepada terpeliharanya 5 (lima) hal yaitu: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kemaslahatan tersebut memiliki tingkatan prioritas, yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Daruriyat* berkaitan dengan kebutuhan pokok; *hajiyyat* berkaitan dengan kebutuhan untuk menghindari kesulitan; sedang *tahsiniyat* berkaitan dengan memperindah.

Salah satu alasan wacana dilarang mudik adalah untuk memutus rantai persebaran Covid-19 yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Sedangkan mudik merupakan dari tradisi. Maka, maqashid syariah dari wacana dilarang mudik adalah berkaitan dengan memelihara jiwa pada tingkatan *daruriyat*, sedang mudik berkaitan dengan *tahsiniyat*, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan kebijakan pemerintah demi menjaga diri dari Covid-19 dan untuk tidak mudik terlebih dahulu.



Lingkungan dan Masa Depan Umat Manusia

Sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, hal mendasar yang perlu untuk selalu diingat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bukan tanpa sebab. Termasuk manusia yang kemudian diberi akal oleh Allah, satu-satunya makhluk yang menyanggupi memikul amanah tersebut. Peristiwa pengambilan keputusan itu Allahabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.”

Sebagai salah satu makhluk Allah yang diberikan beban akal untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya, manusia

harus paham akan tugasnya sebagai khalifah di bumi Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi.'"*

Maka sebagai khalifah, selain diberikan amanah oleh Allah untuk memanfaatkan bumi dan segala isinya, manusia juga memiliki tugas untuk merawat dan menjaganya serta tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Banyak orang yang menyangkal bahwa kerusakan atau bencana alam terjadi dengan sendirinya, yang kemudian tidak dapat dihubungkan dengan perilaku manusia. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kerusakan alam dan krisis lingkungan adalah sebab dari-pada ulah manusia itu sendiri. Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia." (QS. Ar-Rum: 41)*

Aktivitas Manusia dan Kerusakan Lingkungan

Paul J. Crutzen, seorang ahli kimia asal Belanda yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1995 atas peneliteiannya tentang lapisan ozon dan perubahan iklim, ia menjelaskan bahwa, saat ini aktivitas dunia telah memberikan dampak signifikan dan sistemik bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut berakibat pada kondisi kerusakan alam yang tidak mudah hilang bahkan dalam hitungan milenium, seperti senyawa kimia yang diproduksi dan memberikan dampak berbahaya bagi lapisan ozon.

Bukti bahwa kehidupan manusia memberikan paradoks yang nyata dalam kehidupan. Pada satu sisi mengklaim kemajuan dengan melakukan perbaikan dan pembangunan di berbagai aspek kehidupan, namun pada saat yang bersamaan justru menjadi aktor utama dari setiap kerusakan alam yang terjadi. Itulah mengapa sebagian orang menyebut manusia sebagai predator paling buas di muka bumi.

Pengrusakan habitat hewan langka sehingga menyebabkan punahnya makhluk hidup, termasuk perburuan liar, membuang sampah sembarangan yang berdampak pada terendatnya aliran air dan berdampak banjir, *illegal logging* (penebangan liar) juga menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga keseimbangan alam tidak terjaga, *global warming* (pemanasan global) yang terus meningkat, sampai dengan hilangnya kesuburan tanah dan kurangnya sumber air menjadi petaka akibat pembalakan liar. Pula pembangunan yang terus-menerus menyebabkan tanah tertutupi oleh beton dan berdampak pada sulitnya akses air bersih dari tanah dan kurangnya serapan air ketika turun hujan deras.

Kesemuanya itu merupakan akibat dari pelanggaran dan tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan itu, mengakibatkan kerusakan tempat tinggal bagi manusia itu sendiri. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, termasuk akan berdampak kepada seluruh umat manusia di sekitarnya tanpa terkecuali.

Visi Hidup dan Upaya Penyelamatan Lingkungan

Sebagai umat Islam yang diutus oleh Allah menjadi khalifah hendaknya selalu menjadi rahmat terhadap makhluk-

luk lainnya. Allah mengatakan, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107). Manusia tidak boleh hanya memanfaatkan apa yang dikeluarkan oleh alam, tetapi kewajiban di sisi lain dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangannya. Mengelola isi bumi harus selalu diiringi dengan menjaga dan merawatnya. Banyaknya ayat yang membahas larangan terkait pengrusakan alam menjelaskan secara implisit bahwa tugas utama manusia adalah menjaga alam dan seluruh yang terkandung di dalamnya.

Allah memerintahkan agar jangan berlebih-lebihan, termasuk dalam aktivitas konsumsi (QS. Al-A'raf: 31). Allah memerintahkan agar tidak menghambur-hamburkan harta (QS. Al-Isra': 26). Juga Allah memerintahkan agar tidak melampaui batas (QS. Al-Maidah: 87). Pula Allah memerintahkan agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 60).

Untuk itu, salah satu bentuk syukur kita terhadap Allah Swt. adalah dengan selalu menjaga dan merawat alam dengan sepenuh hati. Pemanfaatan alam dan lingkungan harus dilandasi dengan asas yang keadilan, keseimbangan, pemanfaatan bersama, serta tanggung jawab dan sikap konservasi yang berkelanjutan.

Sebagai umat muslim yang selalu menjunjung tinggi gerakan dakwah amar maruf nahi mungkar dan tajdid sebagai bagian dari komponen bangsa, kita menyadari bahwa kehadiran umat Islam sebagai khalifah harus terus terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang dihadapi oleh umat manusia.



Gerakan Jogja Bangkit: Wujud Solidaritas Kemanusiaan

*“Selama rakyat masih menderita,
tidak ada kata istirahat.”*

— Said Tuhuleley

Selain dengan mempercepat program vaksinasi untuk menciptakan *herd immunity* (kekebalan kelompok), pemerintah juga menerapkan kebijakan PPKM sebagai bagian dari ikhtiar menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19 yang memasuki gelombang kedua. Sudah hampir sebulan lamanya pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM. Beberapa kali pula kebijakan ini mengalami perpanjangan waktu dan berganti nama mengikuti kondisi sosial masyarakat. Mulai dari PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level 1 sampai dengan 4 sebagai indikator kedaruratan masing-masing daerah.

Namun di tengah pemberlakuan kebijakan ini, tentu banyak dampak yang dihasilkan, salah satunya adalah pada sektor ekonomi di mana terjadi penurunan pendapatan secara drastis, khususnya dari para buruh dan pekerja informal. Kebijakan ini tentu semakin sulit bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan harian. Sementara di sisi lain mereka juga membutuhkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Mereka itulah yang dianggap paling terdampak dengan adanya kebijakan PPKM.

Solidaritas di Masa Pagebluk

Walau kemudian Covid-19 menciptakan paradoks, di satu sisi orang kaya berteriak, “Prokes!” dan pada sisi lain orang miskin berteriak, “Lapar!”, PPKM justru akan memunculkan persoalan baru ketika pemerintah tidak menjalankan dengan serius. PPKM yang berdampak pada masalah ekonomi dan berkaitan dengan persoalan perut sejatinya tidak bisa ditolerir, karena berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Jika pemerintah tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dengan memberikan bantuan sosial dan stimulus ekonomi, tentu kebijakan ini akan membuat masyarakat menjadi tidak peduli dan lebih memilih kepentingan perut. Akibatnya, kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan angka Covid-19 justru dilanggar oleh sebagian masyarakat dan kehilangan substansinya, yang dengan kondisi seperti itu akan semakin mempersulit keadaan.

Pandemi ini sejatinya mengajarkan kita arti kehidupan, bahwa dalam kondisi terhimpit sekalipun, persoalan kemanusiaan merupakan prioritas yang paling utama. Gerakan “Jogja Bangkit” yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY dan Pimpinan Cabang IMM

se-DIY bekerja sama dengan LazisMu (Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) DIY dan MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) merupakan ikhtiar kemanusiaan merespons dampak pandemi Covid-19 secara ekonomi bagi kaum mustadhafin.

Pedagang kaki lima, penjual asongan, buruh dan masyarakat kecil lainnya adalah kelompok prioritas yang harus mendapat bantuan demi meringankan beban hidup di tengah mandeknya penghasilan harian. Sampai dengan catatan ini dituliskan, gerakan “Jogja Bangkit” setidaknya telah mendistribusikan 160 paket sembako dan 2.500 nasi bungkus yang dibagikan kepada masyarakat kecil yang terdampak secara ekonomi.

Gerakan ini tentu tidak berangkat dari ruang hampa, tetapi berangkat dari realitas sosial dengan melakukan pendataan objektif bagi masyarakat yang terdampak secara langsung. Di akar rumput, melalui obrolan ringan para pedagang banyak mengeluh bahwa PPKM jelas sangat memengaruhi pendapatan secara signifikan dan tentu menghambat perekonomian keluarga. Diberlakukannya PPKM menyebabkan ruang mobilitas mereka berkurang untuk mencari nafkah. Termasuk tukang becak dan tukang parkir yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Gerakan Jogja Bangkit

Dalam kondisi seperti ini, tentu tidak ada upaya yang paling berarti selain hadir dalam gerakan sosial yang berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat luas dan memberikan kemaslahatan. Berharap pada bantuan sosial dan stimulus ekonomi yang banyak dijanjikan pemerintah, justru tak pernah terlihat. Belum lagi isu bantuan sosial yang banyak terpotong dan hilang sebelum sampai di tangan mas-

yarakat, semakin menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat pada pemangku kebijakan.

Kondisi demikian tentu akan menjadi titik konflik dan menjadi permasalahan yang semakin kompleks. Apalagi, masyarakat miskin dan termarginalkan semakin rawan dan rentan menjadi objek eksploitasi politik dan ekonomi. Gerakan “Jogja Bangkit” turun untuk membantu meringankan beban rakyat di tengah keringnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat dalam menghadapi krisis dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Selain sebagai ikhtiar solidaritas kemanusiaan, gerakan “Jogja Bangkit” muncul dan berangkat dari semangat *fas-tabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil ‘alamin*, gerakan ini tidak akan lepas dari prinsip beramal saleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu, di banyak ayat Allah banyak menyebutkan iman dan amal saleh secara bersamaan.

Teringat sebuah pepatah mengatakan, “*Tahararak, fa inna fil harakah, barakah.*” (Bergeraklah, sesungguhnya dalam setiap gerakan itu ada keberkahan). Kalimat ringkas namun memiliki makna mendalam, yang paling tidak merefleksikan makna kehidupan, bahwa dengan bergerak dan memberikan manfaat tentu akan menghadirkan keberkahan dalam hidup.

Akhirnya, nilai hidup bukan hanya soal bekerja, berproduksi, pensiun untuk diri sendiri, tetapi dapat mewujudkan dalam bentuk solidaritas kemanusiaan. Dalam dari itu, definisi hidup sesungguhnya adalah di saat kita keluar dan mencari orang yang membutuhkan bantuan untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Bertransformasi layaknya seperti spons yang menyerap hal negatif dan memancarkan cahaya

positif. Dalam keadaan seperti itu kita menyadari bahwa setidaknya kita telah membantu meringankan hidup seseorang dan karenanya ia tidak menyerah, di saat itulah kita hidup.



Membela Palestina Adalah Sebuah Kewajiban

Hingga hari Senin (17/05/21), serangan bertubi-tubi yang dilakukan Israel di Jalur Gaza sejak sepekan lalu setidaknya telah menewaskan lebih dari 200 warga Palestina, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan. Selain terus meningkatnya volume serangan Israel melalui rudal yang dilancarkan, konflik ini berpotensi menambah jumlah korban warga sipil yang terdampak dari operasi militer di sejumlah wilayah. Kita semua paham bahwa Yerusalem merupakan bagian dari wilayah Palestina. Karena itu, warga Palestina memiliki hak untuk tetap mempertahankan wilayahnya dari serangan dan perampasan tanah oleh pihak manapun.

Konflik Palestina dan Israel

Sejak pendudukan dan berdirinya negara Israel tahun 1948, Israel telah banyak melakukan pelanggaran HAM, penindasan, dan kejahatan kemanusiaan. Sumber utamanya

adalah karena keserakahan untuk merebut Kota Suci dari rakyat Palestina, termasuk ambisi politik espansinya dengan mencaplok dan mengusir puluhan warga Palestina dari kawasan Sheikh Jarrah.

Walau kemudian muncul ragam perspektif dalam menanggapi konflik Israel-Palestina, tapi paling tidak hal yang paling mendasar dan bisa menjadi dalil dalam membela Palestina adalah persoalan kemanusiaan. Tidak ada satu pun negara di dunia yang ingin menjadi objek penjajahan terlebih menjadi objek penindasan. Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Pula dengan operasi militer yang terus digencarkan merupakan bentuk pengkhiatan bagi setiap bangsa yang berupaya untuk menciptakan keadilan dan kehidupan sejahtera.

Karena itu, segala bentuk penindasan dan kejahatan kemanusiaan harus dihapuskan, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”* Prof. Haedar Nashir juga mengimbau kepada dunia internasional khususnya kepada PBB untuk bertindak dan menghentikan segala bentuk kekerasan kepada Palestina yang dilakukan Israel. Dunia internasional jangan hanya diam dan harus mengambil langkah tegas. Selama negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengambil langkah, maka Israel akan terus sewenang-wenang.

Dalam bukunya (2016) beliau menjelaskan bahwa terjadi paradoks di negara-negara maju, khususnya dunia Barat.

Dunia yang seharusnya berpihak pada kebenaran dan penegakan hak asasi manusia, justru menampilkan wajah standar ganda. Di satu sisi menjadi penegak hukum sebagai polisi global dengan menindak negara-negara berkembang atas nama demokrasi, namun pada saat yang bersamaan bertindak sewenang-wenang dengan membebaskan dan mendukung segala macam bentuk penindasan dan genosida, termasuk sebagai eksportir senjata terbesar kepada Israel yang digunakan untuk menginvasi Palestina.

Membela Palestina, Membela Kemanusiaan

Dunia internasional khususnya PBB dan seluruh negara di dunia yang cinta kemerdekaan abadi, hendaknya bertindak tegas terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan Israel, serta tidak boleh melindunginya dalam bentuk apa pun. Negara-negara di dunia hendaknya mendukung Palestina agar Israel menghentikan segala bentuk kekerasan, kekejaman, tindakan pengusiran, dan genosida. Sebab efek yang dirasakan tidak hanya sesaat, tetapi berlanjut pada generasi setelahnya. Penderitaan fisik dan mental, pula pemusnahan dengan bom dalam setiap jengkal tanah Palestina, sama sekali tidak mencerminkan perangai sebagai seorang manusia. Nyawa seperti tidak ada lagi harganya. Ambisi untuk menguasai jelas merupakan watak dari penjajah yang harus dihapus dari setiap jengkal tanah di bumi.

Dari generasi ke generasi, rakyat Palestina terus diteror, dirampas hak hidupnya, bahkan direnggut paksa tanahnya. Tanah air yang kita pun turut perlu menjaganya. Bukan saja karena kesucian persadanya, namun di atas segalanya, semata-mata karena panggilan kemanusiaan. Namun di tengah keadaan dunia yang makin menuju ambang ketidakstabilan, ditambah sikap negara-negara Arab yang serupa musuh da-

lam selimut, maka menjadi tepat kalimat Buya Syafii Maarif: dunia hanya akan mungkin damai dan nyaman, manakala zionis Israel pindah ke planet lain. Atau dalam kalimat lebih tuntas, hanya Allah-lah, satu-satunya penolong dan harapan.

Kita semua berharap bahwa konflik ini harus segera berakhir. Segala bentuk praktik penjajahan dan penindasan harus dihilangkan di muka bumi sebagaimana amanat UUD 1945. Selain dengan ikhtiar doa dan material untuk terus menyuarkan hak-hak rakyat Palestina, dunia internasional khususnya pemerintah dan rakyat Indonesia harus terlibat dan proaktif dalam menyudahi konflik yang berkepanjangan ini, dan memberikan sanksi tegas Israel yang telah menghilangkan banyak nyawa dari aksi brutal yang telah dilakukan.

Ada banyak alasan mengapa kita harus membela Palestina. Selain sebagai sebuah tanah yang diberkahi dengan dihadapkannya para nabi dan syuhada, Palestina merupakan bangsa yang harus selalu dibela atas nama kemanusiaan. Negara inilah yang termasuk dari *assabiqunal awwalun* (golongan pertama) yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Karena itu, Indonesia seharusnya terus proaktif untuk membela Palestina dalam setiap usaha. Membelanya tidak perlu untuk menjadi muslim, cukup menjadi manusia.



Muhammadiyah dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Dalam sejarah perjalanan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, dunia pendidikan menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan. Ancaman dan tantangan tersebut muncul karena bergesernya orientasi pendidikan di tengah derasny arus globalisasi. Salah satu yang menjadi penyebab utama adalah dengan munculnya kelompok tatanan kehidupan yang dibatasi antara negara maju dan negara berkembang.

Fenomena seperti ini melahirkan paradigma hegemoni yang berkompetisi untuk saling menguasai. Akibatnya, antara satu negara dengan negara yang lain, kehilangan batas-batas yang menyebabkan negara menjadi seperti satu kesatuan, tetapi pada realitasnya saling berusaha untuk mendominasi di tengah derasny arus modernisasi.

Termasuk dunia pendidikan Muhammadiyah yang berada di antara orientasi pendidikan sekulerisme-materialisme dan menggusur orientasi pendidikan sesungguhnya. Pendidikan yang seharusnya diarahkan pada pembentukan karakter bangsa justru banyak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang menjadi tembok penghalang bagi visi pendidikan dan jati diri bangsa ke depan.

Tujuan mencetak akademisi Islam yang berakhlak mulia sekaligus sebagai pelopor, pelangsong, dan penyempurna amanah, semakin berat dengan dihadapkan pada persoalan global. Apalagi, jika indikator keberhasilan pendidikan hanya dilihat dari statistik angka belaka, tanpa melihat substansi pendidikan yang sebenarnya.

Pendidikan Muhammadiyah dan Upaya Mencerdaskan

Menurut Prof. Haedar Nashir, paling tidak ada lima hal yang menjadi virus bagi dunia pendidikan, antara lain: agnostisme; cara pandang yang menjauhkan nilai-nilai agama dan ketuhanan, ekstrimisme dan radikalisme yang berorientasi pada tujuan dengan paham ekstrim, perundungan dan kekerasan yang dijadikan sebagai budaya lumrah, praktik pelecehan yang merendahkan martabat manusia, dan pembodohan yang mengekang sehingga tidak diarahkan pada pengembangan dan aktualisasi diri.

Virus demikian menghasilkan pandangan dan praktik yang menjadikan dunia pendidikan mandek dan tertinggal. Peserta didik diarahkan pada pembentukan karakter yang jauh dari nilai-nilai luhur bangsa, pula mengalami dehumanisasi. Selain itu, persoalan akhlak dan etika juga merupakan masalah lain dalam dunia pendidikan. Pendidikan tersebut hanya sampai pada persoalan teori, namun tidak mampu menjadi kebiasaan dan diaktualisasikan dalam kehidupan

sehari-hari.

Padahal pendidikan merupakan jantung dari kehidupan. Dari pendidikan inilah akan menghasilkan generasi-generasi emas penerus bangsa. Maka wajar, perilaku pendidik dalam memberi contoh (*uswatun hasanah*) sangat berefek terhadap tumbuh kembangnya kepribadian peserta didik. Itulah sebabnya Muhammadiyah sedari awal berdiri hingga saat ini terus fokus dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan bersamaan dengan kuantitas lembaga pendidikan.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di dunia dan diakui sebagai organisasi yang memiliki lembaga pendidikan terbanyak di Indonesia. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, pondok pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi dan yang setingkat dengannya telah mencapai lebih dari 10.000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Jumlah amal usaha pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah tidak kalah oleh organisasi mana pun.

Terbaru, Muhammadiyah telah mendapat izin pendirian universitas yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Muhammadiyah baru saja meresmikan Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM) sebagai bagian dari amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 untuk melakukan gerakan internasionalisasi pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa peran Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa takkan pernah usai.

Idealisme pendidikan Muhammadiyah memiliki ciri khas tersendiri dalam menjawab berbagai tantangan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari gerakan pendidikan Muhammadiyah adalah gerakan tajdid (pembaharuan). Muhammad-

iyah hadir di tengah zaman yang serba terbelakang. Budaya TBC (takhayul, bidah, khurafat), kemiskinan serta kehidupan yang serba kolot dan tertinggal menjadi fenomena yang lumrah. Dengan membawa misi Islam *rahmatan lil 'alamin*, Muhammadiyah membuka kacamata dan cara pandang masyarakat Indonesia khususnya umat muslim yang jauh dan tertinggal dari kemajuan peradaban. Muhammadiyah melakukan modernisasi dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunah (Nashir, 2016).

Tantangan Muhammadiyah di Bidang Pendidikan

Hal tersebut tercermin dari bagaimana Muhammadiyah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan antara ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Integrasi ini dimaksudkan agar Muhammadiyah mampu mengimbangi antara kehidupan dunia dan akhirat, serta dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman.

Termasuk pada masa-masa awal berdiri Muhammadiyah yang banyak mengiterupsi zaman, dengan budaya yang tertutup dan anti-berkemajuan. Walau kemudian Muhammadiyah juga dihadapkan pada beberapa persoalan lain seperti pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, yang tidak sama sekali meninggalkan kerangka teoretis dalam bentuk karya ilmiah (Hambali, 2008), namun yang lebih penting beliau mewariskan Muhammadiyah dalam bentuk karya amaliah.

Sebagai karya amaliah, Muhammadiyah mampu mengubah masyarakat kolot dan anti-kemajuan menuju masyarakat yang memiliki prinsip keislaman yang kuat dan maju sebagaimana agama Islam yang berkembang (*dinul hadharah*). Paling tidak ada dua PR penting bagi Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan Indonesia ke depan.

Pertama, tentu hal ini harus dimulai dari peningkatan mutu tenaga pendidik. Tenaga pendidik harus mampu memahami persoalan, lebih-lebih mampu mengejawantahkan nilai-nilai normatif menjadi nilai-nilai aktual dalam kehidupan. Teringat dari perkataan Kiai Ahmad Dahlan, “*Hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah*”. Kalimat tersebut tentu sejalan dengan prinsip dasar Muhammadiyah, bahwa kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras merupakan inti dari perjuangan Muhammadiyah.

Kedua, perlunya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan kelembagaan. Hal ini bisa diwujudkan demi terwujudnya pendidikan kelembagaan yang unggul dan islami. Membangun budaya lembaga pendidikan yang baik dengan cara menerapkan kebiasaan prinsip-prinsip Islam, membangun kelembagaan yang sehat dengan cara mencerminkan tata kelola yang sehat, serta membangun kepercayaan dengan cara meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang unggul (Setiawan et al., 2010).

Meskipun banyak tantangan pendidikan Muhammadiyah ke depan, Muhammadiyah akan terus berijtihad dalam tajdid gerakan pendidikan yang dinamis. Muhammadiyah akan terus memberikan tenaganya demi pendidikan yang berkemajuan. Muhammadiyah tidak akan pernah berhenti mengabdikan untuk negeri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semoga dengan berbagai problem yang dihadapi lembaga pendidikan di Indonesia, mampu merefleksikan kembali peran-peran *stakeholder* untuk terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, termasuk Muhammadiyah.



Milad Muhammadiyah di Tengah Pandemi: Sedikit Bicara Banyak Bekerja

Sejak kasus pertama kali muncul di Indonesia pada awal Maret 2020, Covid-19 telah berhasil menghantam berbagai macam lini kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, hingga persoalan keagamaan. Tercatat, hingga tanggal 17 Oktober 2020, kasus virus corona di Indonesia telah mencapai angka 470.648, dengan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 395.443 orang dan 15.296 orang meninggal dunia. Angka tersebut tentu bukan angka yang kecil, mengingat angka tersebut kian hari kian meningkat.

Selain masalah kesehatan, pandemi ini juga memberikan efek yang luar biasa pada sektor ekonomi. Pada kuartal III 2020, Indonesia resmi memasuki jurang resesi dengan pertumbuhan ekonomi berada pada angka -3.49% secara tahunan (*year on year*). Dampaknya, perputaran ekonomi menjadi turun drastis, banyak buruh dan pekerja informal kehi-

langan pendapatan dan yang terburuk adanya PHK massal. Ditambah lagi kenaikan harga kebutuhan pokok semakin memperpanjang penderitaan rakyat.

Pada sektor pendidikan, Covid-19 juga mendatangkan permasalahan yang baru. Sebab dialihkannya proses pendidikan dari tatap muka (*offline*) menjadi tatap maya (*online*), pandemi ini melahirkan persoalan pendidikan yang beragam. Akses internet yang terbatas yang tidak mampu dijangkau oleh semua golongan khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, sarana dan prasana yang kurang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran, hingga kemampuan masyarakat terhadap penguasaan teknologi dan informasi menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan menjadi deretan panjang yang menghambat jalannya proses kegiatan pendidikan di hampir seluruh pelosok negeri.

Begitu pula pada aspek sosial, menghadirkan tekanan mental, kecemasan dan ketakutan. Efeknya akan mengarahkan masyarakat pada disorganisasi sehingga situasi sosial menjadi tidak menentu dan berdampak pada tatanan sosial di masyarakat. Pembatasan mobilitas masyarakat juga mengakibatkan akses terhadap pelayanan sosial menjadi kesulitan. Sekolah, pasar, puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya menjadi terhambat. Pun pada wilayah politik juga persoalan keagamaan.

Dengan melihat berbagai dampak serius tersebut yang melahirkan krisis multidimensional, pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat ikut andil dalam memotong arus persebaran Covid-19, termasuk Muhammadiyah. Sedari awal, Muhammadiyah telah berkomitmen dan berikhtiar semaksimal mungkin dalam memutus rantai persebaran wabah ini.

Melalui pendekatan ilmiah dan amaliah, Muhammadiyah terus bergerak secara konsisten, mengakar, dan luas.

Kerja Nyata Muhammadiyah

Sejak berdirinya Muhammadiyah seabad silam, persoalan kemanusiaan merupakan salah satu gagasan penting yang dibawa oleh Muhammadiyah melalui pemikiran KH. Ahmad Dahlan. Etika welas asih yang dibawa hingga hari ini, menggambarkan bahwa Muhammadiyah terbuka pada modernitas dan persoalan bangsa dengan menunjukkan keberpihakan pada kamu marginal dan mustadh'afin.

Pada masa awal munculnya wabah pandemi Covid-19, Muhammadiyah begitu cepat dalam merespons persoalan ini dengan segera membentuk gugus tugas penanganan Covid-19, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC). Aksi ini merupakan tindakan nyata sebagai bentuk dari komitmen Muhammadiyah dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Selama pandemi, tercatat Muhammadiyah telah mengucurkan dana lebih dari 300 miliar untuk membantu negara dalam penanganan Covid-19, termasuk layanan kesehatan melalui 82 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah (RSMA) dan klinik-klinik yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga bergerak cepat dalam merespons persoalan ekonomi. Dengan membentuk Lumbung Muhammadiyah (LumbungMu), dapur umum, pasar murah, dan berbagai macam gerakan ekonomi umat lainnya. Muhammadiyah menyiapkan bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak guna memperkuat ketahanan pangan. Termasuk Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh Muhammadiyah (LazisMu) yang ikut berperan aktif dalam menggalang dana, merumuskan dan menyalurkan program ketahanan pangan.

Selain itu, di sektor pendidikan, Muhammadiyah juga terus berupaya menciptakan lembaga pendidikan yang berpihak pada masyarakat akar rumput sebagai bagian dari misi kemanusiaan atas persoalan pandemi Covid-19. Muhammadiyah memberikan bantuan berupa beasiswa, keringanan biaya SPP, dan subsidi kuota. Juga ragam bentuk bantuan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan karyawan di amal usaha Muhammadiyah (AUM).

Muhammadiyah juga terus meneguhkan gerakan keagamaan dengan menghadirkan narasi wasatiah. Apalagi di tengah Covid-19 muncul narasi yang membentur-benturkan antara agama dan Covid-19. Pandangan ini muncul dari kaum Neo-Jabariyah dengan dalil takut kepada Allah bukan kepada virus corona.

Muhammadiyah selalu berupaya menafsirkan keadaan dengan mempertautkan antara sains dan agama yang bermuara pada *maqashid syariah*. Dengan salah satu identitasnya adalah gerakan tajdid, Muhammadiyah memandang bahwa melihat realitas sosial haruslah dengan pendekatan integratif: *bayani*, *burhani*, dan *irfani*.

Hingga hari ini, Muhammadiyah terus berupaya ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Atas dasar *ta'awun* untuk negeri, Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengerahkan segala daya dan upaya dalam menggelorakan semangat, pemikiran, dan tindakan nyata untuk saling merangkul dan menolong demi mewujudkan kemaslahatan negeri. Utamanya, di masa-masa krisis seperti ini, masyarakat membutuhkan uluran tangan dengan ikut andil dalam setiap aktivitas kemanusiaan yang tertuju pada kebaikan bersama.

Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) dengan mengambil langkah dan segala bentuk tindakan nyata untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat luas. Muhammadiyah akan terus hadir dalam setiap dinamika masalah sosial dan perjalanan bangsa sebagai bentuk aktualisasi dan pengejawantahan dari semangat Al-Ma'un.

Kini, usia Muhammadiyah tidak lagi muda, 109 Tahun. Namun semangatnya terus menggelora demi kerja-kerja kemanusiaan. Terima kasih Muhammadiyah, semoga selalu mencerahkan peradaban dan terus memberikan kontribusi nyata untuk negeri melalui jihad kemanusiaan.

BAGIAN III

— Esai Politik —

“Membangun Nalar Politik”



Pancasila untuk Semua

Pembahasan antara relasi agama dan negara seringkali menjadi perbincangan yang hangat di tengah publik, mulai dari kajian ilmiah, di kelas-kelas akademik hingga diskusi ringan di warung kopi. Perdebatan yang sering muncul ke permukaan tidak akan jauh dan selalu berkaitan dengan posisi serta peran agama di dalam interaksi dan hubungan sosial antarmasyarakat. Termasuk di dalamnya peran agama Islam dalam merumuskan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diskursus ini bukanlah bahan baru yang muncul ke publik. Tetapi mengulas persoalan ini lebih dalam tentu akan menghasilkan pemahaman dan wawasan keilmuan yang lebih luas demi mencari pola terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang berbasis pada kemaslahatan. Dengan jalan terbaik itu akan melahirkan kehidupan yang harmonis dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

Relasi Islam dan Negara

Dalam wacana sistem ketatanegaraan Islam, kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah merupakan sebuah tujuan (*ghayah*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Tujuan utama dari sebuah negara adalah menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Simpulnya, negara diselerenggarakan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat.

Islam lebih banyak berbicara persoalan negara yang lebih bersifat global (*ijmali*) dan garis besar (*kulli*), seperti keadilan (*al-'adalah*) dalam QS. An-Nisa: 58, musyawarah (*asy-syura*) dalam QS. Ali Imran: 159, kesetaraan (*al-musawah*) dalam QS. An-Nisa: 1, kebebasan (*al-hurriyah*) dalam QS. Al-Isra': 70 dan lain sebagainya. Dalil-dalil ini merupakan prinsip dalam menjalankan sistem pemerintahan yang kesemuanya tentu bermuara kemaslahatan umum (Muhajir, 2017).

Para ulama berpendapat bahwa esensi dari kehidupan sejatinya hanya ada dua, yaitu mendatangkan kebaikan (*maslahah*) dan menghindari keburukan (*mafsadat*). Dengan tujuan utama tersebut, tentu menjadi penting untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menghadirkan negara sebagai bagian dari sarana dengan meletakkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.

Kesetaraan dan keadilan antar umat manusia sangat sulit terwujud jika tanpa kehadiran negara. Begitu pun sebaliknya, negara yang dibangun tanpa didasari pada prinsip-prinsip kemaslahatan, akan sulit mewujudkan keadilan dalam hubungan sosial. Senada dengan itu pula, kehadiran negara untuk mendatangkan kemaslahatan merupakan sebuah keniscayaan yang digambarkan dalam kaidah fikih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya wajib adalah wajib.”

Islam memandang bahwa negara akan sangat membantu dalam mewujudkan kemaslahatan. Agama dan negara layaknya mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Agama memerlukan negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan sebagaimana negara membutuhkan agama untuk membimbing jalannya pemerintahan berdasar pada prinsip-prinsip umum kemaslahatan dan kebaikan.

Pancasila dan Komitmen Bangsa

Islam hadir di bumi Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk utama serta menjadi kompas dan arah perjalanan yang kemudian direpresentasikan melalui Pancasila sebagai dasar negara. Islam hadir melalui misi *rahmatan lil ‘alamin* yang dibingkai dalam Pancasila sebagai cita-cita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera di tengah kondisi masyarakat yang majemuk.

Pancasila lahir dari budaya bangsa Indonesia yang luhur, juga diterima dan disepakati sebagai dasar negara. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila dipandang sebagai *Darul Ahdi wa Asy-Syahadah* (negara konsensus dan persaksian), sebagaimana pandangan NU yang memahami bahwa Pancasila merupakan *Mu’ahadah Wathaniyah* (konsensus kebangsaan).

Sebab dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, multiras dan multiagama, Pancasila merupakan dasar yang paling ideal. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya, Islam yang menampilkan sikap santun, beradab, damai, toleran, dan saling mengasihi dan saling merangkul dalam ke-

baikan.

Memang, dalam sejarahnya, bangsa Indonesia khususnya *founding fathers* dan para pejuang kemerdekaan pernah memperdebatkan soal dasar negara yang salah satu opsinya adalah menerapkan syariat Islam secara eksplisit. Bukti yang paling jelas sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Namun, perdebatan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang kemudian berujung pada penghapusan 7 kata pada sila pertama.

Penghapusan ini tentu bukan tanpa sebab. Seandainya para pejuang kemerdekaan dengan mayoritas yang diisi oleh kaum muslim tetap “ngotot” untuk mempertahankan dasar negara dengan menerapkan syariat Islam secara eksplisit dalam konteks budaya dan bangsa Indonesia yang pusparagam, bukan tidak mungkin jika bangsa Indonesia akan terpecah dan justru akan menghasilkan konflik yang berkepanjangan. Penolakan itu muncul sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia timur yang keberatan jika menggunakan redaksi: “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Walaupun kemudian Islam sangat menjamin toleransi dan berpihak pada keadilan, menghindari konflik dan perpecahan merupakan pilihan terbaik dibanding bertahan pada pilihan yang justru menumpahkan darah antarsesama anak bangsa yang melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Pilihan ini tentu sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus diprioritaskan daripada upaya untuk memperoleh kemaslahatan.”

Karena itulah, dalam konteks keindonesiaan, Pancasila merupakan dasar yang cocok dan sangat ideal dengan realitas kebudayaan yang beragam. Kesepakatan ini merupakan perwujudan untuk menetapkan dasar negara yang berorientasi pada kemaslahatan namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh sebab itu, Pancasila bukan hanya sebagai semboyan belaka, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai dasar dari kehidupan rakyat Indonesia.

Ketika Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945, ia menyatakan bahwa hendaknya Indonesia memiliki *philosofische grondslag*, yaitu fundamen, filsafat, dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang berfungsi sebagai dasar dari bangunan suatu negara (Nashir, 2019). Itulah yang hari ini kita sebut dengan Pancasila. Dasar yang menjunjung tinggi kemerdekaan dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Antikritik: Jalan Menuju Keruntuhan

Jika menilik histori ke belakang, sebelum lahirnya abad pencerahan (*enlightenment ages*), gereja memimpin peradaban Eropa sekitar abad 5-15 Masehi, yang oleh para cendekiawan disebut sebagai abad gelap (*dark ages*). Gereja memiliki kekuatan mutlak dalam memutuskan kebijakan, sebagaimana besarnya kekuatan dan otoritas yang dimiliki. Mereka memiliki kewenangan absolut, termasuk dalam menentukan perkara hak dan bathil.

Masyarakat pun harus patuh terhadap segala macam kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja dan tidak diberikan ruang interupsi atas fatwa yang dikeluarkan. Namun, kebijakan yang dilahirkan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan kelompok dan golongannya sendiri. Pemuka agama dan penguasa bersekongkol dalam mengeksploitasi sumber daya secara brutal.

Gereja membentuk doktrin melalui posisinya dengan melegalkan berbagai macam kezaliman. Puncaknya, otoritas gereja mendapatkan perlawanan dengan hadirnya gelombang massa yang melakukan pemberontakan terhadap hegemoni kekuasaan kesadaran palsu. Yang kemudian, peristiwa ini ditandai sebagai *renaissance* (kelahiran kembali).

Runtuhnya Otoritarianisme Orde Baru

Dalam kasus lain, keruntuhan rezim Soeharto tidak terlepas dari sikap otoritarianisme yang dijalankan terhadap kekuasaan politik. Struktur politik yang dibangun sangat identik dengan piramida kasta, di mana presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak absolut. Pengangkatan pejabat pemerintah, anggota DPR dan MPR, hakim pengadilan, hingga pejabat tinggi BUMN harus mendapat restu dari Soeharto (Suwarno, 2001).

Termasuk kebijakan yang dimunculkan sarat akan kepentingan dan berpihak pada mereka yang memiliki modal. Walau kemudian beberapa pihak mengklaim pada ujung pemerintahannya, Soeharto mulai membuka pintu terhadap suara akar rumput, namun masyarakat mulai paham bahwa kebijakan yang diambil tidak lain hanya sekadar politik akomodasi untuk menggaet massa yang mulai kehilangan legitimasi kekuasaan.

Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan yang berefek pada krisis multidimensional. Krisis ekonomi, politik, hukum, hingga konflik sosial ikut menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Soeharto yang berkuasa selama kurun waktu 32 tahun. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan menyebabkan modal lari, di mana proses pembangunan yang dijalankan tidak terlepas dari investor asing, yang secara bersamaan, nilai tukar rupiah terdepresiasi dan menyebabkan

hiperinflasi.

Mulai dari melemahnya legitimasi kekuasaan, menjamurnya berbagai kasus KKN dan pelanggaran HAM, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, konflik kepentingan, ketimpangan sosial, hingga krisis integritas merupakan bukti bahwa Indonesia sedang mengalami kolaps. Krisis inilah yang kemudian melahirkan gelombang protes dan tekanan yang sangat kuat terhadap pemerintah rezim orde baru. Bermula dari sikap otoriter dan antikritik yang kemudian bermuara pada krisis multidimensional.

Kritik: Sebuah Keniscayaan

Kondisi demikian merupakan bukti bahwa siapa pun pemerintah yang berkuasa dan anti terhadap setiap kritik yang masuk hanya akan mengarahkan kekuasaan pada ambang kehancuran. Siapa pun yang berposisi sebagai pemangku kebijakan haruslah menerima berbagai masukan dari setiap elemen masyarakat yang dipimpin.

Sikap anti akan kritik niscaya akan membawa kekuasaan menuju otoritarianisme dengan membuat kebijakan sesuai kepentingan kelompok dan hanya akan mengarahkan pada konflik vertikal. Di era demokrasi seperti sekarang ini, tentu kritik sangat diperlukan demi menjaga jalannya pemerintahan yang bersih dan adil. Kritik bukan bentuk kebencian terhadap penguasa. Justru dengan kritiklah merupakan bagian dari kepedulian dan kasih sayang terhadap kekuasaan yang berjalan.

Selama kritik dilakukan dengan cara-cara santun, mengedepankan adab yang luhur serta taat pada konstitusi dan norma yang berlaku, hal tersebut merupakan vitamin bagi keberlangsungan negara. Pula pemerintah jangan sampai

anti apalagi alergi terhadap kritik. Dengan kritik itulah cara yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang cinta negaranya.

Beberapa waktu lalu, Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat harus lebih aktif dalam memberikan kritik dan masukan. Pernyataan ini kemudian direspons oleh berbagai pihak, ada yang pro ada pula yang kontra. Sebagian pihak mengklaim bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk bahwa pemerintahan Jokowi tetap menjunjung tinggi demokrasi dengan membuka selebar-lebarnya ruang interupsi dan memperlihatkan pada publik bahwa pemerintah tidak anti kritik.

Di sisi lain, sebagian pihak lagi memberikan sindiran bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi tidak sejalan dengan realitas di lapangan, *buzzer* (pendukung kepentingan kekuasaan) dan UU ITE masih menghantui ruang gerak demokrasi dan kebebasan sipil. Terlepas dari berbagai respons masyarakat, negara harus sadar bahwa kritik yang diberikan adalah bentuk kontrol masyarakat sipil terhadap perjalanan bangsa.

Politik partisipatoris yang substantial harus terus digaungkan bagi jalannya arus peradaban dan strategi alternatif bagi kemajuan bangsa. Jika tidak, negara akan sewenang-wenang dalam memutuskan suatu kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian elite politik, dan pada akhirnya hanya menjadi bom waktu yang kapan saja dapat meledak.



Disorientasi Politik Indonesia: Runtuhnya Moral Elite Politik

Meski demokrasi telah berjalan lebih dari dua dasawarsa pasca runtuhnya Orde Baru, nyatanya persoalan demokrasi masih menjadi masalah yang serius dalam konteks berbangsa dan bernegara. Walaupun kemudian demokrasi menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia untuk keluar jeratan otoritarianisme, jalan panjang demokrasi di Indonesia belum juga menunjukkan kondisi yang mengarah pada perbaikan.

Reformasi yang seharusnya menjadi momen bagi bangkitnya sistem pemerintahan Indonesia yang membawa rakyatnya pada kesejahteraan nyatanya masih jauh panggang dari api. Kondisi bahwa demokrasi masih belum berjalan dengan maksimal terkonfirmasi melalui ragam fenomena dan peristiwa perjalanan panjang politik di Indonesia. Ekosistem politik yang masih terlihat jelas bernuansa oligarki merupakan bukti indikasi bahwa politik Indonesia belum mengarah

pada sistem pemerintahan yang melibatkan *demos* (rakyat) dalam sistem demokrasi.

Begitu pula kecenderungan pemerintah yang menutup ruang-ruang dialektika dalam dinamika sosial-politik masyarakat yang keterlibatannya dibatasi dalam dunia politik. Situasi demikian membuka tabir bahwa peran masyarakat sipil dalam sistem perpolitikan di Indonesia tidak berarti dan hanya didominasi oleh elite penguasa, khususnya “pemilik” partai politik. Tak jarang pula beberapa pejabat pemerintahan dijabat oleh petugas partai, sebab kebijakan yang dihadirkan berasal dari keputusan partai semata.

Politik Tanpa Antipati

Sebagai wadah politik, partai hanya dijadikan sebagai alat untuk mendahulukan kepentingan pribadi dan melanggengkan kekuasaan sedang kepentingan rakyat terpinggirkan. Politik yang seharusnya dijadikan sebagai ajang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan mudah tergeser oleh perilaku politik pragmatis.

Bahkan di tengah kondisi Indonesia yang saat ini masih terpuruk dan terus berjuang melawan pandemi, justru elite politik memperlihatkan watak aslinya dengan tidak sama sekali peka terhadap penderitaan masyarakat. Hal ini ditandai adanya kampanye menyongsong Pilpres 2024 yang terpanjang hampir di seluruh penjuru negeri.

Baliho PDIP “Kepak Sayap Kebhinnekaan” dengan tokohnya Puan Maharani, baliho Golkar “Kerja untuk Indonesia” dengan tokohnya Airlangga Hartarto, baliho Demokrat “Demokrasi Nasionalis Religius” dengan tokohnya AHY, hingga baliho PKB “Padamu Negeri Kami Berbakti” yang diisi oleh Cak Imin adalah beberapa partai politik yang ikut mera-

maikan kampanye massal melalui masing-masing baliho.

Biarpun memasang baliho merupakan hak setiap parpol, namun sebagai politisi yang beradab dan memiliki etika, hendaknya sadar akan keadaan dan memahami situasi bahwa saat ini adalah waktu yang kurang etis untuk berkampanye di tengah situasi pandemi. Masyarakat yang masih banyak mengalami kesulitan dari berbagai dampak yang ditimbulkan, masyarakat akan melihat baliho sebagai simbol dari politisi yang tidak memiliki kepekaan di tengah krisis yang sedang terjadi.

Alangkah baiknya jika biaya pemasangan baliho dialihkan untuk kepentingan masyarakat akar rumput, yang masih banyak memerlukan kebutuhan pokok sehari-hari. Sudah menjadi rahasia umum bahwa fenomena seperti itu merupakan hasil dari sistem perpolitikan yang hanya berorientasi pada kekuasaan dengan menggunakan politik transaksional.

Itulah sebabnya mengapa biaya politik begitu mahal, sebab ada modal besar yang dikeluarkan dalam proses perjalanan menuju kekuasaan. Kepemimpinan yang tidak mencerminkan sikap dewasa dalam mengelola negara dan sistem kepartaian yang tidak mendukung juga kepentingan para elite dan pemilik partai yang menyingkirkan kemaslahatan negeri hanya akan melemahkan demokrasi dan justru semakin jauh dari kesejahteraan rakyat.

Masa Depan Politik Indonesia

Colin Crouch seorang ilmuwan politik Inggris, menggambarkan potret di atas sebagai fenomena *post-democracy*; kondisi yang mengarahkan demokrasi pada proses pelemahan (Rahmiati, 2017). Kebijakan penting negeri dikooptasi oleh segelintir elite politik dan ekonomi yang hanya mengedepan-

kan kepentingan penguasa dan pemilik modal semata.

Seturut pula pelaksanaan *checks and balances* yang terlihat lemah dan tidak seimbang, menjadi sinyal bahwa terjadi persekongkolan antara penguasa dan pengusaha. Akibatnya, pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Perilaku yang tidak mencerminkan sebagai abdi negara, baik eksekutor maupun legislator tentu akan semakin menurunkan kepercayaan publik.

Sebab pemerintah merupakan representasi utama bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Ketika kepercayaan itu hilang, masyarakat semakin skeptis dan apatis terhadap setiap proses politik yang ada. Belum lagi ruang bagi setiap warga negara yang memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat banyak ditutup menggunakan pendekatan represif dengan dalih stabilitas politik.

Kondisi ini tentu bukan kabar baik bagi perjalanan demokrasi kita, pula tidak menguntungkan perjalanan politik Indonesia di masa mendatang. Prof. Azyumardi Azra (2020) memberikan catatan, ketika masyarakat menyaksikan kepercayaan itu dikhianati dan kepercayaan itu kian luntur, bukan tidak mungkin pada waktu tertentu, kemarahan itu akan memuncak layaknya bom waktu sebab tidak ada lagi ruang aspirasi yang didengar. Pada saat itulah cara-cara demokratis ditinggalkan dan menjadi cara-cara agresif.

Masa depan demokrasi Indonesia akan terus menjadi suram jika tidak dikelola dengan cara-cara terbaik. Masyarakat bersamaan dengan pemerintah merupakan satu kesatuan yang bersama-sama memiliki tugas untuk meluruskan kiblat bangsa menuju Indonesia yang lebih demokratis. Pragmatisme politik juga apatisisme politik yang mengarah pada peleman demokrasi tentu bukan tabiat yang diinginkan masya-

rakat Indonesia jika ingin maju.

Memasuki usia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akan menginjak ke-76 tahun, kita semua berharap kepemimpinan politik Indonesia dibangun berdasar integritas yang kuat, bermartabat, dan beradab yang berorientasi pada kepentingan umum, bersamaan pula masyarakat yang peduli akan perjalanan bangsa dengan tetap kritis dalam setiap dinamika perjalanan negeri. Hanya dengan usaha demikian, Indonesia akan lebih maju dan sejahtera.



Politik Tanpa Adab

Salah satu persoalan yang dihadapi negeri saat ini adalah politik tanpa adab. Prof. Din Syamsuddin (2014) bahkan menggambarkan bahwa kondisi Indonesia sedang dirundung fenomena *moral illiteracy*, buta aksara moral. Kendati bukan merupakan buta huruf secara fisik, tetapi dampak yang ditimbulkan lebih berbahaya melampaui buta huruf abjad.

Penyakit ini muncul dan menyatu pada diri seorang yang tidak memprioritaskan aspek etis dalam setiap tingkah laku sehingga melanggar norma dan etika yang berlaku. Fenomena ini tentu berbahaya di tengah kehidupan sosial yang majemuk dan menjunjung tinggi adab dan etika. Usaha untuk saling bertoleransi, menghormati dan menghargai sesama akan sirna jika tidak diiringi dengan tindakan moral yang baik.

Kehidupan sosial masyarakat hanya akan menghasilkan gesekan semata jika entitas bangsa tidak menerapkan dan menjunjung tinggi landasan moral yang telah menjadi pegangan bersama. Dalam sejarah dan perjalanan panjang Indonesia, negeri ini dibangun di atas nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi pijakan dalam mengarungi kehidupan yang sarat tantangan.

Pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) menjadi agenda bersama dan utama dalam merumuskan kehidupan yang lebih beradab yang dibangun di atas etika dan moral demi mewujudkan bangsa yang berkarakter dan maju. Senapas dengan itu pula Islam mengajarkan untuk meletakkan adab di atas ilmu. Bahwa salah satu misi utama diutusnya Rasulullah saw., adalah untuk menyempurnakan akhlak.

Rasulullah mampu menyatukan seluruh umat manusia yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Misi ini tentu diwujudkan beliau dalam bentuk *uswah hasanah* (teladan yang baik). Demikian pula dengan umatnya, beliau menyeru untuk mewujudkan kehidupan harmonis yang berangkat dari tingkah laku, watak dan perangai yang baik.

Pejabat dan Moral Illiteracy

Namun, di tengah persoalan negeri yang kian kompleks, rasanya buta aksara moral yang menjangkiti para politisi bisa jadi persoalan yang paling serius, terlebih di masa krisis seperti sekarang ini. Kehidupan yang serba krisis dan bersifat multidimensional yang seharusnya menumbuhkan rasa empati justru semakin memudahkan kepedulian para politisi dan pejabat yang tanpa akhlak.

Sebagai seorang pemimpin dan elite politik, tentu me-

rekalah garda terdepan yang seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik dengan mengedepankan adab dan etika, terlebih yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Sebab mereka yang diamanahkan rakyat untuk mengatur dan melaksanakan jalannya pemerintahan.

Ketika pejabat publik tidak mengedepankan etika dan moral dalam mengelola negara, masyarakat tentu akan melihat elite penguasa berjalan sembrono yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai luhur sebagai bangsa yang beradab. Berbagai potret dinamika politik Indonesia menunjukkan betapa negeri ini masih dijangkiti moral *illiteracy*.

Masyarakat mengharapkan figur yang mampu dijadikan panutan, justru masih dipertontonkan oleh pejabat yang niradab dan niretika. Perilaku tanpa adab dan etika niscaya hanya akan melahirkan kemarahan publik yang berujung pada kebencian dan justru akan semakin menjauhkan jarak antara rakyat dan pemerintah.

Akibatnya, pemerintah dan pejabat publik kehilangan legitimasi sebagai seorang pemimpin negeri dan upaya untuk mengonsolidasikan demokrasi semakin jauh dari target. Negara kita bukanlah negara tanpa adab sebagaimana yang digaungkan oleh Machiavelli, seorang diplomat dan politikus Italia. Machiavelli menekankan bahwa politik harus dipisahkan dari etika dan moral dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Negara kita adalah negara beradab yang menjunjung tinggi etika dan moral. Dengan etika dan moral tersebutlah akan menghasilkan kultur dan budaya kehidupan yang mengedepankan rasa kemanusiaan universal. Sebagai negara yang religius, tentu peran agama sangat berpengaruh signifikan dalam membentuk sistem politik Indonesia yang berda-

sar pada kemaslahatan.

Membangun Keadaban Politik

Agama memiliki peran penting untuk menciptakan atmosfer suasana politik yang mengedepankan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka perjalanan politik Indonesia termasuk di dalamnya elite politik dan pejabat publik mestinya memperhatikan dan memahami aspek-aspek etis dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk menciptakan peradaban yang tinggi tentu tidak akan pernah lepas dari prinsip-prinsip tingkah laku yang beradab dan membangun. Sebab selain memunculkan konflik vertikal antara penguasa dan rakyat pada akar rumput, politik niradab akan melahirkan patron politik yang tidak mencerminkan teladan yang baik. Masyarakat kemudian dididik dengan cara-cara brutal akibat ulah dari para elite politik.

Kondisi demikian tentu akan menghasilkan budaya politik yang jauh dari nilai-nilai luhur bangsa dan justru semakin mengedepankan nihilisme; kehidupan tanpa nilai. Padahal sejatinya politik adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan untuk melanggengkan kekuasaan terlebih menghegemoni. Karenanya, seluruh elemen bangsa terutama para elite politik dan pejabat publik seharusnya selalu mengedepankan etika dan moral dalam setiap tingkah laku.

Kekacauan situasi politik tidak hanya timbul dari pelanggaran hukum semata, tetapi segala gerak dan tingkah laku yang melanggar nilai dan norma terlebih lagi melahirkan kebijakan yang bersifat kontroversial hanya akan memicu kemarahan publik dan tentu akan kehilangan kepercayaan. Sistem pemerintahan yang baik tentu tidak akan lahir jika

tidak dibarengi dengan pendekatan moral. Itulah sebabnya antara moralitas pribadi dan kondisi politik perlu ditelaah dan kemudian dibangun agar menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas.

Kuntowijoyo (2018) menekankan bahwa pentingnya agama dalam perjalanan politik. Sebab agama memiliki kaidah-kaidah yang jelas dalam menentukan arah politik yang lebih baik. Dengan berorientasi pada kemaslahatan dan dilandasi pada prinsip keadilan, tentu akan melahirkan kesejahteraan. Dengan demikian, agama tidak hanya bersifat doktrin belaka, tetapi mampu masuk dan menjadi kunci dalam setiap lini kehidupan.



Inkonsistensi Kebijakan

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diklaim oleh pemerintah masih menjadi pertanyaan publik di tengah situasi pandemi Covid-19 yang kian rumit dengan berbagai ketidakpastian kebijakan yang dihadirkan. Ormas, pakar, pengamat, akademisi, hingga masyarakat akar rumput banyak yang mengkritik berkaitan dengan persoalan kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan tak menentu. Mulai dari persoalan akar rumput hingga problematika kebijakan masih mewarnai rapuhnya ketegasan dalam mengeluarkan kebijakan.

Misalnya, beberapa waktu lalu pemerintah mencanangkan impor beras 1 juta ton, di mana terjadi miskoordinasi antara Kementerian Pertanian dan Bulog yang menyatakan bahwa stok beras masih surplus dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berencana mengimpor beras. Selain itu, BPS juga telah mengumumkan bahwa Indonesia

berpotensi mengalami peningkatan produksi sebesar 26,53 persen, sehingga pemerintah seharusnya lebih mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, terlebih dalam masa-masa panen raya.

Wacana impor beras ini tentu tak masuk akal, di tengah meningkatnya produksi beras. Produksi dalam negeri yang seharusnya menjadi prioritas, tetapi terkesampingkan oleh kepentingan politik semata. Belum lagi efek domino yang banyak berdampak kepada para petani. Walaupun kebijakan tersebut ditunda dengan keluarnya pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak ada impor beras hingga Juni 2021, tetap saja isu tersebut sangat berpengaruh terhadap harga gabah yang anjlok dan turun drastis.

Terbaru, rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok sebesar 12% yang menuai banyak kontroversi. PPN ini tentu sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi nasional. PPN sembako tentu akan menggerus daya beli masyarakat yang berdampak pada kenaikan inflasi.

Policy Making Tanpa Dasar

Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, pemerintah berencana memperberat beban rakyat melalui pajak. Padahal sejatinya dari pajak itulah negara menghidupi rakyat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, melalui subsidi dan bantuan sosial, bukan menggeneralisir dan membebankan ke semua masyarakat untuk membayar pajak, terlebih sembako yang merupakan kebutuhan primer dan hajat hidup orang banyak.

Lagi-lagi persoalan penting yang harus dipahami *policy maker* (pembuat kebijakan) apakah kebijakan yang dikeluarkan

kan sudah tepat sasaran atau hanya semakin memperberat kondisi ekonomi masyarakat. Sebab sembako merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang semua orang diharapkan mampu untuk mengkonsumsi dengan harga terjangkau. Bahkan tersebar meme di sosial media bahwa PPN sembako lebih besar dibanding PPN batubara dan PPNBM.

Termasuk yang menjadi sorotan publik soal pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pimpinan KPK. Selain melemahkan kinerja KPK, kebijakan tersebut tentu telah mengkhianati amanat reformasi yang misi utamanya memberantas KKN. Asumsi tersebut bukan tidak mungkin, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, selain sebagai subordinat dari pemerintah itu sendiri. Apalagi, orang-orang yang tersingkirkan melalui TWK adalah mereka yang berintegritas, yang salah satunya penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Kasus seperti ini tentu bukan saja menyangkut persoalan pegawai dan institusi KPK, tetapi juga berkaitan dengan ratusan proyek pemerintah yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Dampaknya, anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru menjadi lubang akumulasi harta oleh elite oligarki politik dan ekonomi.

Membaca Pikiran Publik

Hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga Institusi KPK menurun setiap tahunnya. Pemerintah harusnya menangkap pesan dari hasil survei tersebut, bahwa para elite politik lebih banyak menghabiskan perhatiannya pada pergumulan politik, terlebih pascapemilu.

Beberapa relawan Jokowi yang ikut berperan di balik layar Pilpres, diklaim mendapatkan jatah komisariss atas usahanya yang lampau. Pengangkatan komisariss tersebut juga mengundang banyak kontroversi. Pasalnya, Menteri BUMN berencana memberikan pelatihan bagi para komisariss dan anggota direksi perusahaan pelat merah. Kebijakan ini tentu menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan publik yang meragukan kapabilitas komisariss dan direksi yang diangkat, bahwa mereka yang diangkat bukan karena memiliki kapasitas dan kapabilitas, tapi karena adanya *conflict of interest*.

Bukan tidak mungkin, pada saat yang sama banyak masyarakat akan merasakan ketidakpuasan atas hasil kinerja pemerintah, yang akan mendorong keresahan sosial dan kriminalitas di akar rumput, dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan krisis politik. Karena itu, pemerintah harus memahami bahwa persoalan kebijakan ekonomi dan politik haruslah dilihat secara matang dan tepat sasaran, dengan tetap mengedepankan orientasi kesejahteraan dan keadilan sosial. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus menjadi prinsip dan dasar dalam merumuskan arah kebijakan negara.

Hindari pragmatisme politik yang hanya mementingkan pribadi dan kelompok semata, terlebih politik transaksional yang justru mendegradasi posisi demokrasi di Indonesia. Perjalanan politik untuk menduduki jabatan tertentu memakan banyak biaya dan tenaga. Maka perlu merefleksikan posisi kepemimpinan di pos-pos pemerintahan yang telah diduduki sebagai sebuah amanah rakyat. Jangan sampai “habis manis sepah dibuang, habis pemilu *ora urusan*”.



Krisis Teladan di Tengah Covid-19

Covid-19 telah memberikan banyak dampak bagi berbagai sektor kehidupan. Hingga 19 Juli 2021, virus ini setidaknya telah menginfeksi 190.173.349 jiwa dengan angka kematian mencapai 4.085.501 jiwa (CFR 2.15%). Bukan angka yang kecil untuk ukuran sebuah virus yang hampir menyerang setiap negara di seluruh dunia. Bahkan, Indonesia sendiri menduduki kasus aktif terbesar ke empat di dunia dengan angka kematian melebihi rata-rata dunia (2.55%).

Hingga saat ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran virus corona ini. Selain dengan imbauan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas), pemerintah juga menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai langkah strategis untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Gerakan vaksinasi juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

memunculkan imun tubuh dari virus sehingga terciptanya *herd immunity* (kekebalan tubuh).

Selain sektor kesehatan, sektor ekonomi juga merupakan yang paling terdampak dari adanya pandemi covid ini. Kolapsnya UMKM, anjloknya IHSG, gulung tikarnya perusahaan, hingga meningkatnya pengangguran yang berdampak bagi penurunan stabilitas perekonomian Indonesia. Beberapa contoh di atas merupakan sedikit dampak dari banyaknya dampak yang dihasilkan oleh Covid-19 ini.

Krisis Keteladanan

Namun, di tengah jatuhnya banyak korban jiwa dan runtuhnya ekonomi nasional, Covid-19 juga membuka kaca-mata kita bahwa masih banyak para pejabat yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin dan teladan bagi rakyat. Alih-alih berempati terhadap setiap krisis yang dihadapi, beberapa pejabat justru banyak menuntut fasilitas negara di tengah gentingnya kondisi rakyat. Meminta dibangun rumah sakit khusus untuk pejabat dan menuntut ruangan ICU disediakan untuk pejabat adalah beberapa pernyataan konyol buah hasil dari *logical fallacy* (cacat berpikir) pejabat negara.

Belum lagi beberapa ucapan yang dilontarkan pejabat, seringkali kontradiktif dan justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Misalnya, LBP yang pada 12 Juli mengatakan, “Yang bilang corona tidak terkendali, datang ke saya.” Namun pada 15 Juli, justru mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, “Saya mohon kita semua paham. Varian delta tidak bisa dikendalikan.”

Begitu pun cuitan Mahfud MD pada akun Twitter-nya yang mengomentari sinetron Ikatan Cinta:

*“PPKM memberi kesempatan kpd sy nonton serial sine-
tron Ikatan Cinta. Asyik jg sih, meski agak muter-muter.
Tp pemahaman hukum penulis kurang pas. Sarah yg
mengaku dan minta dihukum krn membunuh Roy lang-
sung ditahan. Padahal pengakuan dlm hukum pidana
itu bkn bukti kuat.”*

Bukan persoalan sebetulnya jika Pak Mahfud mengo-
mentari tontonannya tersebut, namun yang menjadi persoal-
an dalam kondisi genting seperti sekarang, tidak etis rasanya
jika seorang pemimpin apalagi pejabat tinggi negara, mengo-
mentari hal seperti itu di saat banyak rakyat yang sedang ke-
susahan. Bahkan, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu me-
ngatakan bahwa seharusnya para menteri memiliki *sense of*
crisis (kepekaan dalam menghadapi krisis).

Kicauan “PPKM memberi kesempatan kpd sy nonton se-
rial Ikatan Cinta” justru banyak menyakiti hati rakyat. Di saat
banyak buruh yang bergantung pada penghasilan harian,
banyak usaha yang ditutup secara paksa dengan tindakan
represif, dan banyak rakyat yang kehilangan pendapatan
karena kebijakan PPKM, narasi yang dihadirkan Pak Mahfud
justru sama sekali tidak mencerminkan sikap *sense of crisis* di
tengah PPKM Darurat dan Covid-19 yang masih mengganas,
apalagi sikap sebagai seorang teladan.

Disusul juga usulan Sekjen DPR untuk menyediakan
fasilitas khusus hotel berbintang bagi anggota DPR yang ter-
papar Covid-19 dalam kondisi OTG (orang tanpa gejala). Fa-
silitas ini tentu menimbulkan perdebatan di ruang publik,
sebab kesekian kalinya DPR mendapatkan fasilitas khusus
sejak awal pandemi, mulai dari PCR gratis saat harga yang be-
gitu melambung ketika masyarakat banyak yang tidak dapat
mengakses karena harganya yang mahal, hingga pelaksanaan

vaksinasi gratis yang secara khusus disediakan untuk keluarga dan anggota DPR.

Belum lagi rencana pengadaan pakaian dinas bermerek ternama, Louis Vuitton, yang diajukan oleh Pemerintah DPRD Kota Tangerang. Rencana itu mendapatkan banyak sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak dan elemen. Pasalnya, selain harganya yang fantastis, rencana pengadaan tersebut dilakukan pada saat PPKM Darurat yang notabene masih dalam kondisi krisis yang banyak masyarakat kehilangan penghasilan.

Bahkan, rencana pengadaan pakaian bermerek tersebut mendapatkan sindiran keras dari masyarakat, yang ketika pemilu hanya membagikan pakaian tipis, dan bukan berbagai dari pakaian berharga fantastis. Berbagai potret tersebut memperlihatkan bahwa perilaku para elite politik baik dari eksekutif maupun legislatif masih jauh dari kepedulian akan nasib rakyat, yang di saat bersamaan mengalami kesusahan dan kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kadang kala kritikan yang timbul di tengah masyarakat hanya dianggap sebagai angin lalu dan tidak berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan. Kita semua berharap, para pemangku kebijakan yang menduduki posisi strategis di tanah air paling tidak memiliki rasa empati akan nasib rakyat masih dalam keadaan kesulitan.

Karena itu, di tengah Covid-19 yang masih menjangkiti daratan Indonesia, seyogianya para pemimpin memberikan contoh dan teladan yang baik. Bukan hanya kewajiban sebagai pemangku kebijakan, rasa empati justru menghadirkan keharmonisan di antara setiap elemen bangsa. Sebab, kualitas kepemimpinan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur berhasil tidaknya mengelola suatu bangsa.



Refleksi Maulid Nabi Muhammad: Perbaikan untuk Negara

Setiap tahun pada tanggal 12 Rabiulawal umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, baik itu merayakan atau tidak, perayaan maulid Nabi saw. merupakan perkara *ijtihadiyah*, yang tidak ada kewajiban dan tidak ada larangan dalam melaksanakannya. Selama di dalamnya tidak terdapat unsur TBC (takhayul, bidah, khurafat) dan mendatangkan maslahat, maka Islam memberikan kelonggaran. Karena itu, hendaknya kita saling bertoleransi dalam masalah yang masih diperselisihkan.

Namun, maulid Nabi bukan hanya persoalan perayaan. Lebih dari itu, kelahiran Nabi Muhammad adalah gambaran dari kebangkitan dunia gelap gulita menuju peradaban maju yang terang berisikan cahaya. Di saat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama baik di Barat maupun Timur dipenuhi oleh

tatanan yang kacau, Persia dengan khurafatnya dan Romawi dengan semangat kolonialisme, Muhammad saw. lahir sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Maulid Nabi dan Spirit Kebangkitan

Rasulullah saw. tidak hanya sukses mengangkat martabat manusia dari jurang jahiliah, namun membebaskan manusia dari segala perangai penindasan dan hukum rimba. Yang demikian adalah perwujudan perlawanan terhadap berbagai macam kezaliman yang dibangun melalui agenda profetik dalam laku Muhammad saw.

Agenda profetik ini yang kemudian dipopulerkan oleh Prof. Kuntowijoyo (2006) melalui paradigma berpikir konsep ilmu sosial profetik (ISP). Beliau menafsirkan bahwa Ali Imran ayat 110 adalah representasi dari karakteristik Islam yang luas dan komprehensif dengan menjaga harmonisasi antara Allah, manusia, dan alam dengan pilar utamanya humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Ta'muruuna bil ma'ruuf dimaknai sebagai upaya humanisasi, memanusiakan manusia. *Tanhauna 'anil munkar* didefinisikan sebagai upaya liberasi, membebaskan manusia dari ketertindasan dan dominasi struktural melalui hegemoni kesadaran palsu. Puncaknya adalah *tu'minuuna billah* sebagai bagian dari transendensi, bahwa hidup harus terarah dan memiliki tujuan yang merupakan bagian penting dari proses membangun peradaban.

Bertolak belakang dari agenda profetik tersebut, aktualisasi dan implementasi terhadap nilai-nilai *prophet* yang diwariskan oleh Muhammad saw. melalui uswah hasanah, nyatanya kalah dan tergerus oleh arus modernitas. Kehidupan modern dan situasi kontemporer yang seharusnya menjun-

jung tinggi prinsip keadilan, justru jauh dan berseberangan, dengan itu pula memperlihatkan kepada kita bahwa terdapat pola hidup yang didesain secara masif melalui persengkongkolan penguasa dan pengusaha, terlebih, negara berperan di dalamnya.

Agenda Profetik dan Introspeksi Kebangsaan

Orientasi profit yang dijalankan oleh negara dan dimanfaatkan oleh segelintir oknum, eksploitasi terhadap sumber alam dan manusia, privatisasi ekonomi yang menentang pasal 33 UUD 1945, *political buying* melalui *black campaign* adalah bukti bahwa negara ikut andil dalam melanggengkan oligarki ekonomi dan politik.

Kacamata masyarakat melihat bahwa urusan negara yang seharusnya menerapkan asas trias politica agar tercipta mekanisme *check and balances* tidak lagi dilaksanakan secara adil dan transparan. Walaupun kemudian sebagian pihak mengklaim bahwa konsep tersebut sudah tidak lagi relevan karena permasalahan yang semakin kompleks dan lembaga negara akan saling terkait, nyatanya mekanisme *check and balances* disalahgunakan oleh sebagian oknum penguasa.

Proses yang seharusnya bertujuan untuk saling mengontrol dan mengawasi, dikhianati menjadi ladang persekongkolan kepentingan. Negara yang seharusnya berperan dalam menjalankan amanat konstitusi dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi diselewengkan tujuannya demi kepentingan individu dan kelompok semata.

Eksekutif bersamaan dengan wakil rakyat juga didominasi oleh kelompok oligarki yang sarat akan kepentingan pelanggengan kekuasaan. Ombudsman mencatat, dalam kurun

waktu 2016-2019, ada 397 komisariss yang terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisariss di anak perusahaan BUMN. Selain pemborosan kas negara, rangkap jabatan juga sarat akan konflik kepentingan melalui kontrol terhadap segala macam kebijakan.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, mengatakan bahwa pemerintahan era Jokowi sedang menuju otoritarianisme gaya baru. Hal ini dibuktikan dengan praktik yang dilakukan oleh pemerintah melalui multifungsi Polri, selain pendekatan represif dalam menangani persoalan demokrasi. Selain itu, dari berbagai target ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), gagal tercapai. Target pertumbuhan ekonomi adalah contoh yang paling konkret.

Dalam 5 tahun kepemimpinannya, Jokowi tidak pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dari target 7%, prestasi terbaik yang bisa diraih hanya 5.07% pada tahun 2017. Termasuk target penurunan angka kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, defisit neraca perdagangan, dan utang yang membludak (sumber: BPS). Kegagalan berbagai macam target yang telah dicanangkan adalah hasil dari kesalahan dalam mengelola negara.

Politik destruktif yang dibangun para elite berakibat pada buruknya pengelolaan badan publik. Kegagalan ini melahirkan krisis multidimensional. Melebarnya kesenjangan ekonomi, suburnya oligarki, dan matinya demokrasi adalah buah dari hilangnya integritas. Karena itu, memasuki abad modern yang dipenuhi dengan kemajuan peradaban, negara seharusnya hadir dalam memberikan perlindungan bagi setiap anak bangsa dengan prinsip keadilan dan kebajikan.

Negara harus membuktikan bahwa rakyat, kaum marginal, rentan, dan *mustadh'afin* adalah prioritas utama. Maulid Nabi adalah refleksi bagi kita semua dan khususnya negara bahwa risalah yang dibawa Rasulullah adalah *counter* terhadap segala macam kezaliman. Maka, agenda profetik harus selalu hadir dalam lini kehidupan, mengaktualisasikan nilai-nilai kenabian (*prophet*), dengan mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi ummat dan bangsa. *Allahumma shalli 'ala Muhammad*.

BAGIAN IV

— Esai Ekonomi —

“Keadilan untuk Umat”



Ekonomi Islam sebagai Jalan Alternatif

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Mayoritas pandangan ini berasal dari Barat dan Orientalis, mereka berpendapat bahwa, Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Argumen ini tentu keliru dan agak tergesa-gesa yang timbul dari kesalahpahaman dalam memahami Islam.

Seolah, Islam hanya berkaitan dengan persoalan ibadah ritual. Nyatanya, Islam adalah agama yang sempurna dengan segala aspek anjuran dan aturan di dalamnya. Ia mampu masuk dalam sendi-sendi kehidupan dan memaknai ajaran agama secara komprehensif. Islam tidak bergerak secara parsial, tetapi ia harus terintegrasi dan terkoneksi dalam ruang-ruang kehidupan sebagai bagian dari suatu sistem hidup (*way of life*), termasuk dalam persoalan ekonomi.

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang orientasinya adalah profit, Islam dalam menerapkan sistem perekonomian harus berorientasi pada dua hal; keberkahan di dunia dan kemenangan di akhirat. Karena itu, persoalan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial. Islam harus selalu hadir dalam bentuk tindak dan laku. Sebab Islam bukan hanya persoalan agama, namun ia juga merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam bermuamalah.

Ekonomi dan Nilai Keadilan

Sebagaimana prinsip Islam, bahwa ekonomi harus menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, *ta'awun*, dan berkelanjutan. Karena itu, prinsip ekonomi Islam tidak hanya berorientasi hanya pada keuntungan semata, di sisi lain ada hal-hal yang perlu menjadi indikator bersama bahwa sistem ekonomi harus mampu menyejahterahkan masyarakat secara menyeluruh tanpa diskriminasi dengan berorientasi pada kemaslahatan.

Misalnya, contoh perekonomian dalam skala makro, Islam memandang perlunya keseimbangan dan keserasian dalam mengelola ekonomi suatu negara. Negara memberikan kebebasan terhadap jalannya perekonomian, agar kemudian tercipta keseimbangan pasar di dalamnya. Lain halnya ketika terdapat perilaku zalim pelaku pasar yang mengeksploitasi sumber daya manusia secara brutal, maka negara harus turun untuk mengintervensi dan berperan dalam menghentikan kemungkaran tersebut. Karena itu, negara memberi kebebasan perekonomian selama masih dalam koridornya (Chapra, 2021).

Pula hingga perekonomian dalam skala mikro, dalam hal aktivitas produksi, perusahaan harus mampu berorientasi pada keadilan dan kebajikan, di samping mencari profit. Kegiatan produksi harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip kemaslahatan. Bersamaan dengan itu, aktivitas perusahaan harus mampu menjaga ekosistem lingkungan dan kehidupan. Sebabnya, penghidupan hadir dari alam dan lingkungan. Untuk menjaga hal tersebut, perusahaan harus memiliki nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam menghadirkan kebermanfaatan (Ayub, 2009).

Memasuki abad modern, krisis ekonomi global telah banyak menghantam perekonomian dunia dan telah menjadi pelajaran paling penting yang memperlihatkan kepada kita bahwa betapa rapuhnya sistem ekonomi konvensional yang banyak mengeksploitasi alam dan masyarakatnya. Terdapat jalan panjang yang mengakibatkan mengapa kemudian ekonomi global mengalami degradasi yang dalam. Persoalan ini tak lain disebabkan karena keangkuhan dua sistem ekonomi yang menguasai dunia saat ini, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Sistem ekonomi kapitalis berorientasi pada kepemilikan harta secara pribadi dengan menguasai alat-alat produksi maupun kegiatan distribusi, sehingga instrumen untuk melakukan produksi berada penuh pada tangan individu. Sedangkan sistem ekonomi sosialis seluruh kegiatan ekonominya berpusat dan dikuasai oleh negara, sehingga individu tidak berhak memiliki segala proses kegiatan ekonomi (Baidhaw, 2007).

Agenda Kemandirian Ekonomi

Sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi dan alternatif terhadap lemahnya sistem ekonomi yang menguasai dunia

saat ini. Sistem ekonomi Islam diharapkan dapat membawa keadilan dan kemaslahatan dan jalan tengah bagi jalannya perekonomian dunia. Sehingga diharapkan, sistem ekonomi Islam menjadi jembatan atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta mendatangkan kesejahteraan dan menciptakan negeri yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Salah satu upaya Islam dalam menghadirkan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan menjadikan harta kekayaan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayattersebut menjelaskan bahwa harta harus selalu beredar dan berputar agar dapat menghidupkan perekonomian. Sebagaimana Islam mengartikan harta kekayaan sebagai *flow concept*, bahwa harta tidak boleh ditimbun karena ketamakan dan harus mengalir untuk menghidupi masyarakat.

Jika diibaratkan, harta seperti air, yang jika mengalir ia mampu menghidupi ekosistem, dan menghasilkan manfaat bagi bumi dan seisinya. Sebaliknya, air yang tesendat, mandek, dan berhenti akan menyebabkan air menjadi keruh dan bau, bahkan menjadi sarang nyamuk. Begitu pun dengan harta, dia akan bermanfaat jika mampu menghidupi banyak ruang melalui peredaran secara adil. Distribusi kekayaan yang adil menggambarkan kepatuhan terhadap nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, umat Islam harus sadar bahwa dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan sejahtera, dibutuhkan suatu sistem alternatif yang menjadi *counter* terhadap

kemandekan perekonomian dunia, yaitu sistem ekonomi Islam. Sehingga kelak akan melahirkan peradaban yang menjunjung tinggi keadilan dan kebajikan. Dan tentu hal tersebut tidak akan tercapai tanpa aktualisasi dan aplikasi oleh masyarakat Islam yang paham akan hakikat Islam secara utuh.



Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Dunia

Selain perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan hadirnya revolusi industri 4.0 dan telah mulai beranjak memasuki era society 5.0, perkembangan teknologi tersebut juga telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu, perkembangan teknologi hadir bersanding dengan pesatnya arus globalisasi. Arus ini menciptakan sistem kehidupan yang “memaksa” untuk saling bertaut antara satu negara dengan yang lainnya.

Teknologi kemudian menjadi penopang percepatan laju arus globalisasi. Termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang menjadi serba cepat dan tak terbatas. Dunia kemudian menjadi terbuka dan melampaui sekat-sekat kehidupan antarberbagai bangsa, pula pada aspek ekonomi. Aktivitas ekonomi yang serba cepat telah memberikan pengalaman yang begitu kompleks dan sarat akan tantangan.

Arus Globalisasi dan Pasar Bebas

Adanya aktivitas ekonomi yang cepat, tentu telah menghasilkan dampak yang begitu banyak, termasuk dampak positif dan dampak negatif. Dalam konteks perekonomian, globalisasi mendorong munculnya perdagangan bebas yang memproduksi barang dan jasa antarnegara. Dampak positif yang dihadirkan globalisasi terhadap perdagangan bebas adanya kemudahan untuk melakukan transaksi ekonomi yang dibutuhkan, termasuk kegiatan ekspor dan impor.

Transaksi tersebut kemudian menghasilkan devisa negara yang digunakan untuk memudahkan aktivitas ekonomi khususnya dalam skala internasional. Selain itu globalisasi dari kacamata ekonomi juga menciptakan peluang yang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pasar akan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi sehingga memicu tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas diri. Dunia juga akan terbuka lebar bagi perkembangan bisnis dan usaha dengan banyaknya produk barang dan jasa yang dibutuhkan. Namun, di samping berbagai dampak positif yang dihadirkan, pada sisi lain globalisasi juga memberikan dampak negatif yang begitu luas.

Eksplorasi sumber daya alam besar-besaran yang menyebabkan krisis lingkungan. Para pemegang kekuasaan dan pemilik modal dengan semena-mena mengeruk sumber daya alam tiada henti. Fenomena tersebut memicu terjadinya berbagai kerusakan alam yang berdampak bagi kehidupan sosial-masyarakat dengan dalih pembangunan yang sejatinya dilandasi dan berorientasi pada profit. Belum lagi oligarki yang semakin menciptakan ketimpangan ekonomi yang begitu lebar menemani daftar hitam globalisasi bagi perjalanan

suatu bangsa, termasuk Indonesia.

Kendatipun globalisasi berdampak pada dua sisi bagi perekonomian suatu negara, proses integrasi yang dihasilkan justru menjadi tanda tanya besar dalam posisinya sebagai upaya penunjang kesejahteraan rakyat. Posisi tersebut cenderung positif bagi negara maju, sedangkan bagi negara berkembang cenderung negatif. Arus ini bahkan menjadi ajang bagi negara maju untuk menghegemoni negara berkembang. Sebaliknya, negara berkembang menjadi objek eksploitasi untuk dikeruk kekayaannya.

Globalisasi dan Tantangan Ekonomi Indonesia

Persoalan ini tentu harus menjadi sinyal tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia yang termasuk bagian dari perhelatan ekonomi dunia. Walaupun arus globalisasi merupakan sebuah keniscayaan, segala bentuk kebijakan dan keputusan yang diambil tentu harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa, “Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebab tanpa disadari, dari proses perjalanan globalisasi, terdapat imperialisme ekonomi yang bertujuan untuk mengeruk sumber daya suatu negara yang menjadi objek.

Inilah yang dikritik oleh Antonio Gramsci yang dia sebut dengan hegemoni. Gramsci memandang, agar objek yang dikuasai mematuhi penguasa, maka yang dikuasai tidak hanya didasarkan pada internalisasi nilai dan norma yang dimiliki penguasa, namun lebih dari itu objek yang dikuasai juga harus memberi persetujuan kepada penguasa.

Dalam konteks ini Gramsci menyebut sebagai bentuk supremasi satu atau beberapa kelompok terhadap kelompok yang lainnya, yang ia sebut sebagai dominasi (Sugiono, 2006). Dalam kondisi seperti inilah negara-negara *super power* yang memiliki kekuatan berusaha memegang hegemoni dan supremasi dunia.

Misi ini yang kemudian didukung oleh lembaga-lembaga internasional semacam PBB (*United Nations*), Bank Dunia (*World Bank*), Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan lain sebagainya. Sebuah paradoks memang, ketika dunia mengumandangkan SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang salah satu poin pentingnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan, namun pada saat bersamaan melakukan hegemoni dan eksploitasi secara besar-besaran.

Fenomena seperti inilah yang dikritik oleh Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel bidang ekonomi pada 2001, bahwa perjalanan globalisasi tidak banyak memberikan manfaat bagi keberlangsungan ekonomi dunia. Di antara beberapa alasan Stiglitz antara lain: *rule of the game* yang hanya menguntungkan negara-negara kaya, globalisasi yang hanya berorientasi pada materi sehingga mengesampingkan nilai-nilai kehidupan, perdagangan yang cenderung menghegemoni, dan ketimpangan yang semakin melebar (Rais, 2008).

Dalam konteks inilah, penting untuk memahami posisi Indonesia di antara berbagai macam kepentingan ekonomi dunia. Termasuk di antara dominasi kekuatan ekonomi asing yang menduduki posisi-posisi strategis di pasar Indonesia. Di pasar dalam negeri, Indonesia kadang kala hanya menjadi penonton. Akibatnya, produk dalam negeri seringkali tersingkir dari pasar.

Kondisi demikian tentu bukan hal yang menggembirakan bagi perekonomian Indonesia khususnya kelas menengah ke bawah. Belum lagi beberapa perusahaan sektor strategis dikuasai investor asing. Maka yang harus menjadi prioritas bagi segala aktivitas ekonomi Indonesia adalah berangkat dari integritas dan ketegasan dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki bangsa ini.

Sistem perekonomian yang terintegrasi dari berbagai arah itu harus dibaca secara komprehensif dan mendalam, bukan untuk peluang kepentingan kelompok tetapi menjadi bagian dari upaya mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Hanya dengan demikian, Indonesia mampu bertahan di tengah pusaran ekonomi dunia yang sarat tantangan dan ancaman.



Zakat dan Pemberdayaan Umat

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa potensi zakat yang dimiliki Indonesia sangat besar, yang merupakan basis massa jumlah penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Baznas (2021), potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai 327,6 triliun, dengan yang baru terealisasi hanya sekitar 71,4 triliun atau sekitar 21,79%.

Nominal tersebut tentu merupakan angka yang sangat fantastis dan akan sangat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian, apalagi jika dapat terealisasikan seluruhnya. Terlebih di masa krisis seperti sekarang, zakat sangat berpotensi meredam dampak multidimensi yang dihasilkan Covid-19 dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dengan dana sebesar itu, zakat diharapkan tidak hanya

menjadi jawaban atas berbagai persoalan pandemi Covid-19, tetapi juga manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat marginal, dengan terus mengoptimalkan sosialisasi, manajemen, dan pengumpulan zakat, agar zakat dapat menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus ketimpangan sehingga memunculkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Zakat Sebagai Gerakan Filantropi

Zakat yang sekaligus menjadi bagian dari filantropi Islam sesungguhnya merupakan gagasan yang lebih bersifat teologis (QS. At-Taubah: 103), sebagaimana kewajiban menunaikan zakat bagi kaum muslim yang terkena wajib zakat karena telah mencapai nisab (batas minimal harta wajib zakat). Namun demikian, gagasan teologis tersebut diharapkan mampu memberikan dampak sosiologis yang lebih jelas dan lebih luas bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebab meskipun menunaikan zakat merupakan bagian dari konsep normatif Islam yang bersifat vertikal (perintah Allah bagi kaum muslim yang terkena wajib zakat), tetapi tentu semangat yang dicari adalah yang berdampak pada dimensi horizontal, yang membangun solidaritas kemanusiaan bersamaan dengan mengusahakan terciptanya keadilan dan pemerataan.

Islam memandang bahwa zakat memiliki dimensi ibadah (vertikal) sekaligus berdimensi sosial (horizontal) (Latief, 2017). Kendatipun zakat sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh dalam kerja-kerja sosial jangka pendek, sebagaimana nash Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 terhadap delapan golongan (*asnaf*).

Zakat juga akan sangat berpengaruh terhadap kerja-

kerja kemanusiaan jangka panjang yang bersifat pemberdayaan. Masdar Farid Mas'udi berpandangan bahwa peran zakat terhadap delapan golongan tersebut perlu direkonstruksi secara lebih komprehensif dan kontekstual, sehingga aplikasi zakat dapat menciptakan keadilan sosial dan pemerataan yang lebih luas (Zaprul Khan, 2020).

Pemaknaan zakat mestinya diperluas dengan tafsir kontemporer yang berkemajuan, sehingga zakat tidak hanya dimaknai dalam bentuk karitas yang hanya sesaat, tetapi mengartikan secara lebih substantif dengan menggali kedalaman makna yang terkandung. Dengan ijtihad demikian akan melahirkan pemberdayaan yang bersifat jangka panjang, yang menghasilkan umat berdaya saing dengan segala optimalisasi potensi.

Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Setidaknya logika sederhana yang dibangun bahwa kemiskinan dan kesengsaraan bukan hanya muncul dan bertahan sebab persoalan kultural dan struktural, tetapi masalah tersebut juga timbul dari tidak terberdayakannya masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas terbuka yang memberdayakan dan dapat diakses oleh masyarakat marginal. Masyarakat seolah-olah dimiskinkan dengan tidak mendapatkan akses untuk berbenah, sehingga berdampak pada kemampuan individu yang stagnan dan keahlian yang tumpul.

Dengan cara-cara yang memberdayakan, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bukan hanya bertransformasi dari kekurangan menuju kecukupan, tetapi melatih umat dan masyarakat yang maju, mandiri dan terlatih. Selain dinamis dalam melihat persoalan modernitas yang semakin kompleks, cara ini tentu juga lebih bermanfaat secara jangka panjang dalam membangun ekosistem masyarakat le-

bih sejahtera.

Kendatipun pemberdayaan memakan lebih banyak waktu, tenaga dan materi, tetapi setidaknya apa yang dirasakan oleh masyarakat bisa lebih bermanfaat dan visioner dalam menatap masa depan. Karenanya, pola pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk selalu disinergikan dengan pola karitas (Burhani, 2019).

Sejalan dengan itu pula, bahwa Islam memandang perlunya untuk menghasilkan generasi yang handal dan cakap demi menciptakan kehidupan sejahtera di masa mendatang. Dalil ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Persoalan yang muncul di masyarakat harus dilihat secara komprehensif sehingga memberikan solusi yang bersifat menyeluruh. Termasuk dalam kondisi masa kini, masalah-masalah sosial yang timbul dari kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang berdampak pada konflik vertikal dan horizontal.

Akhirnya masyarakat menjadi terpecah karena munculnya kemiskinan dan melebarnya ketimpangan. Maka salah satu bentuk upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut

adalah dengan distribusi kekayaan melalui keadilan dan pemerataan, terlebih dalam jangka waktu panjang yang bersifat memberdayakan.

Prof. Hilman Latief dalam salah satu diskusi filantropi Islam yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY (01/05/2020) pernah menyatakan bahwa, *"We are not only serving society, but also transforming society into better life."* Paling tidak, konsep yang dibangun bahwa peran kita bukan hanya melayani masyarakat yang bersifat sementara, tetapi lebih jauh dari itu kita dituntut untuk turut terlibat dalam agenda transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih baik, dengan salah satu jalan alternatif adalah memberdayakan umat.

Akhirnya, zakat bukan hanya berperan sebagai pengentas kemiskinan, namun jauh dari itu mampu mengoptimalkan potensi umat dengan menggagas pemberdayaan yang bersifat *sustainable*, memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, hingga mendampingi dalam proses perjalanannya. Upaya demikianlah yang akan menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian dari visi transformasi sosial.



Keseimbangan Harga dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pasar, konsep keseimbangan harga akan terjadi pada titik ekuilibrium. Pada titik ini terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan menggambarkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Begitu pun dengan kurva penawaran, menggambarkan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Pada titik ekuilibrium itulah konsumen dan produsen bersepakat dengan jumlah kuantitas yang dibeli dengan harga yang harus dibayar (Sukirno, 2019).

Inilah yang kemudian menjadi konsep mekanisme pasar Islam dalam penentuan harga. Bahwa harga akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan hukum pasar yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allah lah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Mahapemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Dalil di atas menunjukkan bahwa penentuan harga dalam pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Pasar merupakan wadah bersama dalam melakukan muamalah transaksi jual beli. Oleh sebab itu, merupakan suatu kezaliman bagi siapa saja yang memonopoli harga pasar dengan cara dan alasan yang tidak dibenarkan.

Namun demikian, Islam masih memberikan peluang intervensi harga pada kondisi darurat. Intervensi ini boleh dilakukan jika terdapat produsen yang melakukan monopoli dalam memainkan harga yang merupakan bentuk kecurangan dan bagian dari kezaliman. Inilah yang kemudian yang menjadi identitas Islam bahwa harga akan terbentuk dengan sendirinya. Konsep ini berada di tengah-tengah antara kapitalis yang memberikan kebebasan dan sosialis yang mengintervensi dengan cara megeneralkan.

Keadilan Ekonomi

Hal ini selaras dengan prinsip keadilan yang merupakan bagian dari nilai moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Di banyak ayat, Al-Qur'an banyak berbicara mengenai gagasan keadilan. Tak terkecuali salah satu dari asma Allah adalah *Al-'Adl* (Mahaadil) yang menggambarkan sedemikian

pentingnya menegakkan keadilan.

Dalam konteks ekonomi, Al-Qur'an menyebut kekayaan sebagai suatu objek dari kegiatan ekonomi. Harta sebagai modal (faktor produksi) wajib dikembangkan. Karena itu, Allah memerintahkan agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".

Sebagaimana yang penulis katakan pada tulisan sebelumnya, kekayaan itu seperti air, yang jika mengalir mampu menghidupi ekosistem, dan menghasilkan manfaat bagi bumi dan seisinya. Sebaliknya, air yang tesendat, mandek, dan berhenti akan menyebabkan air menjadi keruh dan bau, bahkan menjadi sarang nyamuk. Begitu pun dengan harta dan kekayaan, dia akan bermanfaat jika mampu menghidupi banyak ruang melalui peredaran secara adil. Distribusi kekayaan yang adil menggambarkan kepatuhan pada nilai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial.

Ihtikar

Berkaitan dengan hal ini, hari ini kita dihadapkan pada persoalan kenaikan harga yang cukup melonjak. Logika ekonomi menggambarkan bahwa ketika barang langka maka akan menyebabkan harga barang naik. Semakin banyak yang membeli maka stok yang tersedia semakin berkurang dan berdampak pada kelangkaan barang yang menyebabkan harga naik. Secara alamiah, kenaikan harga adalah suatu kewajiban. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika kelangkaan barang dimanfaatkan oleh oknum dalam

memainkan harga. Dalam syariat Islam biasa disebut dengan *ihtikar* (penimbunan).

Ihtikar merupakan tindakan seseorang menimbun barang atau jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan berakibat pada melonjaknya harga pasar secara drastis karena persediaan terbatas dan stok yang menipis di pasar. Hal ini merupakan bentuk kezaliman yang secara tegas dilarang oleh Allah sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

لا يحتكر إلا خاطئ

"Tidaklah seorang menimbun kecuali ia berdosa".
(HR. Muslim)

Ulama berbeda pendapat terkait objek *ihtikar* yang dilarang. Namun, ulama bersepakat tentang tidak bolehnya *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok. Dalam konteks hari ini, masker, alat pelindung diri (APD), *hand sanitizer* merupakan bagian dari kebutuhan khalayak umum. Kesepakatan ini sangat rasional, sebab kebutuhan pokok adalah hajat hidup orang banyak dan merupakan bagian dari *maqasid syariah*. Maka, barang-barang tersebut yang dikontekstualisasikan sebagai kebutuhan pokok haram hukumnya dalam melakukan penimbunan.

Hikmah yang kemudian dapat kita petik dari syariat ini bahwa penimbunan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat adalah suatu bentuk kezaliman. Sifat tamak yang kemudian berdampak pada kesulitan orang lain adalah hal yang harus dihindari. Sebab syariat bertujuan memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi khalayak umum dan menutup rapat pintu mudarat agar jangan sampai masuk.

Dalam keadaan seperti ini, negara harus mengintervensi

dan menutup ruang penimbunan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memotong alur distribusi agar barang yang dibutuhkan masyarakat banyak ketika sampai pada konsumen harga tidak terlalu melonjak. Islam sangat menghormati usaha seseorang dan kepemilikan pribadi. Tetapi di sisi lain Islam juga memberikan hak kepada pemerintah untuk mengintervensi bagi siapa saja yang bermain harga.



Membangun Kemandirian Melalui Teologi Al-Qasas

Salah satu ajaran penting di dalam Islam adalah tentang keseimbangan. Berbagai macam term yang mengarah pada keseimbangan seperti *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (moderat), *ta'adul* (adil), dan lain sebagainya menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai wasatiah. Kehadiran Islam bukan hanya sebagai agama kebenaran tetapi juga membawa nilai-nilai kebaikan yang dilandasi pada misi *rahmatan lil 'alamin*.

Islam tidak hanya hadir dalam dimensi teologis namun juga hadir dalam setiap dinamika kehidupan. Dalam kaitannya dengan ini, salah satu ayat Al-Qur'an yang merepresentasikan dari pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan dunia adalah pada surat Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ — وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا —
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ — وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ — إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini penting untuk selalu dipahami dan diaktualisasikan dalam tiap-tiap dimensi kehidupan sebab di dalamnya berisi prinsip dasar dalam memahami kehidupan. Termasuk keseimbangan kehidupan dalam aspek ekonomi. Beberapa pakar ekonomi menyebutnya sebagai “teologi Al-Qasas”.

Ekonomi dalam Perspektif Al-Qasas

Paling tidak ada dua poin penting yang bisa menjadi prinsip dan dasar bagi setiap aktivitas ekonomi. Poin pertama Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mencari bekal untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, sebagaimana tujuan penciptaan manusia untuk beribadah. Pada poin kedua berisi tentang intruksi agar manusia tidak melupakan kehidupannya di dunia dengan terus berupaya dan berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dua poin penting ini yang kemudian mengarahkan pada keseimbangan kehidupan bahwa kehidupan dunia dan akhirat seperti sepasang sayap yang saling memerlukan dan membutuhkan satu sama lain. Dunia berfungsi sebagai tempat untuk menanam dan akhirat berfungsi sebagai tempat menuai.

Maka dalam konteks ini umat muslim semestinya harus memahami bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi, kegiatan

produksi dan distribusi tidak hanya diarahkan pada *profit oriented*, tetapi juga harus menjaga keseimbangan ekonomi dengan berorientasi pada keadilan dan pemerataan. Dua dimensi dari QS. Al-Qasas ayat 77 memiliki pesan tersirat yang menuntun umat Islam agar mandiri dengan mengupayakan segala kemampuan yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid.

Kemandirian dibutuhkan bukan hanya sebagai pemenuhan material individu tetapi motivasi untuk beramal sosial yang dipersiapkan sebagai bekal kehidupan akhirat. Islam menyeru kepada umatnya agar menjadi kaya, yang dengan kekayaan itu mampu beramal dengan sebaik-baik amal. Bahkan di salah satu hadis, Rasulullah bersabda, *“9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berdagang. Sungguh merupakan isyarat pentingnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup agar memudahkan dalam beramal”*.

Aktualisasi Nilai Teologi Al-Qasas

Dalam kaitannya dengan ini, Musa Asy'arie (2015) menjabarkan, pada dasarnya seluruh kegiatan dan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pandangan tauhid. Pandangan inilah yang kemudian menjelaskan bahwa ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sebuah aktivitas keduniaan, tetapi juga memberikan makna tentang hakikat dari teologi, kosmologi, dan antropologi yang saling berkaitan. Sehingga ekonomi tidak hanya diartikan semata-mata bersifat fisik tetapi juga berlandaskan pada nilai, makna dan hakikat itu sendiri dalam kehidupan manusia.

Aktivitas ekonomi tidak akan pernah terlepas dari teologi, sebab darinya beranjak segala prinsip kegiatan ekonomi. Pula aktivitas ekonomi tidak akan terlepas dari kosmologi, sebab akan selalu terkait dan terikat dalam tiap-tiap dimensi ruang dan waktu, begitu pun materi dihasilkan seluruhnya

berasal dari kosmos. Yang pada akhirnya, aktivitas ekonomi akan selalu bertaut dengan dimensi antropologi, dengan manusia yang berperan sebagai subjek maupun objek dalam kegiatan ekonomi itu.

Antara teologi, kosmologi, dan antropologi akan saling bertalian dalam setiap aktivitas ekonomi. Teologi ekonomi menjadi dasar dari wujud rasa syukur atas setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Swt. dalam penciptaan alam dan manusia. Kegiatan ekonomi bukan untuk menciptakan keserakahan yang bermuara pada ketimpangan, tetapi berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.

Kosmologi ekonomi juga akan berperan sebagai tempat aktualisasi dengan memberdayakan ruang, waktu dan materi yang ada di seluruh alam semesta. Elemen tersebut berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dan bukan untuk dieksploitasi terlebih dirusak. Dengan antropologi ekonomi yang ditempatkan sebagai proses humanisasi, dengan pemberdayaan ekonomi yang membebaskan, membebaskan dari segala macam pemiskinan, dengan menjaga hak Tuhan, hak alam, dan hak manusia secara berimbang.

Akhirnya, untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang bermanfaat bagi keberlangsungan individu dan masyarakat, aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dan dilaksanakan dalam satu pandangan yang tunggal, namun terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan. Usaha dan ikhtiar harus selalu dijadikan sebagai upaya untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan segala kegiatan dan aktivitas ekonomi akan membuka pintu kesejahteraan dengan tetap berdasarkan nilai-nilai fundamen. Pula kemandirian tidak akan datang dengan cara instan, tetapi merupakan proses panjang dari

setiap dinamika yang dilalui. Segala tingkah dan laku akan melahirkan keahlian dan kemahiran dan menjadi sebuah kemandirian.

Kehidupan yang tidak dihiasi dengan setiap usaha dan ikhtiar, niscaya akan membentuk pribadi yang lemah dan menjauhkan diri dari tabiat berdikari. Karenanya, penting untuk selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Upaya demikianlah yang menjadikan kita sebagai manusia yang terus menjaga keseimbangan kehidupan.



Ekologi dalam Perspektif Ekonomi

Dalam berbagai literatur, persoalan ekonomi dan ekologi seringkali digambarkan sebagai sebuah fenomena parsial dan tidak terkait. Padahal secara faktual, ekonomi dan persoalan lingkungan memiliki korelasi yang sangat kuat. Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat adalah hasil dari pemanfaatan alam dengan segala isinya.

Manusia memanfaatkan alam dengan seluruh isinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama kehidupan masih terus berjalan dan manusia masih menjadi subjek bagi perjalanan bumi, penting untuk selalu menjaga keseimbangan alam dengan dilandasi sikap tanggung jawab. Namun dewasa ini, krisis ekologi hampir menjadi persoalan fundamental di seluruh dunia.

Pemanfaatan alam yang tidak dijaga keseimbangannya dan bersikap sembrono justru menghasilkan kerusakan. Per-

tumbuhan penduduk yang begitu pesat dibarengi dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat, menyebabkan tekanan yang besar terhadap konsumsi sumber daya alam. Jumlah penduduk dunia saat ini mencapai angka 7.7 miliar dengan persentase pertumbuhan penduduk 1.08% per 2019.

Konsumsi terhadap kebutuhan pangan, air bersih, pemukiman dan kebutuhan primer lainnya akan terus meningkat. Berbagai macam persoalan lingkungan akan menjadi ancaman di masa depan, jika pemerintah dan masyarakat bersama dengan pemangku kebijakan terkait tidak menghiraukan krisis lingkungan ini.

Ekonomi Estraktif dan Kehancuran Ekologi

Aktivitas sosio-ekonomi harus dikontrol agar terus memastikan kehidupan manusia yang berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan humanis dalam memanfaatkan alam pula isinya. Sampah, polusi, penggundulan hutan, pembangunan yang tidak memperhatikan ruang terbuka hijau, dan persoalan-persoalan lain yang mengancam lingkungan justru semakin menjerumuskan pada jurang kehancuran.

Manusia bertanggung jawab atas hal itu dan memerlukan perhatian yang sangat serius dari setiap elemen kehidupan. Karena itu, perlu suatu konsep yang visioner dalam membaca arah kehidupan di masa yang akan datang. Walaupun kemudian kebutuhan manusia akan selalu ada dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Menjaga keseimbangan alam tidak bisa dinafikan dan harus terus menjadi prioritas sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan keseimbangan itulah yang akan menjaga kehidupan agar tetap harmonis. Sejalan dengan hal itu, *Sustainable Development Goals* (SGDs) yang

dirumuskan oleh negara-negara anggota PBB merupakan bagian dari ikhtiar kemanusiaan demi mewujudkan kehidupan yang seimbang, adil, dan berkelanjutan.

Salah satu sub-bagian dari SGD's ini adalah persoalan ekosistem yang harus terus dijaga dan dirawat. Peran pemerintah bersama dengan pemangku kebijakan terkait harus menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan ekosistem di darat dan di laut. Negara juga memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam sebagai persoalan kompleks.

Termasuk juga persoalan keanekaragaman hayati, yang kerap dikomersialkan untuk kepentingan sepihak. Dalam kasus seperti ini, pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan dan kebijakan, mengurangi degradasi habitat alamiah, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, serta melindungi dan mencegah kepunahan spesies langka.

Di sisi lain, persoalan lingkungan tidak bisa terlepas dari produk konsumsi yang dihasilkan oleh masyarakat. Menurut data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah sampah yang dihasilkan dari konsumsi masyarakat mencapai 64 juta ton per tahun, dengan asumsi 0.7 kg per orang setiap harinya.

Belum lagi persoalan sampah yang mengalir ke laut dan mengancam ekosistem bahari, yang hampir semuanya berasal dari aktivitas konsumsi manusia di daratan. Karena itu, penting untuk merumuskan sanitasi perkotaan yang baik dan memadai serta pengelolaan limbah padat yang profesional demi menunjang konservasi alam yang berkelanjutan.

Masa Depan Lingkungan dan Ekonomi Hijau

Pemanfaatan sumber daya alam oleh negara juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah jangan sampai dengan dalih pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan, tetapi diselewengkan tujuannya demi kepentingan individu dan kelompoknya. Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa, *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Aktivitas input, proses, hingga outputnya harus berdasarkan kemaslahatan dengan mempertimbangkan keseimbangan alam. Aktivitas ekonomi harus berlandaskan asas keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan. Tujuan pembangunan harus berorientasi pada peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin dengan menjamin akses terhadap kebutuhan dasar.

Jangan sampai penggunaan dan pemanfaat alam yang menjadi sumber kehidupan bagi khalayak umum dieksploitasi sepihak demi kepentingan kelompok dan pribadi. Terlebih, eksploitasi tersebut merusak alam hingga menyebabkan runtuhnya keseimbangan lingkungan. Bumi merupakan amanah Tuhan sebagai perantara untuk menjalani kehidupan dengan tetap menjaga keseimbangan bukan justru menjadi objek kehidupan yang justru dieksploitasi atau dirusak.

Maka, sebagai muslim *rahmatan lil ‘alamin* sebagai bagian dari komponen bangsa, kita menyadari bahwa kehadiran umat Islam sebagai khalifah harus terus terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang dihadapi oleh umat manusia, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 107, *“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2008). *Memahami Makna Tekstual, Konteks-tual & Liberal*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Akbar, Z. (2020). *Jurus Sehat Rasulullah*. Bandung: PT. Sygma Media Inovasi.
- Al-Buthy, M. S. R. (2007). *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Robbani Press.
- Al-Qaradhawi, Y. (1991). *Fikih Perbedaan Pendapat*. Jakarta: Robbani Press.
- Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LES-FI.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azra, A. (2020). *Menjaga Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Baidhawzy, Z. (2007). *Islam Melawan Kapitalisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Burhani, A. N. (2019). *Menemani Minoritas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chapra, U. (2021). *Sistem Moneter Islam*. Depok: Gema In-sani.
- Hambali, H. (2008). *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- Husaini, A., Arif, S., Syafrin, N., Alim, A., Kania, D. D., Armas, A., Syarif, N., & Handrianto, B. (2013). *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Depok: Gema Insani.
- Karim, M. A. (2017). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam Sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2018). *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Latief, H. (2017). *Melayani Umat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Madjid, N. (2019). *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Muhajir, A. (2017). *Fikih Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nashir, H. (2016). *Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2019). *Indonesia dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Rahmiati, D. (2017). Demokrasi, Ham dan Militer. *Penelitian Politik LIPI*, 14(2), 109–288.
- Rais, M. A. (1987). *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan.
- Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta: PPSK Press.
- Setiawan, F., Sucipto, & Kurniati, D. L. (2010). *Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah*. Bantul: Pyramedia.
- Shidiq, S. (2014). *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana.

- Sugiono, M. (2006). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, S. (2019). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Suwarno. (2001). *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Syamsyuddin, D. (2014). *Muhammadiyah untuk Semua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Yasid, A. (2019). *Logika Ushul Fikih*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zaprul Khan. (2020). *Paradigma Filsafat Ekonomi Islam Musa Asy'arie*. Yogyakarta: LESFI.

Epilog

oleh:

Abdul Musawwir Yahya

Ketua Umum DPP IMM 2021-2023

Lintas peradaban dunia menunjukkan fakta bahwa agama dan politik kenegaraan merupakan dua variabel signifikan yang memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Keduanya merupakan perangkat aturan yang memberi petunjuk bagi kemaslahatan publik. Tanpa keduanya, masyarakat akan kehilangan pegangan hidup dan kompas menuju tatanan hidup yang baik.

Tiap dekade bergulir, diskursus tentang sinergitas ketiga variabel tersebut terus mengemuka. Usaha untuk mencari titik temu juga terus diupayakan. Sengkarut perdebatan hubungan ketiga variabel itu sering merupakan perdebatan yang kontraproduktif, banyak tokoh pemikir yang sekadar menyumbang suara namun tidak menyumbang ide yang produktif. Akibatnya kita terus-menerus hinggap di alam perdebatan, perang pemikiran itu kerap kali tidak mampu dimuntahkan dalam wujud tindakan kolektif.

Saat ini, diskursus mengenai agama, politik kenegaraan dan ekonomi harus produktif. Para tokoh pemikir sudah

waktunya tampil merumuskan konsep/ide yang mampu di-operasionalisasikan oleh masyarakat agama dan masyarakat bangsa. Agama, politik dan ekonomi harus memberi peran praktis bagi hajat hidup publik.

Keislaman, Keindonesiaan, dan Kesejahteraan

Dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, sekarang ini dialog kita harus konsentrasi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Islam dan negara harus mampu berjalan sinergis demi membangun kesejahteraan publik. Prasyarat utama dari agenda strategis ini adalah menyudahi dialog dan perdebatan yang tidak produktif.

Dalam realitas global, fakta menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah umat Islam semakin banyak, namun di sisi yang lain, kita masih berada dalam kondisi perekonomian menengah ke bawah. Ketertinggalan kita dengan komunitas agama yang lain jangan sampai berlarut-larut. Harus ada rumusan praksis-taktis untuk mengejar ketertinggalan umat di bidang ekonomi.

Dalam hubungannya dengan agenda kebangsaan dan kenegaraan kita di Indonesia, diperlukan sinergitas yang produktif antara kekuatan agama dan politik demi pembangunan ekonomi bangsa. Islam harus menjadi spirit yang energik untuk membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Politik kebijakan ekonomi juga harus berpijak dan berpihak pada masalah publik. Praktik pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh pemerintah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan falsafah negara, pancasila.

Posisi Kaum Muda

Golongan muda punya peran strategis dalam usaha

membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan modal energi yang masih ranum, pemikiran yang segar dan idealisme yang masih kuat, anak muda harus tampil memberi peran praktisnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh spirit keagamaan dan keindonesiaan yang padu. Beberapa peran strategis yang perlu dilakukan oleh kaum muda ialah:

Pertama, peran intelektual. Dalam posisi ini, peran intelektual yang perlu dimainkan oleh pemuda ialah terus menerus mengurai benang masalah perekonomian masyarakat, seraya dengan itu tampil merumuskan ide solutif. Peran intelektual anak muda juga bisa dimainkan dengan usaha terus menerus membangun kritik yang konstruktif bagi pengambilan kebijakan pemerintah.

Kedua, peran sosial-ekonomi. Turut terlibat dalam agenda kewirausahaan seraya membangun kesadaran publik ihwal pentingnya membangun kesejahteraan publik dari napas keindonesiaan dan keagamaan. Anak muda sekarang harus melakukan praktik ekonomi-kewirausahaan yang positif dan produktif. Mereka perlu mengalami jatuh bangun, hanya dengan demikian mereka dapat belajar secara eksperimental.

Ketiga, peran keagamaan. Dalam konteks keagamaan, saat ini diperlukan tafsir dan dakwah keagamaan yang segar dalam usaha mendorong umat untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi produktif. Islam harus menjadi spirit berke majuan, mendorong pemeluknya untuk dapat menyelesaikan masalah kerumah tanggaannya. Untuk usaha ini, diperlukan pembaharuan terus-menerus, pemikiran Islam, baik dari tingkat teologis hingga tangga fikih harus diarahkan pada sebuah bentuk pemikiran Islam yang solutif membangun kesejahteraan masyarakat bangsa dan agama.

Penulis dalam buku ini mengurai tiga variabel (agama, politik, dan ekonomi) dalam satu tarikan napas. Ijtihad intelektual demikian sedikit-banyak tentu akan memberi pengaruh pada usaha membangun rumusan baru yang segar bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan agama. Buku, bagaimanapun sederhananya akan terus memberi pengaruh signifikan bagi pembangunan kesadaran publik. Demikian buku ini diharapkan tepat tiba di daratan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih perlu melakukan peremajaan di bidang keagamaan, politik kenegaraan, dan kebijakan ekonomi nasional.

Di ujung ulasan ini, kami ucapkan penghargaan sebesar-besarnya atas terbitnya buku ini. Terbit harapan, semoga kelahirannya mampu menjadi angin segar bagi para pembaca.

TENTANG PENULIS



MUHAMMAD ZULFIKAR YUSUF, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 20 April 1998, dari pasangan Bapak Muhammad Yusuf Saharuna dan Ibu Suhriah Abdullah. Ia menempuh pendidikan S-1 di Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saat ini sedang menyelesaikan studi S-2 di Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelum melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, ia menamatkan sekolah dasar di SDN 01 Rawasari Jakarta Pusat, dan melanjutkan sekolahnya di SMP-SMA Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta.

Selain menjalani studi, ia juga turut aktif terlibat di beberapa organisasi kemahasiswaan, di antaranya Badan Ekse-

kutif Mahasiswa UMY, UKM Tapak Suci UMY, hingga menjadi Ketua Umum IMM FEB UMY, Sekretaris Bidang TKK IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta, dan saat ini menjadi Ketua Bidang TKK DPD IMM DIY. Saat ini ia juga diamanahkan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain menulis buku, ia juga aktif menulis karya-karya ilmiah lainnya seperti jurnal, prosiding, *book chapter* maupun tulisan-tulisan lepas yang dikirim di media-media *online*. Penulis dapat dihubungi melalui email mzulfikary@gmail.com maupun media sosial Instagram @pickaaar.